

# **PENGEMBANGAN KONSEPSI KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN ISLAM**

**Yunus Mustaqim**

SMK Al-Madina Demak, Jawa Tengah, Indonesia  
cestercity@gmail.com

## **Abstrak**

Dinamika perkembangan kurikulum pendidikan Islam perlu mendapat perhatian bagi praktisi pendidikan agar penetapan kebijakannya sesuai dengan tujuan. Diketahui bahwa pendidikan Islam di Indonesia masih jauh dari harapan karena masih banyak output yang belum memiliki kompetensi atau kepribadian yang diharapkan. Penelitian ini menganalisis tentang alasan mengapa kurikulum harus dikembangkan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum, dan cara mengembangkan konsepsi kurikulum pendidikan Islam. Dengan melakukan penelitian kepustakaan, diperoleh hasil bahwa (1) Kurikulum pendidikan Islam harus dikembangkan untuk mencapai keberhasilan peserta didik baik dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik; (2) faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum adalah; tujuan, tuntutan masyarakat global, isi atau materi yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi psikologis peserta didik; (3) untuk mengembangkan konsepsi kurikulum Pendidikan Islam, perlu adanya pemahaman pada masing-masing konsepsi kurikulum yang sudah dirumuskan oleh para ahli pendidikan. Konsepsi kurikulum yang dimaksud adalah: kurikulum akademik, humanistik, teknologi, dan rekonstruksi sosial.

**Kata kunci: pengembangan konsep, kurikulum pendidikan Islam**

### **Abstract**

*The dynamics of the development of Islamic education curriculum needs to get attention for education practitioners so that the determination of policies can be objective. The problem is many education outputs do not have the expected competence or personality. This study analyzed the reasons why the curriculum should be developed, factors that influence, and how to develop curriculum conception. By doing library research, the result showed that (1) the Islamic education curriculum should be developed to achieve the success of learners in cognitive, affective, and psychomotor; (2) factors affecting the development are purposes, demands of the global community, and contents or materials (3) to develop a conception of the curriculum of Islamic education, the need for understanding on their respective conceptions of the curriculum that has been formulated by education experts. The conceptions of the curriculum are: the academic curriculum, humanistic, technological, and social reconstruction.*

**Keywords:** *concept development, the curriculum of Islamic education*

## **A. Pendahuluan**

Dewasa ini, kurikulum sudah menjadi disiplin ilmu tersendiri dan telah berkembang cukup signifikan, baik secara teoritis maupun praktis. Dahulu, kurikulum dinamakan kurikulum tradisional yang lebih banyak memfokuskan mata pelajaran dengan metode klasik/ dominasi ceramah. Sesuai dengan tuntutan era global, sekarang kurikulum dinamakan kurikulum modern yang lebih banyak diorientasikan pada kecakapan hidup (*life skill*), pengembangan diri, pembangunan politik, hukum, ekonomi, industri, dan sosial-budaya untuk menciptakan peradaban dunia yang tertata rapi. Era global dengan berbagai permasalahannya, seperti; ekonomi, politik, hukum, sosial-budaya, yang kesemuanya membutuhkan ranah praktik dengan persyaratan teknologi informasi dan komunikasi.

Wujud perkembangan ini terkait dengan aspek immaterial-psikologis yang syarat membutuhkan perhatian, pemeliharaan, pengajaran, pendidikan dan bimbingan dalam rentang waktu yang relatif panjang. Demikian pula perkembangan kurikulum yang diterapkan di negeri ini pernah membutuhkan waktu 10 tahun pemberlakuannya. Namun demikian, kurun waktu yang relatif panjang tersebut nampaknya tidak seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, boleh dibilang

hanya hitungan harian, bulanan atau tahunan. Untuk mempermudah pemahaman tentang faktor-faktor perkembangan kurikulum, maka perlu upaya penguasaan landasan kurikulum yang mencakup empat hal. Pertama, filosofis, yaitu mencari tujuan pendidikan yang benar dalam kehidupan komunitas tertentu. Kedua, psikologis, yakni sesuai dengan perkembangan kejiwaan anak. Ketiga, sosiologis, yaitu sesuai dengansituasi/kebutuhan masyarakat. Dan organisatoris, yaitu relevan dengan bentuk bagaimana pelajaran itu disampaikan. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum pada umumnya adalah tujuan yang hendak dicapai melalui aneka ragam metode, tuntutan masyarakat global, isi atau materi yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi psikologis peserta didik. Dan khusus untuk faktor-faktor perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam, perlu adanya tambahan, yaitu faktor sumber hukum Islam al-Qur'an dan al-Hadits yang multi interpretasi.

Disiplin ilmu kurikulum ini harus membuka diri terhadap kekuatan internal dan eksternal yang dapat memengaruhi proses perkembangan kurikulum dari yang konvensional menjadi inkonvensional, dari yang tradisional/klasik menjadi modern. Karena bagaimanapun itu, out put peserta didik nanti akan menjadi berkualitas atau tidak sangat dipengaruhi oleh kurikulum itu sendiri. Melihat pentingnya kurikulum dalam pendidikan ini, maka dalam waktu tertentu kurikulum selalu dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi tersebut.

Dengan perkembangan media teknologi sekarang dan seterusnya, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan tersebut akan memacu perkembangan pengetahuan dan metode belajar pun semakin bervariasi. Oleh karena itu, tidak mungkin dalam suatu institusi pendidikan tetap mempertahankan kurikulum tradisional. Hal ini dikhawatirkan akan mengakibatkan institusi tersebut tidak dapat bersaing dengan institusi lainnya yang memacu diri melengkapi sarana-prasarananya dengan media teknologi canggih.

Dalam UUSPN No. 20 Tahun 2003, dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai

tujuan pendidikan tertentu (UUSPN, 2003: 6.) Engkoswara, guru besar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung telah membuat 4 (empat) rumus pengertian kurikulum, lengkap dengan visualisasinya. Pertama, kurikulum adalah jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Kedua, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran. Ketiga, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik. Keempat, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran dan kegiatan-kegiatan, serta segala sesuatu yang akan berpengaruh dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Rumus ini memudahkan kita untuk memahami pengertian kurikulum.

Realita tersebut memang berposisi sebagai objek perifer dalam proses pengembangan kurikulum nasional. Posisi sebagai objek ini tidak menguntungkan karena ia seringkali diabaikan oleh para otoritas pengembang kurikulum. Sayangnya, kedudukannya yang menjadi objek berubah menjadi subjek dan penentu dalam implementasi kurikulum tetapi tetap tidak dijadikan landasan ketika guru mengembangkan kurikulum. Padahal keragaman itu berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum, kemampuan sekolah dalam menyediakan pengalaman belajar, dan kemampuan siswa dalam proses belajar serta mengolah informasi menjadi sesuatu yang dapat diterjemahkan sebagai hasil belajar. Artinya, keragaman itu menjadi suatu variabel bebas yang memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap keberhasilan kurikulum baik sebagai proses maupun sebagai hasil.

Posisi keragaman sebagai variabel bebas memang berada pada tataran sekolah dan masyarakat di mana suatu kurikulum dikembangkan dan diharapkan menjadi pengubah yang tangguh sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat diperkirakan (*perceived needs of a society*). Secara nyata pengaruh tersebut berada pada diri guru yang bertanggungjawab terhadap pengembangan kurikulum dan pada siswa yang menjalani kurikulum. Dengan kata lain, pengaruh tersebut berada pada tataran yang tidak boleh diabaikan sama sekali di mana studi kurikulum memperlihatkan kerentanan, dan kemungkinan besar kurikulum berubah atau bahkan berbeda sama sekali dengan apa yang telah direncanakan dan diputuskan. Oleh karena itu, keragaman sosial-budaya nasional harus

menjadi faktor yang diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam penentuan filsafat, teori, visi, pengembangan dokumen, sosialisasi kurikulum, dan pelaksanaan kurikulum.

Masyarakat sebagai sumber belajar harus dapat dimanfaatkan sebagai sumber konten kurikulum. Oleh karena itu, nilai, moral, kebiasaan, adat/tradisi, dan cultural tertentu harus dapat diakomodasi sebagai konten kurikulum. Konten kurikulum haruslah tidak bersifat formal semata, tetapi society and cultural-based, dan open to problems yang hidup dalam masyarakat. Konten kurikulum haruslah menyebabkan siswa merasa bahwa sekolah bukanlah institusi yang tidak berkaitan dengan masyarakat, tetapi sekolah adalah suatu lembaga sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat. Selanjutnya, konten kurikulum harus dapat menunjang tujuan kurikulum dalam mengembangkan kualitas kemanusiaan peserta didik.

Dari deskripsi di atas bahwa dinamika perkembangan kurikulum pendidikan Islam perlu mendapat perhatian bagi praktisi pendidikan yang berposisi menentukan kebijakan pendidikan nasional pada umumnya dan para teknisi pelaksana pendidikan Islam, guru/pendidik, pada khususnya. Hal ini mengingatkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia masih jauh dari harapan dalam menjadikan out put-nya yang benar-benar memiliki kompetensi, khususnya kepribadian. Banyak fenomena yang terjadi bahwa siswa yang dikenal panggilannya “murid” di institusi Islam, seperti; murid MI, MTs, dan MA tidak jauh berbeda perilaku/kepribadiannya dengan siswa di SD, SMP, dan SMA. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan atau library research, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa kurikulum harus dikembangkan?
2. Faktor apa yang mempengaruhi perkembangan kurikulum?
3. Bagaimana mengembangkan konsepsi kurikulum pendidikan Islam?

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah bagi para praktisi pendidikan untuk selalu mengontrol dan mengevaluasi perkembangan kurikulum, baik yang berskala nasional (umum), maupun khusus, yaitu kurikulum pendidikan Islam. Disamping itu, bermanfaat bagi institusi dan guru untuk selalu melaksanakan kurikulum secara tepat dengan disertai evaluasi berdasarkan pengalamannya di lapangan

sehingga kurikulum nasional dan pendidikan Islam mencapai sasaran yang tepat guna bagi peserta didiknya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kurikulum Harus Dikembangkan**

Dinamika perkembangan kurikulum tidak pernah berhenti, dan pada umumnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Ia sebagai perangkat yang membantu praktisi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang nantinya diharapkan mampu sebagai agen perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dinamika perkembangan kurikulum pendidikan Islam ini pada khususnya juga merupakan media bantu pendidik untuk melakukan tugas mengajarnya dalam memahami materi ajar peserta didik lebih cepat dan akurat.

Keanekaragaman sosial budaya nasional menjadi dasar dalam mengembangkan dinamika perkembangan kurikulum pendidikan Islam seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum di negara yang dikatakan cukup banyak penduduknya dan luas wilayahnya ini, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Keragaman etnis, bahasa, agama, adat, sosial, budaya, aspirasi politik, dan kemampuan ekonomi memberikan tekanan yang sama, kalau tidak dapat dikatakan lebih kuat dibandingkan perbedaan filosofi, tujuan, visi, dan misi, serta teori yang dianut para pengambil keputusan mengenai kurikulum. Perbedaan filosofi, tujuan, visi, misi dan teori pengambil keputusan seringkali dapat diselesaikan melalui jenjang otoritas yang dimiliki seseorang walaupun dilakukan dalam suatu proses deliberasi yang paling demokratis sekalipun. Ketika perbedaan tersebut terselesaikan, maka proses pengembangan dokumen kurikulum dapat dilakukan dengan mudah. Tim yang direkrut adalah tim yang diketahui memiliki filosofi, visi, dan teori yang sejalan atau bahkan mereka yang tidak memiliki ketiga kualitas itu tetapi ahli dalam masalah konten yang akan dikembangkan sebagai konten kurikulum.

Pengertian kurikulum yang beraksentuasi pada seperangkat rencana dan pengaturan proses pembelajaran mempunyai beberapa unsure berikut.

1. Tujuan; merupakan suatu yang diharapkan atau arah yang akan dicapai berdasarkan perencanaan terlebih dahulu. Dalam proses pembelajaran hendaknya mengacu pada tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler dan tujuan instruksional. Adapun tujuan yang dimaksud disini adalah tujuan instruksional, yaitu tujuan yang dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dan pengajaran pada bidang studi tertentu berdasarkan perencanaan yang sudah matang. Secara umum untuk tujuan pendidikan Islam adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui penguasaan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, pengamalan sehingga peserta didik menjadi insanul kamil.
2. Isi/materi; merupakan materi yang berkenaan dengan pengetahuan ilmiah dan pengalaman belajar peserta didik. Sudjana (1996: 30-31). memberikan kriteria tentang isi kurikulum yang baik sebagai berikut: 1) sesuai, tepat dan bermakna bagi tahap perkembangan anak; 2) mencerminkan kenyataan social; 3) mengandung aspek intelektual, moral, sosial secara seimbang; 4) mengandung pengetahuan ilmiah; 5) berdasarkan teori, prinsip, konsep yang jelas; dan 6) dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan.
3. Bahan pelajaran; yang dimaksud adalah mata pelajaran. Mata pelajaran tersebut sebagai bagian dari isi kurikulum yang menghasilkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pengetahuan, kesenian, kebudayaan, sistem nilai dan keterampilan yang didasarkan pada norma-norma.
4. Cara yang digunakan; berarti metode pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan tujuan, media, jenjang pendidikan, jenis mata pelajaran, situasi kelas berdasarkan kuantitas siswa, dan kondisi psikologis peserta didik. Berbicara tentang cara/metode pembelajaran sangat tergantung pada kualitas pendidik, artinya pendidik yang kaya penguasaannya pada metode dan variasi dalam mengaplikasikannya di kelas. Maka, semakin baik, karena bagaimanapun tidak ada suatu metode yang baik dan benar, melainkan yang ada adalah metode yang tepat dan tidak tepat, karena masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kelemahan.

5. Evaluasi; UUSPN No. 20 tahun 2003 juga disebutkan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Amir Daien Indrakusuma memberikan definisi evaluasi atau tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan obyektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat (Indrakusuma, 1975: 27). Pengertian lain, tes adalah "*Test is comprehensive assessment of an individual or to an entire program evaluation effort*" (Anderson, dkk, 1976: 425). Maksudnya "Tes adalah penilaian secara komprehensif (menyeluruh) pada individu atau pada keseluruhan usaha evaluasi program".

Dengan demikian, komponen evaluasi pada dasarnya memiliki ciri khas tersendiri bila dibandingkan dengan komponen kurikulum lainnya. Hal ini mengingat bahwa evaluasi sudah memiliki persyaratan ilmiah tersendiri untuk menjadi suatu ilmu evaluasi yang mandiri.

Pada prinsipnya membentuk kurikulum yang ideal itu sama dalam hal pemenuhan; rumusan tujuan, isi/materi pokok, pengorganisasian bahan pelajaran, kesiapan media dan lingkungan, metode yang digunakan, serta evaluasi yang diterapkan. Mereka merupakan satu kesatuan yang saling menunjang keberhasilan peserta didik baik berupa pengontrolan penalaran (kognitif), perilaku (afektif), pengalaman dan keterampilan (psikomotorik). Dan mengecilkan peran salah satunya akan berimplikasi pada sulitnya pencapaian hasil pembelajaran yang diharapkan.

Keberadaan kurikulum pendidikan Islam harus selalu dikembangkan sehingga akan menjadikan institusi pendidikan Islam senantiasa diharapkan oleh semua pihak. Fenomena itu dapat ditilik adanya kurikulum pendidikan Islam yang mendasar dan yang menyentuh kebutuhan dasar, yaitu melihat kebutuhan vital masyarakat. Kurikulum pendidikan Islam menghindari adanya kurikulum yang tumpang tindih. Tumpang tindihnya kurikulum dari satu materi pelajaran ke materi pelajaran lainnya yang diberlakukan secara transparan atau umum akan menjadikan proses pembelajaran

menjadi jenuh. Padahal sumber kurikulum pendidikan Islam sudah jelas sistematisnya, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dengan demikian, diharuskannya pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang baik sebagai parameter kualitas dan tidaknya suatu pendidikan harus memiliki visi, misi, konsep dan tujuan yang jelas dan seimbang antara muatan teoritis dan praktis. Muatan teoritis berarti memberi landasan dari berbagai teori yang ada, sehingga melahirkan suatu analisis dan hipotesis yang objektif dan ilmiah. Sedangkan muatan praktis adalah mem-follow up dalam format realitas kerja fisik yang profesional.

Kurikulum pendidikan Islam harus dikembangkan dalam mencapai keberhasilan peserta didik tidak dalam ranah kognitif semata, karena hal ini akan melahirkan demoralisasi peserta didik, yakni kurangnya peserta didik dalam kompetensi kepribadian dan minimnya keterampilan yang membawa peserta didik selalu dalam ketergantungan hidupnya. Kognitif yang berarti kemampuan rasional, afektif kemampuan dalam merealisasi tingkah laku yang positif dan berperasaan, dan psikomotorik sebagai refleksi dan keterampilan fisik harus diseimbangkan sedemikian rupa, sehingga cipta, rasa, dan karsa benar-benar dapat dinikmati oleh peserta didik pada khususnya dan masyarakat umumnya.

Adanya upaya baru berupa sistem pembelajaran *link and match* (keterkaitan dan kesepadanan) yang dikembangkan sekarang dan menjadi alternatif pertama belumlah menjadi suatu sistem dan metode yang menjanjikan eksistensinya. *Link and match* sebagaimana digambarkan Prof. Malik Fajar dalam bukunya Visi Pembaruan Pendidikan Islam hanya merupakan sebagian aspek yang peranannya menghubungkan program studi antara ilmu-ilmu lunak dengan ilmu-ilmu keras (*soft sciences* dengan *hard sciences*) idealnya 1:3 atau 1:4 dengan melihat realitas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidaklah harus dijustifikasi sedemikian rupa dan diikuti sepenuhnya. Melainkan harus dipandang pula kecenderungan kultural masyarakat kita yang berbasis religius. Di mana kegagalan pendidikan yang dialami bangsa Indonesia sekarang ini adalah kurangnya muatan kurikulum yang menyentuh pada aspek humanistik yang berakar dari nilai-nilai normatif keagamaan.

Oleh karena itu, kurikulum pendidikan Islam harus dievaluasi dan dikembangkan seiring dengan perkembangan budaya dan peradaban manusia. Perkembangan ini senantiasa menggunakan pendekatan secara holistik, yakni menggali semua potensi peserta didik yang berupa bakat, minat, mental, emosi, perilaku, keterampilan personal dan sosial secara seimbang.

Bakat merupakan kemampuan alamiah peserta didik yang dibawa sejak lahir. Minat adalah keinginan peserta didik untuk mengetahui atau melakukan sesuatu. Mental berarti kondisi psikis peserta didik dalam merespon suatu obyek apakah stabil atau instabilitas. Emosi mencerminkan reaksi peserta didik terhadap gejala atau peristiwa yang berada baik dalam dirinya ataupun di luar dirinya. Perilaku mencerminkan tingkah laku yang sudah menjadi kebiasaan baik disadari maupun tidak. Keterampilan sebagai cerminan kreativitas peserta didik dalam menyelesaikan masalah kehidupannya secara cepat, tepat dan berhasil guna berdasar al-Qur'an dan al-Sunnah.

## **2. Faktor Pengaruh Perkembangan Kurikulum Pendidikan Islam**

Kurikulum sebagai buku pedoman (*guidance book*) primer proses belajar mengajar baik dalam ruang lingkup nasional sekolah formal khususnya, nonformal, dan informal umumnya berada pada posisi sentral dalam mengembangkan kemampuan peserta didik yang berupa aspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik secara simultan. Aspek-aspek tersebut merupakan kesatuan yang utuh dan seimbang.

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum pada umumnya adalah tujuan yang hendak dicapai, tuntutan masyarakat global, isi atau materi yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi psikologis peserta didik. Di samping itu, faktor yang terpenting lagi mempengaruhi perkembangan kurikulum kaitannya dengan Pendidikan Islam adalah faktor sumber hukum Islam berupa al-Quran-Hadits.

Parameter perumusan tujuan dalam pengembangan kurikulum diantaranya tujuan harus menggambarkan jenis tingkah laku, tujuan yang kompleks perlu dijelaskan sehingga tidak mengaburkan perilaku, tujuan harus mengarah pada perilaku dari pengalaman belajar, tujuan

harus menggambarkan bentuk perilaku yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam konteks yang berbeda-beda, tujuan harus bersifat realistis, tujuan harus luas yang dapat membentuk perilaku siswa.

Kecenderungan masyarakat global adalah pragmatis, dan interaksi mereka tanpa terbatas oleh tempat dan waktu. Hal ini menuntut kurikulum harus dinamis pula. Isi/materi kurikulum yang ideal hendaknya; sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, mencerminkan kenyataan sosial, keseimbangan aspek intelektual, moral, sosial, berdasarkan teori, prinsip, konsep yang jelas dan harus dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan

Faktor psikologis peserta didik dalam mempengaruhi rancang bangun kurikulum menjadi persoalan yang amat penting, karena belajar merupakan aktivitas yang amat kompleks. Ada belajar yang berupa fakta kongkrit, ada belajar dalam memecahkan dan menganalisis masalah, dan ada belajar tentang mengamati nilai-nilai sosial yang abstrak.

Al-Qur'an dan al-Hadits mempunyai pengaruh besar dalam pengembangan kurikulum, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya syarat dengan banyaknya kemunculan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba baru dan modern. Al-Quran telah memberikan kepuasan penalaran yang sesuai dengan kesederhanaan dan fitrah manusia tanpa unsur paksaan dan di sisi lain disertai dengan pengutamaan afeksi dan emosi manusia.

Secara konkret, dapat dicermati dari paparan di atas bahwa faktor yang mempengaruhi dinamika perkembangan kurikulum pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

*a. Faktor Tujuan*

Tujuan menjadi modal dasar setiap langkah kegiatan manusia, terlebih dalam pendidikan yang melibatkan pendidik dan peserta didik. Mereka sama-sama hidup yang mempunyai tujuan sama, yaitu menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, agama, nusa dan bangsa. Tujuan menjadi faktor penyebab pengembangan kurikulum menurut Hilda Taba yang dikutip oleh Ali (1992: 87-89) bahwa tolok ukur rumusan tujuan sebagai berikut:

1. Pernyataan tujuan harus menggambarkan jenis tingkah laku yang diharapkan serta isi atau konteks penerapannya.

2. Rumusan tujuan yang kompleks perlu dijabarkan sehingga tidak mengaburkan jenis perilaku yang diharapkan.
3. Rumusan tujuan harus jelas menggambarkan bentuk perilaku dari berbagai pengalaman belajar yang hendak dicapai.
4. Rumusan tujuan harus menggambarkan bentuk-bentuk perilaku yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam konteks yang berbeda-beda.
5. Tujuan harus bersifat realistis sehingga dapat diwujudkan dalam kurikulum maupun dalam bentuk pengalaman belajar di kelas.
6. Ruang lingkup tujuan harus luas sehingga dapat menembus berbagai bentuk hasil siswa yang menjadi tanggungjawab sekolah.

Adapun langkah-langkah teknis perumusan tujuan kurikulum adalah: 1. Menganalisis kebutuhan, 2. Menganalisis sumber tujuan, 3. Mengembangkan tujuan sekolah, 4. Mengembangkan jenis pengalaman belajar dan organisasinya, 5. Menjabarkan tujuan sekolah sesuai dengan lingkup dan urutan pengalaman belajar yang ditentukan, 6. Mengembangkan tujuan bidang studi, 7. Mengembangkan bahan pelajaran, 8. Menjabarkan tujuan bidang studi, 9. Mengembangkan tujuan pengajaran umum, 10. Menjabarkan tujuan pengajaran umum ke dalam tujuan pengajaran khusus (Ali, 1992: 89-90).

#### ***b. Faktor Tuntutan Masyarakat***

Dampak globalisasi dan industrialisasi pada peradaban dunia merujuk kepada sesuatu pengaruh yang mendunia, paling tidak ditandai oleh penyebaran arus informasi yang melanda dunia tanpa terbatas wilayah atau penyebaran jaringan produksi, produk industri dari satu negara ke negara lain (Feisal, 1995: 129). Berhubungan dengan dunia pendidikan, berbagai perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan unsur budaya lainnya akan mudah diketahui oleh masyarakat. Kecenderungan seperti ini harus diantisipasi oleh dunia pendidikan jika kita ingin menempatkan pendidikan sebagai agen pembangunan dan perkembangan yang tidak ketinggalan zaman (Feisal, 1995: 131).

Melihat kecenderungan masyarakat global tersebut pengem-

bangun kurikulum “tanpa terbatas oleh waktu minimal atau maksimal” menjadi suatu keniscayaan sesuai dengan karakteritik kurikulum itu sendiri, yakni dinamis. Karakter kurikulum yang dinamis sangat tergantung kreatifitas pelaku pendidikan, yaitu; kepala sekolah, pendidik, dan pemerintah yang berkompeten. Dengan demikian, kecenderungan masyarakat global yang pragmatis ini sangat memberi pengaruh pada perubahan dan perkembangan kurikulum yang realistis sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya.

*c. Faktor Isi/ Materi*

Isi/materi merupakan salah satu komponen pendidikan. Artinya tanpa materi proses pembelajarn tidak mungkin terjadi. Dalam hal ini materi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa dari kalangan akademisi yang profesional.

Faktor isi/materi tersebut sangat mempengaruhi perkembangan kurikulum dengan alasan bahwa masih banyak problematika yang harus dipecahkan melalui validitas kurikulum yang diajarkan sekolah kepada peserta didiknya. Oleh karena itu, isi/materi kurikulum hendaknya disesuaikan dengan hasil-hasil penelitian atau penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang syarat dengan kebaruannya.

*d. Faktor Psikologis Peserta Didik*

Disamping psikologis sebagai landasan rancang bangun kurikulum, kondisi psikologis anak juga dapat sebagai faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Faktor psikologis tersebut berbicara tentang kondisi kejiwaan seseorang dalam merespon suatu obyek. Untuk merancang dan membuat kurikulum perlu memperhatikan murid dalam belajar, karena belajar ternyata suatu aktivitas yang amat kompleks. Ada belajar yang berupa fakta kongkrit, ada belajar dalam memecahkan dan menganalisis masalah, ada belajar tentang mengamati nilai-nilai sosial yang abstrak.

Dalam kajian psikologi terdapat teori ilmu jiwa daya atau mental disiplin dan ilmu jiwa asosiasi. Teori ilmu jiwa daya menganggap bahwa otak atau mental manusia terdiri dari sejumlah faculties atau daya-daya. Tiap daya mempunyai fungsi tertentu, maka ada daya ingat, daya pikir, daya tanggap, daya fantasi dan lain-lainnya. Sedangkan ilmu jiwa asosiasi beranggapan bahwa untuk

memperoleh pengetahuan metode yang paling tepat adalah S-R, yaitu menghubungkan stimulan (rangsangan) dan respon (tanggapan). Disamping itu dalam teori ilmu jiwa terdapat teori gestal, yaitu belajar yang mengutamakan keseluruhan lebih dari jumlah bagian-bagiannya. Teori ini beranggapan bahwa manusia cenderung melihat suatu pola, organisasi, integrasi atau konfigurasi dalam apa yang dilihatnya (Nasution, 1995: 68)

Dengan demikian faktor kondisi psikologis peserta didik mempunyai pengaruh terhadap pengembangan kurikulum. Sebagai contoh, mayoritas peserta didik dalam suatu negara yang dilanda kerusuhan, perang saudara, atau dalam kehidupan keluarganya, orang tua/ayah-ibu, tidak harmonis akan menjadikan peserta didik tersebut terganggu konsentrasinya dalam belajar yang imbasnya adalah proses pembelajaran tidak maksimal. Hal ini lain dengan peserta didik yang berada dalam negara yang aman, tenteram, makmur dan dalam kehidupan keluarganya harmonis, maka akan menjadikan peserta didik semangat dalam belajar.

#### *e. Faktor Sumber Hukum Islam*

Al-Qur'an dan al-Hadits dijadikan sumber pembelajaran dalam Pendidikan Agama Islam. Pengaruhnya terhadap pengembangan kurikulum tidak bisa dihindari dalam kondisi apapun, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya syarat dengan banyaknya kemunculan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba baru dan modern.

Abdurrahman an-Nahlawi (1983: 29-30) menggambarkan bahwa al-Qur'an telah memberikan kepuasan penalaran yang sesuai dengan kesederhanaan dan fitrah manusia tanpa unsur paksaan dan di sisi lain disertai dengan pengutamaan afeksi dan emosi manusiawi. Dengan demikian al-Qur'an mengetuk akal dan hati sekaligus. Al-Qur'an ini mengawali konsep pendidikannya dari hal yang sifatnya kongkrit, seperti hujan, angin, tumbuh-tumbuhan, guntur, atau kilat menuju hal yang abstrak, seperti keberadaan (kebijaksanaan), kebesaran, kekuasaan dan berbagai sifat kesempurnaan Allah SWT. Metode yang ditawarkan pun dalam pendidikan mencakup metode bertanya baik untuk tujuan mengkritik maupun mengingatkan, metode yang menggembirakan dengan penekanan pada kemampuan afeksi manusia.

### 3. Mengembangkan Konsepsi Kurikulum Pendidikan Islam

Kurikulum mempunyai komponen dan struktur. Komponen adalah bagian yang mempunyai fungsi masing-masing dari keseluruhan sesuatu yang ada. Komponen kurikulum mencakup; isi, bahan pelajaran, cara/metode dan evaluasi. Sedangkan struktur kurikulum adalah untuk membangun atau menyusun perencanaan kegiatan sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Struktur yang dimaksud dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam hendaknya didasarkan pada identifikasi kompetensi, pengembangan struktur kurikulum dan pendeskripsian bidang studi. Kurikulum pendidikan Islam sangat interest pada identifikasi kompetensi, yakni meningkatkan kemampuan untuk menjadikan peserta didik terampil dalam segala bidang. Pengembangan struktur kurikulum menjadi suatu keniscayaan karena bidang-bidang studi yang tercakup mencerminkan tingkat kemampuan peserta didik. Dan pendeskripsian mata pelajaran/bidang studi akan mempermudah tujuan kurikuler tercapai karena sudah memfokuskan pada karakteristik bidang studi masing-masing.

Namun dalam realitasnya format kurikulum antara satu dengan lainnya terkadang banyak ditemui perbedaannya. Hal ini dikarenakan adanya perspektif yang berbeda antara ideologi pembuat kurikulum satu dengan lainnya dalam menentukan tujuan, orientasi, metode dan konsep pendidikan yang berlainan pula. Dalam kurikulum pendidikan Islam, tentunya didasarkan pada landasan filosofis, al-Qur'an dan al-Sunnah, yang mengedepankan amaliah, perilaku/kepribadian dengan didukung keterampilan serta penalaran intelektual. Karena bagaimanapun tujuan utama Nabi Muhammad saw. diutus oleh Allah Swt adalah untuk menyempurnakan atau memperbaiki akhlak manusia.

An-Nahlawi (1996: 196) mendeskripsikan karakter kurikulum Islam sebagai berikut: 1). Selaras dengan fitrah manusia. 2). Fundamental, memurnikan ketaatan pada Allah semata. 3). Relevan dengan tingkat pendidikan, jenis kelamain dan tugas kemasyarakatan. 4). Sesuai dengan tujuan, kebutuhan, realitas masyarakat. 5). Terbebas dari kontradiksi negatif, dan selaras dengan integritas psikologis. 6). Selaras dengan tujuan negara. 7). Penggunaan metode yang elastis/

fleksibel. 8). Penekanan pendidikan yang behavioristik. 9). Sesuai dengan tingkat usia peserta didik. 10). Sesuai dengan aktivitas islami secara langsung jihad, dakwah islamiyah.

Dengan demikian, kurikulum pendidikan Islam hendaknya benar-benar memperhatikan tingkat pendidikan yang dikelola baik pemerintah ataupun non-pemerintah. Tingkatan tersebut merupakan keniscayaan dengan melihat bahwa peserta didik yang sama dan berbeda dalam tingkat intelektualnya dalam satu kelas sangat mempengaruhi untuk siap atau tidaknya peserta didik tersebut menerima mata pelajaran.

Demikian pula kurikulum pendidikan Islam yang ideal hendaknya memperhatikan jenis kelamin peserta didik antara pria dan wanita dalam bentuk mata pelajaran tertentu. Seperti mata pelajaran yang terkait dengan kemampuan fisik perlu didominasi pada peserta didik putra. Dan kurikulum Islam juga harus didesain sesuai dengan kebutuhan dan tugas kemasyarakatan. Karena bagaimanapun peserta didik adalah bagian dari komunitas masyarakat yang dapat mewarnai baik tidaknya kehidupan masyarakat itu sendiri. Kongkritnya kurikulum pendidikan Islam harus mengikuti perkembangan era global, informasi dan teknologi, namun harus pula mengacu pada sumber utama ilmu pengetahuan, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dalam RUU SPN No. 2 tahun 1989 telah memberikan warna baru untuk lembaga pendidikan Islam dimana dengan diberlakukannya UUSPN No 2 tahun 1989 madrasah-madrash mendapat perlakuan yang sama dengan sekolah umum lainnya. Karena dalam UUSPN tersebut madrasah dianggap sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam dan kurikulum madrasah sama persis dengan sekolah umum plus pelajaran agama Islam sebanyak tujuh mata pelajaran. Secara operasional, integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional ini dikuatkan dengan PP No. 28 tahun 1990 dan SK MenDepartemen Pendidikan Nasional No. 0487/U/ 1992 dan No. 054/U/ 1993 yang antara lain menetapkan bahwa MI/MTs wajib memberikan bahan kajian sekurang kurangnya sama dengan "SD/SMP". Surat-surat Keputusan ini ditindak lanjuti dengan SK Menteri Agama No. 368 dan 369 tahun 1993 tentang penyelenggaraan MI dan

MTs. Sementara tentang Madrasah Aliyah (MA) diperkuat dengan PP Nomor 29 tahun 1990, SK MenDepartemen Pendidikan Nasional Nomor 0489/U/ 1992 (MA sebagai SMA berciri khas agama Islam) dan SK Menag Nomor 370 tahun 1993. Pengakuan ini mengakibatkan tidak ada perbedaan lagi antara MI/MTs/MA dan SD/SMP/SMA selain ciri khas agama Islamnya.

Terlebih mengacu pada UUSPN No. 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan agama Islam mempunyai peluang mengembangkan kurikulumnya sendiri dan cukup diuntungkan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari pasal demi pasal, seperti:

1. Tujuan Pendidikan Nasional sangat memberikan peluang untuk merealisasikan nilai-nilai al-Qur'an yang menjadi tujuan pendidikan Islam yaitu terbentuknya manusia yang beriman dan bertaqwa (Pasal 3).
2. Anak-anak Muslim yang sekolah di lembaga pendidikan Non Islam akan terhindar dari pemurtadan, karena anak-anak tersebut akan mempelajari mata pelajaran agama sesuai dengan yang dianut oleh siswa tersebut dan diajarkan oleh guru yang seagama dengan dia (Pasal 12 ayat 1a)
3. Madrasah-madrasah dari semua jenjang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional secara penuh (Pasal 17 dan 18)
4. Pendidikan keagamaan seperti Madrasah Diniyah dan pesantren mendapat perhatian khusus pemerintah, karena pendidikan keagamaan tidak hanya diselenggarakan oleh kelompok masyarakat tetapi juga diselenggarakan oleh pemerintah (Pasal 30).
5. Pendidikan Agama diajarkan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi (Pasal 37) (Harsono, 2014).

Adanya perubahan UUSPN No.2 tahun 1989 menjadi UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 dimaksudkan agar sistem pendidikan nasional bisa menjadi jauh lebih baik dibanding dengan sistem pendidikan sebelumnya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh seorang pengamat hukum dan pendidikan, Frans Hendrawinata, beliau mengatakan bahwa dengan adanya undang-undang sistem pendidikan nasional yang baru, maka diharapkan undang-undang tersebut dapat menjadi pedoman bagi kita untuk memiliki suatu

sistem pendidikan nasional yang mantap, yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang berkualitas. Apalagi mengingat semakin dekatnya era keterbukaan pasar. Hal tersebut menjadi kekhawatiran bagi kita semua mengingat kualitas sumber daya manusia di Indonesia berada di bawah negara-negara lain termasuk negara-negara tetangga di Asean. Oleh sebab itulah diperlukan suatu platform berupa sistem pendidikan nasional yang dapat menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan dunia internasional khususnya dalam era keterbukaan pasar saat ini (Harsono, 2014).

Konsep merupakan ide atau gagasan seseorang dan konsepsi berarti gagasan atau cita-cita yang masih dalam pikiran. Ahmad Tafsir memberi makna konsep adalah definisi. Definisi ialah pengertian atau penyebutan semua ciri esensi suatu objek dengan membuang semua ciri aksidensinya. Ciri esensi adalah ciri yang menyebabkan objek sebagai objek itu sendiri (ciri pokok), sedangkan ciri aksidensi ialah ciri yang tidak pokok, maksudnya ciri tersebut boleh ada boleh tidak, atau tidak mempengaruhi ada tidaknya objek itu sendiri (Tafsir, 1997: 110).

Untuk menentukan arah pengajaran dan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan yang optimal perlu adanya pemahaman pada masing-masing konsepsi kurikulum yang sudah dirumuskan oleh para ahli pendidikan. Konsepsi kurikulum yang dimaksud adalah: kurikulum akademik, humanistik, teknologi, dan rekonstruksi sosial. Untuk konsepsi kurikulum pendidikan Islam dengan ciri-ciri: sistem pengajaran selaras dengan fitrah manusia, lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, lebih mengutamakan 'amaliah (praktek) daripada nadhariah (teori).

#### *a. Kurikulum Akademik*

Akademik merupakan kegiatan yang bercirikan pengetahuan ilmiah melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Sebagai insan akademisi tentunya dituntut untuk berfikir secara logis, empiris, kritis, cerdas, mandiri dan proaktif yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.

Adanya konsepsi kurikulum akademik ini, didasarkan pada kesadaran tentang pentingnya kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi yang menuntut peserta didik memiliki kemampuan intelektual (kognitif) tinggi (cerdas). Memang manusia (peserta didik) mempunyai kelebihan yang tidak ada bandingannya dengan makhluk lainnya. Kelebihan ini adalah manusia diberi akal (intelektual) yang disuruh untuk mengembangkannya melalui pendidikan.

Akal dapat dididik dan dikembangkan semaksimal mungkin, terlebih lagi jika sesuai dengan bakat dan minatnya. Allah Swt telah menciptakan manusia dengan bekal akal sehingga dapat menguasai dan menundukkan alam semesta untuk kemaslahatan umat manusia, bukan untuk mafsadatul umat. Itulah dasar pendidikan Rabbani yang melahirkan harga diri manusia itu sendiri. Jadi akal membutuhkan proses pendidikan yang tidak kenal batas tempat dan waktu.

Ayat al-Qur'an yang pertama kali diturunkan adalah surat al-'Alaq, dimulai dengan kata iqra (bacalah), kemudian Allah mengikut sertakan kata 'allama (mengajarkan). Ini menunjukkan terdapat kaitan yang sangat erat antara kegiatan membaca dengan pengajaran. Membaca dan pengajaran ini dikemas dalam proses pendidikan sehingga menjadi konsepsi akademik pendidikan Islam berdasarkan al-Qur'an. Membaca yang baik dan benar, dan bisa cepat dengan disertai pemahaman makna yang terkandung dalam bacaan tersebut secara komprehensif, manakala kegiatan membaca ini dilaksanakan dengan pengajaran yang terencana dan sistematis, yaitu adanya konsepsi akademik kurikulum pendidikan Islam yang bersumber al-Qur'an dan al-Hadits.

Al-Qur'an mendasari kegiatan pendidikan peserta didik sebagai manusia melalui metode penalaran intelektual dan pemahaman, penghayatan hati yang sarat dengan membaca, mengetahui, memahami, menghayati, meneliti, dan observasi ilmiah terhadap berbagai ilmu pengetahuan yang melingkupi peserta didik itu sendiri. Jadi, betapa pentingnya konsepsi kurikulum pendidikan Islam yang berbicara tentang profesi akademik, pengembangan intelektual.

#### ***b. Kurikulum Humanistik***

Kurikulum ini menekankan pada pengembangan potensi peserta didik secara individual. Oleh karena itu, peserta didik diberi kesempatan untuk belajar sesuai dengan minat, bakat dan

kebutuhannya sendiri. Dan dalam implementasi kurikulum ini, peserta didik dan pendidik terlibat langsung dalam menentukan rencana pembelajaran. Disamping mereka menjadi subyek pendidikan, juga sebagai obyek pendidikan. Dalam kata lain, konsepsi kurikulum humanistik proses pembelajaran berpusat pada anak (*child centered curriculum*) (Ali, 1992: 11). Konsepsi kurikulum humanistik mempunyai ciri-ciri: tujuan, metode, organisasi, dan evaluasi yang lebih mengutamakan proses daripada hasil, penilaian secara subyektif dilakukan oleh guru dan siswa itu sendiri (McNeil, 1988: 20-23).

Dalam konsep pendidikan Islam peserta didik sebagai makhluk memiliki banyak keinginan, kebutuhan, kepentingan dan permasalahan yang sangat kompleks. Walaupun peserta didik dengan akalnyapun dapat didik, akan tetapi kegiatan mendidik pada mereka ini tidak semudah yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Dalam kata lain, peserta didik berinteraksi dengan manusia lain, walaupun sudah saling kenal dan sudah jelas posisinya, yang satu sebagai pendidik dan lainnya terdidik, namun dalam realitasnya proses pendidikan tetap masih terdapat hambatan yang cukup signifikan. Hal ini berbeda, jika dibandingkan peserta didik berinteraksi dengan selain sesamanya, seperti; binatang atau makhluk lainnya, tentunya manusia akan mudah menguasai dan mengendalikannya. Oleh karena itu, konsepsi kurikulum humanistik dalam pendidikan Islam ini pendidik harus memberi kebebasan individu peserta didiknya untuk mengembangkan potensinya masing-masing yang tentunya tidak lepas dari bimbingannya yang didasarkan al-Quran dan al-Sunnah.

### *c. Kurikulum Teknologi*

Konsepsi kurikulum teknologi ini memandang bahwa kurikulum merupakan suatu sistem. Sebagai sistem tentunya mempunyai sejumlah komponen yang saling tergantung dan keterkaitan sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya, rancang bangun dalam konsepsi kurikulum ini adalah dimulai dari perumusan tujuan yang akan dicapai, kemudian disediakan alat/media untuk mengukur keberhasilan, kemudian dilanjutkan pemenuhan bahan pelajaran, setelah itu penggunaan metode yang dianggap tepat dalam mencapai tujuan.

Konsepsi kurikulum ini lebih menekankan pada perancangan

sistem belajar-mengajar berdasarkan pendekatan sistem. Penerapannya dalam praktek pendidikan tercermin dari penerapan sistem pengajaran individual. Di dalam pengajaran individual, setiap peserta didik dapat memilih bahan pelajarannya sendiri dan yang dapat dipelajari sendiri. Dengan demikian, setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan potensinya masing-masing, sehingga peserta didik yang berpotensi tinggi dapat belajar dan menguasai pelajaran lebih cepat dari peserta didik yang berpotensi lebih rendah (Ali, 1992: 13).

#### *d. Kurikulum Rekonstruksi Sosial*

Konsepsi kurikulum ini beraksentiasi pada pentingnya kurikulum sebagai alat untuk melakukan rekonstruksi atau penyusunan kembali corak kehidupan dan kebudayaan masyarakat. Penyusunan atau tatanan ini meliputi aspek kehidupan; sosial, politik, ekonomi, mental, spiritual. Konsep ini peserta didik diajak untuk mengenali berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat sesuai dengan tingkat berpikirnya, kemudian berusaha mencari alternatif pemecahannya. Adapun ciri-ciri konsepsi kurikulum ini adalah: 1). Untuk kepentingan penyusunan kurikulum perlu dilakukan analisis kebutuhan. 2). Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang dapat dikenali dilakukan penentuan prioritas. 3). Proses pendidikan di sekolah menekankan pada kegiatan pemecahan masalah. 4). Masyarakat dijadikan sebagai sumber belajar (Ali, 1992: 12).

Dari empat macam konsepsi kurikulum secara umum tersebut ketika dikaitkan dengan pengembangan kurikulum pendidikan Islam dalam prinsipnya yaitu 1) menyeluruh/kaffah, 2) keseimbangan, 3) kesesuaian, 5) dinamis, 6) keterbukaan, 7) pemeliharaan, 8) toleransi.

Dari delapan prinsip tersebut, Arifin menyatakan bahwa prinsip yang harus diperhatikan saat menyusun kurikulum pendidikan Islam adalah sebagai berikut: 1) Kurikulum pendidikan yang sejalan dengan identitas Islami adalah kurikulum yang mengandung materi (bahan) ilmu pengetahuan yang mampu berfungsi sebagai alat untuk tujuan hidup Islami. 2) Untuk berfungsi sebagai alat yang efektif mencapai tujuan tersebut, kurikulum harus mengandung tata nilai Islami yang intrinsik dan ekstrinsik mampu merealisasikan tujuan

pendidikan Islam. 3) Kurikulum yang bercirikan Islam itu diproses melalui metode yang sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam tujuan pendidikan Islam. 4) Antara kurikulum, metode dan tujuan pendidikan Islam harus saling berkaitan produk yang bercita-cita menurut ajaran Islam (Ihsan dan Ihsan 2007: 135-136).

### **C. Simpulan**

Berdasarkan analisis di poin sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kurikulum pendidikan Islam harus dikembangkan untuk mencapai keberhasilan peserta didik tidak dalam ranah kognitif semata, karena hal ini akan melahirkan demoralisasi peserta didik, yakni kurangnya peserta didik dalam kompetensi kepribadian dan minimnya keterampilan yang membawa peserta didik selalu dalam ketergantungan hidupnya. Kognitif yang berarti kemampuan rasional, afektif kemampuan dalam merealisasi tingkah laku yang positif dan berperasaan, dan psikomotorik sebagai refleksi dan keterampilan fisik harus diseimbangkan sedemikian rupa, sehingga cipta, rasa, dan karsa benar-benar dapat dimiliki peserta didik pada khususnya dan masyarakat umumnya.
2. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum pada umumnya adalah: tujuan yang hendak dicapai, tuntutan masyarakat global, isi atau materi yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi psikologis peserta didik. Disamping itu, faktor yang terpenting lagi mempengaruhi perkembangan kurikulum kaitannya dengan Pendidikan Islam adalah faktor sumber hukum Islam berupa al-Qur'an dan al-Hadits.
3. Untuk mengembangkan konsepsi kurikulum Pendidikan Islam dalam rangka mencapai tujuan yang optimal perlu adanya pemahaman pada masing-masing konsepsi kurikulum yang sudah dirumuskan oleh para ahli pendidikan. Konsepsi kurikulum yang dimaksud adalah: kurikulum akademik, humanistik, teknologi, dan rekonstruksi sosial. Untuk konsepsi kurikulum pendidikan Islam dengan ciri-ciri: sistem pengajaran selaras dengan fitrah manusia, lebih

mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, lebih mengutamakan amaliah (praktek) daripada nadhariah (teori). Dan dalam mengembangkan konsepsi kurikulum pendidikan Islam tersebut mengikuti prinsip proses pembelajaran; prinsip saling terkaitm menyeluruh / Kaffah, keseimbangan, kesesuaian, dinamis, keterbukaan, pemeliharaan, dan toleransi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. 1992. *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, Bandung: Sinar Baru.
- an-Nahlawi, Abdurrahman. 1996. *Ushûlu Tarbiyah al-Islâmiyah wa Asâlibiha; fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtam'a*. Damsyiq: Darul Fikr.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Ushûlu Tarbiyah al-Islâmiyah wa Asâlibiha; fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtam'a*. Terjemahan oleh Shihabuddin. *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Madrasah*, Jakarta: Gema Insani Press
- Engkoswara. 1984. *Dasar-Dasar Metodologi Pengajaran*, Jakarta: Bina Aksara.
- Faesal, Jusuf Amir. 1995. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Harsono, Eko Budi. 2004. *Undang-undang tentang Pendidikan Agama Islam*. Tersedia di <http://www.suarapembaruan.com/news/2004/01/10/kesra/ke02.htm>. Diakses pada Tanggal 5 Juni 2015.
- Ihsan, Hamdani dan A. Fuad Ihsan. 2007. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- McNeil, John. D. 1981. *Curriculum: A Comprehensive Introduction, (Terj) Subandijah (1988), Kurikulum Sebuah Pengantar Komprehensif*. Jakarta: Wira Sari.
- Nasution. 1995. *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudjana, Nana. 1996. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Tafsir, Ahmad. 1997. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

# **SPIRITUALISASI KURIKULUM DI INDONESIA**

## **(Telaah Filsafat Kurikulum dalam Konteks Keindonesiaan)**

**Farikhah**

HIPKIN (Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia)  
Jawa Tengah, Indonesia.  
farikhahrika@ymail.com

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk menelaah tentang perkembangan pemahaman kurikulum saat ini sesuai dengan spiritual kebangkitan di abad ke-21 dan bagaimana upaya dalam melaksanakan spiritualisasi kurikulum yang dilakukan dalam konteks KTSP, setelah penundaan kurikulum-2013. Tulisan ini menggunakan pendekatan filsafat kurikulum dalam konteks Indonesia dengan memeriksa kasus adopsi strategi rohani dengan teori kecerdasan majemuk sebagai dasar untuk pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajar yang dikembangkan melalui pendidikan dengan strategi rohani yang terintegrasi dengan dasar kecerdasan majemuk dalam banyak kasus mampu menciptakan nilai budaya produk yang bermanfaat bagi orang-orang pada umumnya. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan dengan benar-benar memperhatikan aspek kecerdasan dan potensi spiritual yang kemudian direkonstruksi ke kurikulum yang khusus dalam bentuk sehari penuh.

**Kata kunci: spiritualisasi kurikulum, materialisme, kecerdasan, Pendidikan Islam**

### ***Abstract***

*THE SPIRITUALIZATION OF CURRICULUM IN INDONESIA  
(STUDY OF THE CURRICULUM PHILOSOPHY IN THE*

*CONTEXT OF INDONESIA). This paper discusses the development of the understanding of the current curriculum in line with this spiritual awakening in the 21st century and how the efforts to spiritualize the curriculum can be done in the context of the KTSP, after a delay of Curriculum-2013. This paper uses the philosophy of curriculum approach in the context of Indonesian by examining the case of the adoption of the spiritual strategy with the theory multiple intelligences as a basis for the development of Islamic education curriculum. The result of the research show that learners that are developed through education with spiritual strategy integrated with basis of multiple intelligences in many cases able to create cultural value products that are beneficial for the people in general. Therefore curriculum must be developed by really pay attention to aspects of intelligence and spiritual potential which is then reconstructed into a specialized curriculum in the form of X-day.*

**Keywords:** *curriculum spiritualization, materialism, intelligences, Islamic education*

## **A. Pendahuluan**

Baru-baru ini dunia pendidikan terutama para guru dan praktisi pendidikan di Indonesia sedang dibingungkan dengan kebijakan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah (KPDM) yang baru dengan terbitnya surat edaran Nomor: 179342/MPK/KR/2014, terkait penundaan Kurikulum 2013 (K-13). Diantara beberapa alasannya antara lain karena adanya berbagai masalah konseptual yang dihadapi antara lain mulai dari soal ketidakselarasan antara ide dengan desain kurikulum hingga soal ketidakselarasan gagasan dengan isi buku teks. Sedangkan masalah teknis penerapan terutamanya berbeda-bedanya kesiapan sekolah dan guru, belum meratanya dan tuntasnya pelatihan guru dan kepala sekolah, serta penyediaan buku pun belum tertangani dengan baik.

Dengan alasannya tersebut maka akhirnya untuk sementara K-13 sudah diterapkan di 6.221 sekolah sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 dan rencana akan diterapkan di semua sekolah di seluruh tanah air pada Tahun Pelajaran 2014/2015 terpaksa mengalami penundaan dan kembali menggunakan kurikulum 2006 yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sementara pada saat yang sama pendidikan kita juga terkesan membawa peserta didik seakan hanya dipersiapkan menjadi –meminjam istilah Mochtar

Bukhori- sebagai “tukang-tukang” yang siap sebagai tenaga kerja yang menghasilkan keuntungan material (*profit oriented*). Kondisi ini klop dengan situasi bangsa yang oleh Gus Mus disebut sebagai “negeri daging”. Dalam sajak Gus Mus bertajuk “Negeri Daging” dinyatakan: “di negeri daging; setiap hari banyak orang asyik memperagakan daging; setiap hari banyak orang; hilir-mudik menjajakan daging di negeri daging; setiap hari banyak orang mati; memperebutkan daging; di negeri daging jagal-jagal berkeliaran; daging-daging berserakan” (A. Mustofa Bisri, 2002).

Ketika pendidikan cenderung materialistik, segalanya diukur dari untung-rugi secara ekonomik belaka, maka hal ini sama artinya dengan mengkondisikan peserta didik menjadi hedonistik-materialistik, terasingkan dari nilai-nilai moral-spiritual. Karena kurikulum apapun namanya baik itu KTSP atau K-13 selama dimensi spiritualitas diabaikan baik dalam desain maupun implementasinya, maka pendidikan masih akan mengalami keterseokan. Yang lebih memperhatikan lagi, meskipun KTSP yang secara paradigmatis memberi keleluasaan kepada setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan desain kurikulumnya secara khas dan unik bahkan juga peluang untuk memberikan muatan lokal (mulok) terobosan yang selaras dengan kondisi geografis, sosial-budayanya, seringkali masih mengalami problematik dalam mengkonstruksi kurikulum secara kontekstual dan humanis.

Padahal kurikulum digagas tak lepas dari kebutuhan peserta didik dan stake holder dimana sekolah itu berada, baik secara sosial, kultural, maupun spiritual. Konteks sosio kultural barangkalai sudah terlalu sering menjadi diskursus kajian kurikulum bahkan salah satu landasan terpenting dalam pengembangan kurikulum adalah landasan sosial budaya, disamping landasan filsafat, psikologi, dan perkembangan IPTEK. Namun landasan spiritual seringkali tidak mendapatkan ruang dalam konteks pengembangan kurikulum, pada hakekatnya manusia adalah makhluk spiritual karena potensi fitrah yang diberikan Allah Swt sejak lahir (QS. Ar-Rum: 30).

Kajian berupaya mengkaji ulang tentang perkembangan pemahaman kurikulum terkini di tengah kebangkitan spiritual di abad ke-21 serta bagaimana upaya spiritualisasi kurikulum bisa dilakukan dalam konteks KTSP, setelah penundaan K-13.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kurikulum sebagai Teks Spiritual**

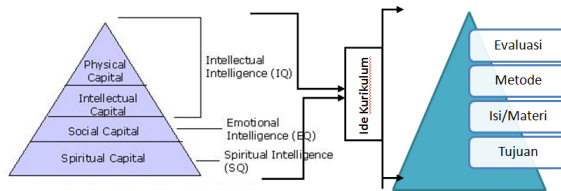
Dalam perkembangan pemikiran tentang kurikulum kontemporer sebagaimana dalam buku *Understanding Curriculum* (William F. Pinar, 2004: 606) salah satu kesadaran global tentang kurikulum antara lain dipahamai sebagai teks teologi (*as theological text*). Pemahaman kurikulum sebagai teks teologi bukan sekedar menghubungkan kurikulum dengan gereja atau kurikulum dengan materi ritual keadamaan tertentu. Lebih jauh dari itu kurikulum perlu dipahami sebagai kajian tentang moralitas, etika, sistem nilai, hermenetik, kosmologi dan keyakinan keagamaan. Hal ini berarti juga bahwa kurikulum perlu dipahami sebagai teks spiritual dalam lintas iman dan lintas budaya.

Karena itu konteks kurikulum sebagai teks teologis bukan sekedar perdebatan doa di awal belajar itu sebagai penting atau tidak, atau bagaimana rumusan doa itu harus diseragamkan sebagaimana baru-baru ini menjadi polemik akibat lontaran menteri KKPDM, Anis Baswedan. Tetapi bagaimana menjadikan dimensi spiritual dan teologi sebagai salah satu landasan dalam menformulasikan ide kurikulum, konstruksi kurikulum hingga implementasi dan evaluasinya. Dalam hal ini kurikulum perlu dari sudut pandang moral, etika dan estetika (William F. Pinar, 2004: 629).

Konsekuensinya dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pembelajaran mulai dari penyusunan desian kurikulum, implementasi dan evaluasi juga perlu menjadikan modal spiritual sebagai landasan pijakan. Bukan sekedar berorientasi pada pemenuhan pasar kerja tetapi bagaimana membawa atau mengkondisikan peserta didik mampu hidup dan beradaptasi mengatasi berbagai persoalan kemanusiaan yang dihadapinya. Menurut Danah, dunia kepemimpinan termasuk dalam kepemimpinan pendidikan seharusnya memadukan tiga modal yang dimiliki. Pertama adalah modal material. Ia dibentuk oleh kecerdasan rasional (IQ), berfungsi menjawab pertanyaan-pertanyaan rasional seperti, “apa yang saya pikir”. Kedua, modal sosial, diukur dengan tingkat kepercayaan di masyarakat, saling merasakan, empati, serta komitmen terhadap masyarakat. Hal ini dibentuk oleh kecerdasan emosional (EQ), berfungsi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang

menyangkut perasaan, seperti, “apa yang saya rasakan”. Ketiga adalah modal spiritual, dalamnya termasuk modal moral yang dibentuk oleh kecerdasan spiritual (SQ). Hal ini dibangun dengan mengeksplorasi secara spiritual pertanyaan-pertanyaan seperti; “untuk apa saya ada, apa tujuan hidup saya, apa yang sebenarnya ingin saya capai” (Zohar, 2010: 1-8).

Dengan pengertian ini, maka SQ akan selalu menemukan makna dibalik segala apa yang dilakukan oleh seseorang sehingga segala tindakan dan kebijakan kepemimpinan kurikulum benar-benar bermakna dan memberi manfaat bagi orang-orang dan lingkungannya. Kalau digambarkan dalam bentuk bagan relasi ketiga kecerdasan dalam proses rekonstruksi kurikulum berbasis spiritual dapat penulis ilustrasikan sebagai berikut:



**Gambar 1: Bagan relasi IQ, EQ dan SQ dalam Konstruksi Kurikulum sebagai Teks Spiritual (Dikembangkan dari gagasan Zohar dan Ian Marshall)**

Namun sayang seringkali terjadi kesalahpahaman dalam sebagian kalangan pendidik yang memahami kurikulum sekedar dokumen, bahkan sebagian menganggap kurikulum sekedar sebagai mata pelajaran. Hal ini berakibat pada proses pembelajaran (*instructional*) seakan hanya menyampaikan materi pelajaran (*transfer of knowledge*) saja, kering dari nilai. Maka ketika tema-tema inti bahasan sudah disampaikan, proses pembelajaran sudah dianggap selesai, lalu tinggal membuat soal-soal untuk ujian. Pembelajaran lalu sekedar menjalankan “ritual akademik” yang kering makna karena spirit *meaning full learning* tak ada lagi.

Padaahal pemahaman kurikulum setidaknya dapat dilihat dalam tiga sisi; pertama kurikulum sebagai konstruksi gagasan/ide yang kemudian terformulasikan dalam wujud dokumentasi baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang merencanakan kualitas

pembelajaran atau dalam bahasa Oliva *curriculum itself is a construct or concept, a verbalization of an extremely complex idea or set of ideas* (Peter F. Oliva, 1997: 12). Karena itu setiap penyelenggaraan proses pembelajaran tak lepas dari adanya konsep/ide tertentu dalam menggapai tujuan pembelajaran. Dengan memahami kurikulum sebagai teks spiritual dan hal ini dijadikan sebagai ide dasar dalam merekonstruksi gagasan baru tentang kurikulum di berbagai jenjang dan jalur, maka penyusunan kurikulum dalam pengertian kedua yaitu kurikulum sebagai dokumen. Pemahaman kurikulum pada tingkat ini biasa disebut dengan kurikulum potensial, artinya ketika gagasan kurikulum dibangun dengan basis landasan spiritual, maka dokumen kurikulum yang meliputi aspek tujuan, isi, metode dan evaluasi akan turut mewarnai dalam formula komponen kurikulum sebagai dokumen tadi. (Sudjana, 1991: 7).

Ketiga, kurikulum juga dapat dilihat dalam sisi sebagai implementasi. implementasi kurikulum merupakan proses interaksi antara fasilitator sebagai penegembangan kurikulum, dan peserta didik sebagai subjek belajar. (Mulyasa, 2009: 179). Karena itu dalam sisi kurikulum sebagai implementasi proses pembelajaran dalam hal ini dapat disebut sebagai kurikulum nyata (*real curriculum*). Dalam konteks ini pemahaman mengenai pengertian implementasi ternyata mengalami pergeseran/perkembangan yang lebih progresif.

Kemudian implementasi kurikulum dapat juga diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis (*written curriculum*) kedalam bentuk pembelajaran. Implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan dan penerapan. Ada beberapa pendapat yang dikutip dari Binti Maunah diantaranya pendapat Majone dan Wildavky (1979) yang menegemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (dalam pressma. dan Wildavzky, 1984). Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan ide dan konsep. Adapun kurikulum dapat diartikan dokumen kurikulum (kurikulum potensial) (Hidayati, 2012: 98).

Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai pengikat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan oleh setiap sekolah dan satuan pendidikan di berbagai wilayah dan daerah. Implementasi kurikulum merupakan proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga

memberikan perunahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap, sedangkan implementasi kurikulum adalah suatu proses penerapan kurikulum dalam komponen satuan mata pelajaran sebagai aktualisasi kurikulum tertulis kedalam bentuk pembelajaran (Mulyasa, 2009: 2). Karena itu, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam konteks implementasi kurikulum terkait dengan komponen-komponen pembelajaran antara lain rumusan tujuan, isi, metode, media dan evaluasi.

Implementasi Kurikulum dipengaruhi oleh tiga faktor berikut.

1. Karakteristik kurikulum; yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya bagi pengguna di lapangan.
2. Strategi implementasi: yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi, seperti diskusi profesi, seminar, penataran, loka karya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan.
3. Karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran. (Mulyasa, 2009: 179-180)

## 2. Dari Kurikulum 2013 kembali KTSP

Sebagai sebuah bangsa yang hidup sebagai bagian dari dunia global yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus terbuka dalam merespon perubahan itu. Demikian juga dalam dunia pendidikan. Sebagai konsekuensinya kurikulum juga harus berubah ketika kondisi sosial dan perkembangan dunia ilmu pengetahuan juga berubah. Tak perlu alergi dengan perubahan kurikulum.

Hal ini juga telah lama ditegaskan oleh pakar kurikulum Peter F. Oliva (1992: 39-41) menegaskan *curriculum is a product of its time curriculum responds to and is changed by social forced, philosophical positions, psychological principles, accumulating knowledge, and educational leadership at its moment in history*. Dengan kata lain suatu proses pembelajaran harus digali dari akar budaya dan latar sejarah yang melatarbelakanginya dan seimbang antara kebutuhan

lokal, nasional dan global. Karena itu, ketika pemerintahan SBY telah mengamanatkan berlakukannya K-13 dan ternyata dalam pemerintahan Jokowi K-13 dinilai belum siap yang kemudian atas kebijakan kementerian KPDM terpaksa kembali kepada KTSP alias Kurikulum 2006, hal ini tak perlu risau. Sesungguhnya KTSP memberi peluang untuk dikembangkan menjadi sebuah kurikulum unggulan di sekolahnya masing-masing asal kepemimpinan kurikulum benar-benar dilakukan dengan kreatif, inovatif dan progresif disusun secara mandiri oleh setiap satuan pendidikan bersama stake holder terkait dan menjadikan modal spiritual sebagai salah satu landasannya.

Keberadaan KTSP yang diberlakukan sejak tahun 2006 yang kemudian sempat diganti dengan K-13 sejak tahun 2013, yang kemudian sejak 5 Desember 2014 kembali lagi pada KTSP. KTSB sebenarnya secara potensial bisa dikembangkan dengan semangat penyusunan kurikulum berbasis dari bawah, meskipun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) memberikan rambu-rambu berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI). Maka dari ide kurikulum dan rekonstruksi kurikulum potensial menjadi kurikulum aktual setiap satuan pendidikan memiliki peluang mengembangkannya dalam proses inovasi implementasi.

Dalam proses implementasi kurikulum perlu memperhatikan filosofi pendidikan yang tak lepas dari dua proses yang saling terkait: (1) proses hominisasi, yaitu memposisikan manusia sebagai makhluk hidup di dalam dunia atau ekologi. Karena itu pendidikan disamping harus mengkondisikan peserta didik sadar akan jati dirinya yang hidup dalam suatu bangsa dengan suatu ikatan budaya dan filsafat hidup yang menjadi ideologi bersama dan sekaligus sebagai sub-kultur dengan segala keunikan nilai dan budaya lokal yang disinggahnya. (2) proses humanisasi, yaitu memposisikan manusia sebagai makhluk yang bermoral. Sebagai makhluk bermoral manusia tak sekedar hidup, tetapi hidup untuk mewujudkan eksistensi sebagai manusia yang berbudaya berikut kesadaran religiusitas yang dimilikinya. Kesadaran kultural dan spiritual juga turut mengkonstruksi identitas sehingga membentuk habitus segala kekayaan modal sosial, budaya dan modal simbolik yang perlu dimaknai dan berdayakan sehingga menjadi tindakan bermakna (Bourdieu, 1986: 422). Karena, itu dalam pengembangan kurikulum dari ide, rekonstruksi dokumen

hingga implementasinya perlu juga memperhatikan keunikan lokasi dan suasana sosial budaya dimana pendidikan dan pembelajaran itu diselenggarakan. Karena itu agar pendidikan tetap mempertahankan ideologi bangsa untuk mencapai tujuan nasional dan juga tidak tercerabut dari tradisi dan potensi lokal yang ada, maka perlu melandasi semangat implementasi kurikulum yang berbasis pada potensi lokal atau populer disebut *place-based curriculum development* (PBCD) atau dalam istilah Laurie Brady (1983) disebut sebagai *School-Based Curriculum Development* (SBCD). SBCD merupakan pengembangan kurikulum yang berbasis pada teori pendidikan berbasis lokasi (*place-based education*) yaitu konsep pendidikan dengan pendekatan holistik yang lebih mengedepankan pengembangan masyarakat dan konservasi lingkungan agar berkelanjutan secara progresif. Dalam prosesnya berusaha mengintegrasikan proses pembelajaran dengan konteks lingkungan (sosial, budaya, ekonomi, geografi) peserta didik dari semua usia.

Mengingat KTSP juga mengamanatkan adanya komponen mata pelajaran muatan lokal (mulok) yang dalam panduan penyusunan KTSP diartikan sebagai kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada, atau materinya terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri. Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan (Panduan KTSP, BSNP 2006).

Hal ini berarti bahwa setiap satuan pendidikan diberikan kesempatan mendesain mulok sesuai kebutuhan daerahnya. Namun karena belum siapnya SDM di daerah, kebijakan KTSP dengan muatan lokalnya ini seringkali justru menjadi persoalan tersendiri, sehingga muatan lokal yang ada, sekedar ada untuk memenuhi kewajiban UU atau Permen, tidak melalui penggalan dan penelusuran yang serius dari kekayaan khazanah budaya atau potensi lokal di daerah yang bersangkutan. Sehingga sekedar bahasa Jawa sebagai mulok hanya karena sekolahnya di Jawa, mulok Bahasa Sunda karena sekolahnya di wilayah Bandung dan sekitarnya. Memang tak ada yang salah dengan dengan mulok Bahasa Lokal tersebut, bahkan bahasa

lokal tetap harus diajarkan sebagai sebuah kesadaran budaya untuk meningkatkan kecerdasan budaya peserta didik dimana sekolah itu berada. Namun mulok bisa juga digagas dengan sebuah terobosan dengan memadukan perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Misalnya saja ketika muncul perkembangan teori kecerdasan majmuk (*multiple intelligence*) seperti dikembangkan oleh Gardner pada tahun 1983, maka hal ini bisa dijadikan sebagai inspirasi basis ilmiah dalam mengembangkan mulok terobosan.

### 3. Spiritualisasi Kurikulum Mulok melalui X-day

Kecerdasan jamak yaitu pandangan baru tentang kecerdasan yang dikemukakan Gardner (seperti yang dituliskan Thomas Amstrong “Menerapkan Multiple Intelligences di Sekolah” Kaifa 2004 hal 2), meliputi kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis-logis, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetis-jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan natural.

Maka ketika mulok terobosan didesain dengan melandaskan perkembangan teori MI dipadu dengan kesadaran spiritual bahwa Allah Swt menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk (QS. At-Tin [95] : 4) dengan segala potensi fitrah yang bersifat spiritual (QS. Ar-Rum [30]: 30), KTSP bisa memberikan mulok terobosan dengan sehari penuh secara khusus (baca: X-day) untuk mengantarkan peserta didik menjadi para juara di bidangnya masing-masing.

Dengan perspektif MI, setiap peserta didik memiliki salah satu kecerdasan yang menonjol entah pada ranah Linguistik (kecerdasan bahasa), *Logic Smart* (kecerdasan logika matematika), *Body Smart* (kecerdasan fisik), *Picture Smart* (kecerdasan visual spasial), *Self Smart* (kecerdasan intrapersonal), *people Smart* (kecerdasan interpersonal), *Music smart* (kecerdasan musikal), atau *Nature Smart* (kecerdasan natural). Maka dalam penerimaan peserta didik tak perlu lagi dengan seleksi karena setiap anak asumsinya adalah cerdas. Tugas orang tua dan guru selanjutnya adalah memetakan potensi unggul kecerdasan peserta didik. Hal ini bisa dilakukan dengan metode *Multiple Intelligences Research* (MIR) atau dengan analisis sidik (*finger print analysis*) sebagaimana akhir-akhir ini lagi marak dikembangkan.

MIR dilakukan dengan pengamatan dan pendampingan intensif terhadap peserta didik dengan memperhatikan gejala kegemaran sehari-hari baik dari segi perilaku gaya belajar maupun gerak-gerik baik dalam tindakan, ucapan maupun penampilan. Guru dan orang tua yang sensitif tentu akan tak terlalu sulit untuk menangkap tanda-tanda dibalik kehidupan peserta didik baik di kelas maupun di luar kelas. Sementara metode finger print analysis adalah sebuah metode untuk membantu mengenali potensi seseorang (anak, remaja, dewasa) melalui pengamatan terhadap 10 sidik jari tangan. Metode pengerjaannya mudah dan sederhana, hanya dengan scanning kesepuluh sidik jari kemudian data tersebut diolah dengan sistem komputer yang sudah dipersiapkan secara khusus. Maka kurikulum perlu didesain dalam bentuk transaksional antara kebutuhan peserta didik dengan kurikulum itu sendiri. Bahkan dalam konteks mendesain mulok terobosan perlu merumuskan X-day sebagai hari istimewa dalam mengembangkan potensi kecerdasan peserta didik secara lebih intensif disamping mata pelajaran pendukung pada hari-hari lainnya sebagai satu kesatuan dalam KTSP. X-day dalam hal ini perlu ditonjolkan karena seringkali dalam implementasi kurikulum para guru dalam banyak kasus dikejar oleh target capaian materi dalam setiap semester, sehingga mengabaikan kecerdasan potensial dalam MI yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Implementasi kurikulum X-day ini akan menjadi hari-hari yang ditunggu-tunggu oleh peserta didik, karena X-day dipersiapkan secara khusus untuk mengembangkan potensi unggulan sesuai ranah kecerdasan yang ditonjolkan. .

Kurikulum X-day ini disusun bersama oleh peserta didik sementara guru sebagai fasilitator. Konstruksi ide kurikulum X-day ini merupakan endapan dari hasil analisis MIR dan Finger Print Analysis yang kemudian didialogkan dengan peserta didik secara transaksional dengan memperhatikan lingkungan kelas, sekolah dan juga masyarakat sekitar. Kalau digambarkan dalam bentuk bagan posisi kurikulum X-day ini dapat penulis ilustrasikan sebagai berikut:

Dengan pola pengembangan kurikulum seperti di atas, maka kurikulum peserta didik (kata lain dalam kurikulum X-day) akan mendapatkan proporsinya yang jelas, terencana dan spesial. Kendatipun demikian di tengah semaraknya tren teori MI yang telah merevolusi pembelajaran dunia pendidikan di berbagai belahan

dunia, sejumlah sekolah Islam yaitu sekolah yang dikelola oleh yayasan yang mengembangkan dan mentransformasikan nilai-nilai Islam melalui pendidikan; telah menjadikan MI sebagai salah satu dasar inovasi dalam pengembangan kurikulumnya. Sekolah-sekolah tersebut biasanya lebih menjadikan dirinya sebagai agen transformasi sosial dalam turut membangun karakter dan prestasi peserta didik.

Sekolah Islam pertama di Indonesia yang secara sistemik mengembangkan kurikulum pendidikan karakter berbasis MI adalah SMA Plus Muthahhari Bandung (SMATH) yang dipelopori oleh Jalaluddin Rahmad (Kang Jalal) sejak tahun 1992. SMATH merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk dari perubahan pesantren mahasiswa. Sebagaimana sistem pesantren di Indonesia yang kedudukannya khas, karena disamping menjadi alternatif pembangunan yang berpusat pada masyarakat itu sendiri (*people-entered development*) juga sekaligus sebagai pusat pengembangan pembangunan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented development*) (Azra, 1997: xx1), maka SMATH juga dikembangkan dengan didasarkan pada ilmu-ilmu modern namun bersamanya dikenalkan ilmu-ilmu Islam tradisional.

Dengan prinsip seperti itulah maka SMATH mencoba mengembangkan kurikulumnya dengan berbasis MI. Yang menarik, meskipun dalam usianya yang relatif muda pada tahun 2002, SMATH mendapat penghargaan Kementrian Pendidikan Republik Indonesia dijadikan salah satu sekolah uji coba pelaksanaan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dari 40 SMA se-Indonesia dan salah satu sekolah uji coba pelaksanaan PBK (pendidikan Berwawasan Khusus: Kepribadian dan Budi Pekerti) dari delapan sekolah yang ditunjuk Depdiknas Pusat. Tahun 2005 ditunjuk sebagai Sekolah berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan tahun ini dijadikan sebagai salah satu model (*best practice*) pendidikan karakter Indonesia sejak tahun 2010.

Pengembangan kurikulum Sekolah Islam berbasis MI semakin inovatif dan semarak setelah terbitnya buku terjemahan Thomas Armstrong dengan judul yang cukup provokatif Sekolah Para Juara (*Multiple Intellegences in the Classroom*) tahun 2002, yang disusul dengan terjemahan buku karya Thomas R. Hoer Buku Kerja Multiple

Intellegences, Pengalaman New City School, tahun 2007. Semarang MI semakin menggemakan dalam dunia pendidikan di Indonesia setelah seorang pakar MI Indonesia, lulusan pertama studi *Distance Learning* di Supercamp Oceanside California, USA pimpinan Bobbi DePorter, Munif Chatib menelorkan sebuah buku dengan judul yang bombastis; Sekolahnya Manusia; Sekolah Berbasis MI di Indonesia.

Buku tersebut tersebut merupakan rekaman pengalamannya yang dalam mentransformasi sebuah sekolah di Gresik, Jawa Timur, yang semula sudah hampir bobrok, karena image negarif sekolah tersebut lantaran tak bermutu. namun dengan sentuhan Chatib melalui basis teori MI akhirnya sekolah tersebut dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, menjadi sekolah favorit dengan segudang prestasi di berbagai bidang dengan bangunan karakter peserta didik yang bisa diandalkan (Chatib, 2009: 4). Chatib dalam hal ini telah berhasil melakukan terobosan inovasi kurikulum berbasis MI yang sesuai dengan prinsip inovasi Rogers seperti kompatibel, kemudahan, triabilitas, dan observabilitas sehingga dengan mudah bisa diaplikasikan dan ada dampak positif yang cukup revolusioner.

Yang menarik setelah terbitnya buku tersebut Chatib hampir setiap minggu diundang diberbagai forum guru yang berminat mengadopsi pengalamannya melalui forum bedah buku, seminar dan pelatihan di berbagai penjuru nusantara hingga sekarang. Dari beberapa pengalaman pengembangan kurikulum berbasis MI tersebut memiliki beberapa indikator sebagai berikut (Chatib, 2009: 19):

**a. Character Building**

Prinsip ini berangkat dari kesadaran ontologis bahwa manusia hakikatnya terdiri atas dua dimensi. Dimensi jasmani dan rohani. Dua dimensi itu selayaknya harus tersentuh proses pembelajaran dalam hidup manusia. Apabila porsi pendidikan terhadap dua dimensi tersebut tidak seimbang, terutama minim pada dimensi rohani, akan terjadi "bencana akhlak" (krisis karakter bangsa). Maka dampaknya tidak ada lagi kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, saling menghargai, dan lain-lain.

**b. Agent of Change**

Memposisikan sekolah sebagai agen perubahan. Sebagai konsekwensinya tidak perlu lagi ada lagi sekolah unggul dan sekolah

“jeblok”. Sekolah tidak boleh diskriminasi hanya menerima anak-anak yang pintar dalam pengertian diukur dari nilai Ujian Nasional (UN) atau ujian masuk. Dalam perspektif tidak penting mengedepankan the best input. Karena itu sistem penerimaan peserta didik baru di sekolah tidak didasarkan pada tes masuk, namun tergantung pada jumlah kursi yang tersedia. Karena itu setiap anak dianggap pintar (juara) di bidangnya masing-masing yang diidentifikasi melalui Multiple Intellegences Reseach (MIR).

*c. The Best Process*

Konsekuensi agent of change adalah proses pembelajaran yang terjadi di sekolah itu harus terbaik. Pembelajaran yang masuk memori jangka panjang peserta didiknya dan tidak akan lupa seumur hidup melalui pembelajaran yang bermakna (*meaningfull learning*). Proses pembelajaran harus mengandung kekuatan emosi positif. Mulai proses awal pembelajaran sampai akhir benar-benar menyentuh perasaan peserta didik.

*d. The Best Teacher*

Konsekuensi the best process menuntut the best teacher, yakni guru yang benar-benar guru yang memiliki kompetensi pedagogis, profesional, individual dan sosial. Posisi guru juga tidak lagi sebagai satu-satunya sumber belajar, karena guru yang baik berperan sebagai fasilitator. Dengan posisi ini persentase proses peserta didik belajar harus lebih besar daripada persentase proses guru mengajar. Guru yang baik juga berperan sebagai katalisator, yaitu terus berusaha memantik kemampuan peserta didik, termasuk bakatnya. Terutama kepada para peserta didik yang “lamban” dalam menerima dan memahami informasi. Bukan malah memihak kepada peserta didik yang “pandai” saja. Guru yang baik selalu berusaha menyesuaikan gaya mengajarnya dengan gaya belajar peserta didiknya. Apabila proses teaching sytle dan learning style sesuai, akan muncul kondisi sebenarnya tidak ada pelajaran yang sulit dan semua peserta didik mampu menerima informasi dari guru dengan menyenangkan.

*e. Applied Learning*

Konten pembelajaran di berbagai jenjang sekolah harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran jangan sampai dijadikan “terpisah”, tidak berhubungan dengan

kehidupan sehari-hari. Minimal, peserta didik memahami manfaat materi pembelajaran, sehingga apa yang mereka pelajari merasa dibutuhkan selanjutnya memunculkan rasa cinta dan gairah sehingga menjadi habitus kehidupan budayanya.

#### *f. Manajemen Sekolah*

Dalam manajemen sekolah berbasis MI ini setidaknya membutuhkan dua perangkat; (1) context system, yaitu penyelenggara pendidikan, dan sayap kedua adalah content system, yaitu kepala sekolah dan guru. Dalam hal ini tenaga pendidik dan kependidikan di Satuan Sekolah yang mengembangkan kurikulum berbasis MI harus berjalan secara senergis menuju satu visi yang sama. Demikian juga hubungan antara mapel satu dengan yang lainnya juga harus dibangun dalam hubungan yang dialogis sehingga nilai-nilai moral yang ingin ditonjolkan bisa menjadi karakter dalam diri peserta didik.

### **C. Simpulan**

Secara ontologis manusia adalah makhluk spiritual. Islam juga memandang manusia hakekatnya adalah sarat dengan potensi-potensi spiritual dalam Islam disebut sebagai potensi fitrah (QS. Ar-Rum [30]: 30). Maka pendidikan Islam diselenggarakan tak boleh terlepas dari akar spiritual yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir.

Dimensi fisik adalah wadah dari spiritualitas manusia agar hidup di dunia dalam ruang dan waktu yang terbatas. Namun ketika manusia telah meninggal, dimensi fisik boleh saja hancur lebur, namun dimensi spiritualitas dari manusia akan lebih langgeng (*perennis*). Karena itu dimensi jiwa dan raga perlu lebih diperhatikan secara seimbang dalam pengembangan pendidikan di kini dan masa yang akan datang.

Kesadaran ontologis manusia dalam dimensi jiwa dan raga menjadi endapan pemikiran sebagai ide kurikulum, untuk direkonstruksi menjadi dokumen kurikulum. Implementasi dan evaluasi kurikulum juga tetap menggunakan landasan pacu modal spiritual sebagai basis utama kurikulum potensial maupun aktual. Maka, peserta didik dikembangkan melalui pendidikan dengan basis spiritualitas sehingga dengan kapasitasnya, mereka mampu menciptakan produk dan menawarkan layanan yang efektif dan

Farikhah

bernilai budaya yang tentu memberi manfaat luas bagi kemaslahatan umat. Pendidikan seperti inilah yang yang disebut sebagai pendidikan bermakna pada sekolah-sekolah yang diharapkan mampu melahirkan para juara di bidangnya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, T. 2002. *Sekolah Para Juara, Menerapkan Multipel Intellegences dalam Pendidikan*. Bandung: Kaifa.
- Bardy, Laurie. 1983. *Curriculum Development in Australia*. Prentice-Hall of Australia PTY LTD.
- Bisri, A.Mustofa. 2002. *Negeri Daging*. Yogyakarta: Bentang
- Bourdieu, Pierre. 1984. *Distintion: A Social Critique of the Judgement of Taste*, Cambridge-MA: Harvard University Press.
- \_\_\_\_\_. 1986. "The Forms of Capital", terj. dari Bahasa Perancis oleh Richard Nice, dalam Richardson, J.E. (ed.), *Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education*, New York: Greenword Press, hlm. 46-58
- \_\_\_\_\_. 1990. *The Logic of Practice*, California: Sanford University.
- Chatib, M. 2009. *Sekolahnya Manusia, Sekolah Berbasis Multiple Intellegences di Indonesia*. Bandung: Kaifa.
- Danah Zohar, Ian Marshal. 2005. *Spiritual Capital: Memberdayakan SQ di Dunia Bisnis*, Bandung: Mizan Pusataka.
- Gardner, H. 1999. *Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century*. Basic Books.
- Gardner, H. 1983. *Frames of Mind: The theory of multiple intelligences*, New York: Basic Books.
- Gardner, Howard. 2004. *Kecerdasan Majemuk, Teori dalam Praktek, alih bahasa Alexander Sindoro*. Batam: Interaksara.
- Hasan, Said Hamid, MA. *Kurikulum dan Tujuan Pendidikan*. dalam [http://pk.sps.upi.edu/artikel\\_hamid.html](http://pk.sps.upi.edu/artikel_hamid.html) (on-line 22 Pebruari 2014)
- Hidayati, Wiji. 2012. *Pengembangan Kurikulum*. Yogyakarta: Pedagogia.
- Hoer, T.R. 2007. *Buku Kerja Multiple Intellegences*. Pengalaman New City. Bandung: Kaifa.
- Koesoema A, D. 2007. *Pendidikan Karakter, Strategi Mendidikan Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasiondo.

- Miller, John P and Wayne Seller. 1985. *Curriculum Perspectives and Practice*. New York & London: Longman.
- Mulyasa, 2009. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara,
- Mulyasa. 2009. *Menjadi Guru Professional*. Bandung: Remaja Rosda.
- Oliva, P.F. 1992. *Developing the Curriculum. 4th edition*. New York: Longman
- Pinar, William F. 2004. *Understanding Curriculum, An Introduction to Study of Historical and Contemporary Curriculum Development*, New York: Peter Lang.
- Sanjaya, Wina, Dr. 2008. *Kurikulum dan Pembelajaran; Teori dan Praktek Pengembangan KTSP*. Bandung. Kencana.
- Smith, Gregory A., *Place-Based Education: Learning to Be Where We Are*, <http://www.clearingmagazine.org/Smith.html> (diakses 2 Februari 2014)
- Sudjana, Nana. 1991. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*. Bandung: sinar baru.
- Tilaar, H.A.R., Prof. Dr., M.Sc., Ed. 1985. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Zohar, D. 2010. 'Exploring spiritual capital: An interview with Danah Zohar', *Spirituality in Higher Education*, Newsletter, vol. 5 (5)

# **DINAMIKA PENGEMBANGAN KURIKULUM DITINJAU DARI DIMENSI POLITISASI PENDIDIKAN DAN EKONOMI**

**Sulthon**

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia  
sulthon52@gmail.com

## **Abstrak**

Tulisan ini berupaya menelaah tentang dinamika pengembangan kurikulum ditinjau dari dimensi politisasi pendidikan dan ekonomi. Kurikulum sebagai bagian dari faktor penting dalam pendidikan memiliki posisi strategis dalam mewarnai dan menentukan kualitas output pendidikan. Hitam putihnya kualitas pendidikan sesungguhnya sangat ditentukan oleh eksistensi kurikulum tersebut. Dalam pelaksanaannya, kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menuntut keteraturan, ketertiban dan kecermatan dalam berpikir, tentang hubungan data yang satu dengan data yang lain dan konteksnya dalam masalah yang akan diungkapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perubahan kurikulum diperlukan setiap saat karena kurikulum akan selalu merespon perkembangan dalam kehidupan, baik perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan sosial dan budaya, dan perkembangan politik. Di samping itu, dalam perkembangannya kurikulum harus memperhatikan unsur peserta didik, satuan pendidikan, masyarakat, dan peranan pengembang kurikulum terutama guru. Peserta didik sebagai obyek kurikulum harus mendapat prioritas utama dalam pengembangan kurikulum.

**Kata kunci: dinamika, pengembangan, kurikulum, politisasi**

**Abstract**

*THE DYNAMICS OF CURRICULUM DEVELOPMENT IN TERMS OF POLITICIZATION DIMENSIONS OF EDUCATION AND ECONOMY. This paper attempts to examine about the changing dynamics of the curriculum in terms of the dimensions of the politicization of education and economics. Curriculum is as an important factor in education has a strategic position in coloring and determining the quality of educational output. The black-and-white of education quality is determined by the existence of the curriculum. In its implementation, this study uses qualitative research. Qualitative research requires regularity, order and precision in thinking about the relationship of the data each other and its context in the problem that will be revealed. The results of this research show that any change of the curriculum is required at any time due to the curriculum will always respond to developments in life, both development of science and technology, social and cultural development, and political developments. In addition, the curriculum should pay attention to the elements of the learners, education, society, and the role of curriculum developers especially teachers. Learners as an object of curriculum should get top priority in the development of the curriculum.*

**Keywords:** *dynamics, development, curriculum, politicization,*

**A. Pendahuluan**

Pendidikan memiliki peran penting sebagai agen perubahan sosial (*social agent of change*) menuju dinamika kemajuan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tuntutan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan selalu diarahkan untuk mencapai tujuan secara nasional. Tujuan pendidikan nasional diharapkan dapat melahirkan manusia Indonesia yang religius dan bermoral; mampu menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan; sehat jasmani dan rohani; berkepribadian dan bertanggung jawab. Pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai tugas utama: untuk menjadi alat pemersatu bangsa, memberikan pemerataan kesempatan, dan memberikan pembinaan dan pengembangan potensi diri anak.

Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disamping itu, pendidikan juga memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan

setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut hal yang perlu dikembangkan adalah menyangkut kurikulum pendidikan karena salah satu dimensi yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan dunia pendidikan nasional di masa depan adalah kebijakan mengenai kurikulum. Kurikulum merupakan jantungnya dunia pendidikan. Untuk itu, kurikulum di masa depan perlu dirancang dan disempurnakan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional dan meningkatkan mutu sumber daya manusia yang handal.

Kualitas pendidikan untuk menyiapkan sumber daya yang handal di atas sangat ditentukan oleh berbagai komponen yang saling terkait satu sama lain, yaitu input peserta didik, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dana, manajemen, dan lingkungan. Kurikulum merupakan salah satu komponen pendidikan yang sangat strategis karena merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Hamalik, 2008: 59). Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran memberikan makna bahwa di dalam kurikulum terdapat panduan interaksi antara guru dan peserta didik. Dengan demikian, kurikulum berfungsi sebagai “nafas atau inti” dari proses pendidikan di sekolah untuk memberdayakan potensi peserta didik.

Kurikulum sebagai bagian dari komponen sistem pendidikan nasional selalu mengalami dinamika perubahan sejalan dengan perkembangan ilmu dan sosial budaya masyarakat. Terkait dengan relevansi kurikulum dengan mempersiapkan siswa menghadapi dunia globalisasi, maka kurikulum harus memperhatikan aspek-aspek perkembangan IPTEK dan IMTAK terutama menyangkut penyediaan dasar keterampilan, kecerdasan, dan kreativitas serta kepribadian. Senada dengan ini kurikulum Amerika tahun 2007 telah mencanangkan tiga tujuan utama dalam kurikulum yaitu:

- 1) *Basic Skills*” incorporates skills such as reading, writing, mathematics, and speaking.
- 2) *“Thinking Skills”* includes creative thinking, the ability to problem-solve and make decisions, the capacity to reason and “see things in the mind’s eye” (which I take to mean imagination), and knowing how to learn.
- 3) *Personal Qualities*” they are seeking workers who are responsible,

*sociable able to work with others--have a sense of self-esteem, and integrity, are honest, and skilled at self-management (Oliva,1992: 233).*

Ada tiga faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu: perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai.

### **1. Perguruan Tinggi**

Perguruan tinggi setidaknya memberikan dua pengaruh terhadap kurikulum sekolah.

Pertama, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan.

Kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK, seperti IKIP, FKIP, STKIP). Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkannya.

Penguasaan keilmuan, baik ilmu pendidikan maupun ilmu bidang studi serta kemampuan mengajar dari guru-guru akan sangat mempengaruhi pengembangan dan implementasi kurikulum di sekolah. Guru-guru yang mengajar pada berbagai jenjang dan jenis sekolah yang ada dewasa ini, umumnya disiapkan oleh LPTK melalui beberapa program, yaitu program diploma dan sarjana. Pada Sekolah Dasar masih banyak guru memiliki latar belakang pendidikan SPG dan SGO, akan tetapi hal tersebut secara berangsur-angsur mereka mengikuti peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan guru melalui program diploma dan sarjana.

### **2. Masyarakat**

Sekolah merupakan bagian dari masyarakat, yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Sebagai bagian dan agen masyarakat,

sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat penggunaannya serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka.

Masyarakat yang ada di sekitar sekolah mungkin merupakan masyarakat yang homogen atau heterogen. Sekolah berkewajiban menyerap dan melayani aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Salah satu kekuatan yang ada dalam masyarakat adalah dunia usaha. Perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat akan mempengaruhi pengembangan kurikulum. Hal ini karena sekolah tidak hanya sekedar mempersiapkan anak untuk selesai sekolah, tetapi juga untuk dapat hidup, bekerja, dan berusaha. Jenis pekerjaan yang ada di masyarakat berimplikasi pada kurikulum yang dikembangkan dan digunakan sekolah.

### **3. Sistem Nilai**

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat.

Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus terintegrasikan dalam kurikulum. Persoalannya bagi pengembang kurikulum ialah nilai yang ada di masyarakat itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen, terdiri dari berbagai kelompok etnis, kelompok vokasional, kelompok intelek, kelompok sosial, dan kelompok spritual keagamaan, yang masing-masing kelompok itu memiliki nilai khas dan tidak sama. Dalam masyarakat juga terdapat aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, fisik, estetika, etika, religius, dan sebagainya. Aspek-aspek tersebut sering juga mengandung nilai-nilai yang berbeda.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi berbagai nilai yang tumbuh di masyarakat dalam kurikulum sekolah, diantaranya:

1. Mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat

2. Berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan moral
3. Berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut ditiru
4. Menghargai nilai-nilai kelompok lain
5. Memahami dan menerima keragaman budaya yang ada (Sukmadinata, 2006: 158)

Dunia akan tetap berubah dengan cepat, terlepas dari dunia pendidikan mau berubah atau tidak. Model-model sekolah baru, eksperimentasi pendidikan, kiat layanan pendidikan yang baru, E-learning, distant learning, contextual learning, pendekatan multi-kecerdasan, penggunaan internet dalam pendidikan, pemanfaatan jejaring pendidikan harus selalu dikembangkan untuk mengubah organisme pendidikan agar terus beradaptasi bagi kepentingan masyarakat yang berubah. Beberapa rekomendasi yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum, yaitu: 1) Penyusunan kurikulum sebaiknya menganut prinsip benar, baik, dan indah, 2) Kurikulum yang dikembangkan sebaiknya terkait dengan “teori pengetahuan”, 3) Pengetahuan sebagai kebenaran dan bukan sebagai “*vested interests*”, 4) Perlu diperhatikan aspek-aspek normatif kurikulum, seperti peran pendidikan nilai dalam kurikulum, pengaruh kultur sosial dan tuntutan masyarakat atau keperluan individu, dan perancangan kurikulum yang kontekstual tanpa kehilangan aspek normatif, 5) Pengintegrasian “teori nilai” sambil memperhatikan hirarki nilai, serta sosialisasi nilai dasar kemanusiaan yang universal sejak jenjang pendidikan dasar, 6) Pemberian perhatian kepada dimensi estetika kurikulum (Hamalik, 1995: 38).

Syaodih (2004: 96) mengemukakan bahwa kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Dengan demikian kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu; mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berrilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas 2003 Bab I pasal 3). Agar lulusan pendidikan nasional memiliki keunggulan kompetitif

dan komperatif sesuai standar mutu nasional dan internasional, kurikulum di masa depan perlu dirancang sedini mungkin. Hal ini harus dilakukan agar sistem pendidikan nasional dapat merespon secara proaktif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan cara seperti ini lembaga pendidikan tidak akan kehilangan relevansi program pembelajarannya terhadap kepentingan peserta didik.

Kurikulum sebagai penentu keberhasilan pendidikan selalu dikembangkan dengan memperhatikan berbagai aspek yang terkait diantaranya menyangkut dasar filosofis, ilmu pendidikan, peserta didik, dan perkembangan IPTEK. Asas filosofis berarti dalam mengembangkan kurikulum harus memperhatikan nilai-nilai dan pandangan hidup yang dianut suatu bangsa yang menjelma menjadi watak atau karakter bangsa. Dasar ilmu pendidikan berarti perkembangan kurikulum tidak boleh keluar dari bingkai teori kependidikan yang menjadi dasar substansi kependidikan agar selalu selaras dan serasi dengan konsep pendidikan yang humanis dan demokratis. Perkembangan peserta didik maksudnya dalam mengembangkan kurikulum harus didasarkan pada fase perkembangan peserta didik yang menjadi sentral pelaksanaan kurikulum. Kurikulum yang akan dikembangkan juga harus selaras dengan perkembangan IPTEK dalam hal ini menyangkut relevansi dan kontinuitas perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan.

Mutu pendidikan yang tinggi diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang cerdas, damai, terbuka, demokratis, dan mampu bersaing sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan semua warga negara Indonesia. Kesejahteraan bangsa Indonesia di masa depan bukan lagi bersumber pada sumberdaya alam dan modal yang bersifat fisik, tetapi bersumber pada modal intelektual, modal sosial, dan

kredibilitas sehingga tuntutan untuk terus menerus memutakhirkan pengetahuan menjadi suatu keharusan. Mutu lulusan tidak cukup bila diukur dengan standar lokal saja sebab perubahan global telah sangat besar mempengaruhi ekonomi suatu bangsa. Terlebih lagi, industri baru dikembangkan dengan berbasis kompetensi tingkat tinggi, maka bangsa yang berhasil adalah bangsa yang berpendidikan dengan standar mutu yang tinggi. Agar lulusan pendidikan nasional memiliki keunggulan kompetitif dan komperatif sesuai standar mutu nasional dan internasional, kurikulum di masa depan perlu dirancang sedini mungkin. Hal ini harus dilakukan agar sistem pendidikan nasional dapat merespon secara proaktif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Tidak tercapainya tujuan pendidikan secara umum juga banyak disebabkan diantaranya oleh kurang terpenuhinya keempat aspek di atas dalam pengembangan kurikulum. Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini, yaitu:

1. Bagaimana semua warga Negara dapat menikmati kesempatan pendidikan.
2. Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun kedalam kancah kehidupan bermasyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa permasalahan yang pertama yaitu mengenai masalah pemerataan, dan yang kedua adalah masalah mutu, relevansi, dan juga efisiensi pendidikan (Umar, 2005: 225). Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembanguana sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga Negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat di tampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan.

Dalam prakteknya, pendidikan selalu menjadi alat

pemerintah untuk mempolitisasi tujuan-tujuan pendidikan dalam mempertahankan eksistensinya. Sebagai ilustrasi disini bahwa setiap pergantian pemerintah akan dibarengi dengan perubahan kurikulum yang ujung-ujungnya tidak ada perubahan substansi perbaikannya namun hanya sekedar ganti nama atau label, dimana semua akan diorientasikan pada kepentingan politik semata.

Disamping untuk tujuan pendidikan politik yang nantinya agar peserta didik dapat berpartisipasi dalam politik, pendidikan juga sudah merambah pada politik ekonomi dimana pendidikan tidak lagi mengutamakan pemerataan dan kesempatan tapi lebih kepada budaya kapitalis yang berdampak pada materi. Selama pendidikan belum kembali pada ruhnya sebagai agen perubahan menuju masyarakat madani maka selama itu pula tujuan pendidikan hanya sebatas jargon yang diagungkan tanpa makna. Dan selama itu pula perubahan kurikulum tidak akan meningkatkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya namun lebih mendukung praktek politik yang memenuhi kepentingan kapitalis.

Sebagai bahan pertimbangan dan perenungan dalam membangun pendidikan, perkembangan kurikulum harus diorientasikan pada enam masalah pokok pendidikan di atas sebagai sentral dalam pengembangan kurikulum yaitu mengacu pada empat konsepsi kurikulum yaitu (1) konsepsi kurikulum humanistik yaitu konsep kurikulum yang mengutamakan perkembangan kesadaran pribadi untuk pencapaian aktualisasi diri, (2) konsepsi kurikulum rekonstruksi sosial yaitu konsep kurikulum yang berorientasi pada penyiapan peserta didik agar dapat menghadapi berbagai perubahan masyarakat pada masa yang akan datang dan dapat menyesuaikannya, (3) konsepsi kurikulum teknologi yaitu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan hasil pendidikan yang dapat ditiru, dan (4) konsepsi kurikulum subjek akademik yaitu konsep kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan pola pikir pesera didik (Sukmadinata. 2009: 81).

Dari latar belakang diatas, kajian ini difokuskan untuk melihat sejauh mana dinamika pengembangan kurikulum ditinjau dari dimensi politisasi pendidikan dan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif

Sulthon

menuntut keteraturan, ketertiban dan kecermatan dalam berpikir tentang bagaimanakah pengembangan kurikulum melihat dari beberapa perubahannya serta menganalisis hubungan data yang satu dengan data yang lain dan keterkaitannya dengan politisasi.

## **B. Pembahasan**

### **1. Sejarah Perkembangan Kurikulum**

Pengembangan kurikulum adalah upaya penambahan, penyesuaian, peningkatan, pemanfaatan dan pendayagunaan kurikulum yang berupa seperangkat rencana yang berisi tujuan, isi, materi, pedoman pembelajaran dan evaluasi yang dilaksanakan, dan dijadikan acuan pelaksanaan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan.

Sejarah tentang adanya kurikulum sejalan dengan sejarah munculnya pendidikan itu sendiri. Dalam prakteknya, ada kurikulum 1947, kurikulum tahun 1952, kurikulum tahun 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Kurikulum 2004 Kurikulum 2006, dan sekarang Kurikulum 2013. Secara historis pergantian kurikulum dari satu periode kurikulum ke kurikulum berikutnya selalu memiliki tujuan khusus yang ingin dicapainya. Secara potensial, dalam setiap perubahan kurikulum akan selalu tersirat didalamnya tujuan yang bersifat politis dan non politis. Kurikulum yang satu diganti dengan kurikulum yang lainnya Sampai dengan kurikulum 1984, perubahan kurikulum banyak dipengaruhi oleh perubahan politik.

Kurikulum 1964 disusun untuk meniadakan Manipol-Usdek, kurikulum 1975 digunakan untuk memasukkan Pendidikan Moral Pancasila, kurikulum 1984 digunakan untuk memasukkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Kurikulum 1994, disamping meniadakan mata pelajaran PSPB juga diperkenalkannya sistem kurikulum SMU yang dimaksudkan untuk menjadikan pendidikan umum benar-benar sebagai pendidikan persiapan ke perguruan tinggi.

Berdasarkan analisis tentang pelaksanaan kurikulum di lapangan, selalu terjadi muatan-muatan politis dalam prakteknya, dan secara realitas dampaknya terasa pada merosotnya sendi-sendi

tujuan pendidikan itu sendiri. Banyak praktek pendidikan yang dikembangkan selalu berujung pada pengembangan kognitif yang harus diukur keberhasilan pendidikan berdasarkan satu-satunya aspek ini. Sehingga efek pembelajaran atau *nurturant effect* dari pembelajaran tidak pernah terjadi.

## **2. Hubungan Kurikulum dengan Komponen Sistem Pendidikan**

Pendidikan harus relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masa depan peserta didik. Pada sisi manajemen dan pengelolaan, sekolah dapat dipandang sebagai suatu institusi sosial yang menjadi media proses penanaman nilai-nilai budaya dan kebersamaan hidup dalam keberagaman, maka pengembangan iklim sekolah seyogyanya mencerminkan kehidupan yang sesungguhnya, inovasi pendidikan pada dasarnya merupakan suatu investasi SDM sehingga dapat menciptakan iklim yang memungkinkan untuk setiap satuan pendidikan memberikan andil dan berperan serta dalam inovasi pendidikan. Agar dapat memberikan kontribusi itu maka setiap satuan pendidikan harus diberikan payung hukum (yaitu PP No 19 Tahun 2005 tentang SNP) untuk mengembangkan kurikulum sekolah agar institusinya menjadi produktif sehingga dapat lebih bernilai inovatif.

## **3. Model-Model Pengembangan Kurikulum**

Ada beberapa karakteristik utama dari pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan, yaitu: 1) menekankan partisipasi seluruh guru atau perwakilan guru secara proporsional, 2) pengembangan seluruh komponen dan kegiatan kurikulum, 3) guru dan pimpinan perlu terus meningkatkan kemampuannya, 4) harus selektif, adaptif, dan kreatif, 5) merupakan proses berkelanjutan dan dinamis, 6) berfokus pada kebutuhan dan perkembangan peserta didik, 7) memperhatikan kondisi dan perkembangan sosial-budaya masyarakat, 8) memperhatikan kondisi dan kebutuhan faktor-faktor pendukung pelaksanaan (Oliva, 1992: 216).

Dalam karakteristik di atas sebenarnya ada tiga hal yang mendapatkan perhatian utama dalam pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan, yaitu kepentingan peserta didik, kondisi satuan pendidikan dan masyarakat serta peranan para pengembang kurikulum terutama guru. Peserta didik mendapatkan perhatian

utama karena merekalah subyek dan sasaran pokok pendidikan. Semua upaya pendidikan diarahkan pada pengembangan peserta didik atau mahasiswa didik secara optimal. Pengembangan seluruh aspek kepribadiannya, baik aspek fisik-motorik, intelektual, dan sosial maupun emosi. Pengembangan kurikulum minimal menyangkut empat model yang banyak diacu dalam pengembangan kurikulum, yaitu model kurikulum: subyek akademik, humanistik, rekonstruksi sosial, dan kompetensi.

*a. Kurikulum Subyek Akademik*

Kurikulum subyek akademik, merupakan model konsep kurikulum yang paling tua, sejak sekolah yang pertama dulu berdiri, kurikulumnya boleh dikatakan mirip dengan model ini. Sampai sekarang, walaupun telah berkembang model-model lain, tetapi kebanyakan sekolah tidak dapat melepaskan diri dari model ini. Kurikulum ini menekankan isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Penyusunannya relatif mudah, praktis, dan mudah digabungkan dengan model yang lain (Oliva, 1992: 215).

Kurikulum Subyek Akademis bersumber dari pendidikan Klasik, Perenialisme dan Esensialisme, berorientasi kepada masa lalu. Semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Fungsi pendidikan adalah memelihara dan mewariskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada generasi baru. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah berusaha menguasai isi atau materi pelajaran sebanyak-banyaknya. Orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian terbesar dari isi pendidikan yang diberikan atau disiapkan oleh guru.

Para pengembang kurikulum tidak perlu susah-susah menyusun dan mengembangkan bahan sendiri. Mereka tinggal memilih bahan-bahan materi ilmu yang telah dikembangkan oleh para ahli disiplin ilmu, kemudian mereorganisasinya secara sistematis, sesuai dengan tujuan pendidikan dan tahap perkembangan peserta didik yang akan mempelajarinya. Guru sebagai penyampai bahan ajar memegang peranan penting. Mereka harus menguasai semua pengetahuan yang menjadi isi kurikulum.

Kurikulum subyek akademis tidak berarti terus tetap

hanya menekankan pada materi yang disampaikan, dalam sejarah perkembangannya secara berangsur memperhatikan juga proses belajar yang dilakukan peserta didik. Proses belajar yang dipilih sangat tergantung pada segi apa yang dipentingkan dalam materi pelajaran tersebut. Jerome Bruner dalam bukunya "*The Process of Education*", menyarankan bahwa disain kurikulum hendaknya didasarkan atas struktur dari disiplin ilmu. Selanjutnya ia menegaskan bahwa kurikulum suatu mata pelajaran harus didasarkan atas pemahaman yang mendasar yang dapat diperoleh dari prinsip-prinsip yang mendasarinya yang memberi struktur kepada suatu disiplin ilmu (Oliva, 1992:43).

Beberapa kegiatan belajar memberi kemungkinan untuk mengadakan generalisasi, suatu pengetahuan dapat digunakan dalam konteks yang lain daripada hanya sekedar yang dipelajarinya, dapat merangsang ingatan apabila peserta didik diminta untuk menghubungkannya dengan masalah lain. Seorang peserta didik yang belajar fisika umpamanya, ia harus melakukan kegiatan belajar sebagaimana seorang ahli fisika melakukannya. Hal seperti itu akan dapat mempermudah proses belajar fisika bagi peserta didik.

Penekanan pada segi intelektual ini dianut oleh hampir seluruh proyek pengembangan kurikulum pada tahun 1960-an di sekolah-sekolah negara bagian Amerika Serikat. Para pengembang kurikulum pada masa itu, adalah para ahli mata pelajaran yang menyusun bahan ajaran di sekitar unsur-unsur struktural mendasar dari disiplin ilmunya, menyangkut problema, konsep-konsep inti, prinsip-prinsip, dan cara-cara bagaimana berinkuiri.

Salah satu contoh dari kurikulum yang didasarkan atas struktur pengetahuan adalah *Man: A Course of Study* (MACOS). MACOS adalah suatu kurikulum untuk sekolah dasar, terdiri atas buku-buku, film, poster, rekaman, permainan dan perlengkapan kelas lainnya. Kurikulum ini ditujukan untuk mengadakan penyempurnaan dalam pembelajaran ilmu sosial dan humanitas, dengan pengarah dan bimbingan dari Bruner. Para pengembang kurikulum mengharapkan para peserta didik dapat menggali faktor-faktor penting yang akan menjadikan manusia sebagai manusia. Melalui perbandingan dengan binatang, anak mengetahui keadaan biologis dari manusia. Dengan

membandingkan manusia dari suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya, anak-anak akan mempelajari aspek-aspek universal dari kebudayaan manusia (Oliva, 1992:185).

Sasaran utama dari kurikulum model MACOS adalah perkembangan kemampuan intelektual, yaitu membangkitkan penghargaan dan keyakinan akan kemampuan sendiri dan memberikan serangkaian cara-cara kerja yang memungkinkan anak walaupun dengan cara sederhana mampu menganalisis kehidupan sosial.

Sekurang-kurangnya ada tiga pendekatan dalam perkembangan dari Kurikulum Subyek Akademis. Pendekatan pertama, melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Pendekatan kedua, adalah studi yang bersifat integratif. Pendekatan ini merupakan respon terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut model-model pengetahuan yang lebih bersifat komprehensif-terpadu. Mereka mengembangkan suatu model kurikulum yang terintegrasi (*integrated curriculum*). Pendekatan ketiga, adalah pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Mereka tetap mengajar berdasarkan mata-mata pelajaran dengan tekanan kepada membaca, menulis, dan memecahkan masalah-masalah matematis. Pelajaran-pelajaran lain seperti ilmu kealaman, ilmu sosial dan lain-lain, dipelajari tanpa dihubungkan dengan kebutuhan praktis pemecahan masalah dalam kehidupan.

#### ***b. Kurikulum Humanistik***

Model kurikulum humanistik menekankan pengembangan kepribadian peserta didik secara utuh dan seimbang, antara perkembangan segi intelektual, afektif, dengan psikomotor. Kurikulum humanistik menekankan pengembangan potensi dan kemampuan dengan memperhatikan minat dan kebutuhan peserta didik. Pembelajarannya berpusat pada peserta didik, student centered atau student based teaching, peserta didik menjadi subyek dan pusat kegiatan. Pembelajaran segi-segi sosial, moral, dan afektif mendapat perhatian utama dalam model kurikulum ini. Model kurikulum ini berkembang dan digunakan dalam pendidikan pribadi.

Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik, didasari oleh konsep-konsep pendidikan

pribadi (*Personalized Education*) yaitu John Dewey (*Progressive Education*) dan J.J. Rousseau (*Romantic Education*). Konsep ini lebih memberikan tempat utama kepada peserta didik. Mereka bertolak dari asumsi bahwa anak atau peserta didik adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Ia adalah subyek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Mereka percaya bahwa peserta didik mempunyai potensi-potensi, punya kemampuan dan kekuatan untuk berkembang sendiri. Para pendidik humanis juga berpegang kepada konsep Gestalt, bahwa individu atau anak merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Pendidikan diarahkan kepada membina manusia yang utuh bukan saja segi fisik dan intelektual tetapi juga segi sosial dan afektif: emosi, sikap, perasaan, minat, nilai, dan lain-lain.

Pandangan mereka berkembang sebagai reaksi terhadap pendidikan yang lebih menekankan segi intelektual dengan peran utama dipegang oleh guru. Pendidikan humanistik menekankan peranan peserta didik. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk menciptakan situasi yang permisif, rileks, akrab. Menurut Mc Neil "*The new humanists are self actualizers who see curriculum as a liberating process that can meet the need for growth and personal integrity*" (Oliva, 1992:24). Tugas guru adalah menciptakan situasi yang permisif dan mendorong peserta didik untuk mencari dan mengembangkan pemecahan sendiri.

### **c. Kurikulum Rekonstruksi Sosial**

Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan model-model kurikulum lainnya, lebih memusatkan perhatiannya pada problema-problema yang dihadapi dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan Interaksional. Menurut mereka pendidikan bukanlah merupakan upaya sendiri, tetapi merupakan kegiatan bersama, interaksi, kerjasama. Kerjasama atau interaksi bukan hanya terjadi antara peserta didik dengan guru, tetapi juga antara peserta didik dengan peserta didik, peserta didik dengan orang-orang di lingkungannya dan dengan sumber-sumber belajar lainnya. Melalui interaksi dan kerjasama ini peserta didik berusaha memecahkan problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik.

Theodore Brameld, pada awal tahun 1950-an mengemukakan

gagasannya tentang rekonstruksi sosial. Di dalam masyarakat demokratis, seluruh warga masyarakat harus turut serta dalam perkembangan dan pembaharuan masyarakat. Untuk melaksanakan hal itu sekolah mempunyai posisi yang cukup penting. Sekolah bukan saja dapat membantu individu memperkembangkan kemampuan sosialnya, tetapi juga dapat membantu bagaimana berpartisipasi sebaik-baiknya dalam kegiatan sosial (Syaudih, 2004: 124).

Para Rekonstruksionis Sosial tidak mau terlalu menekankan kebebasan individu. Mereka ingin meyakinkan para peserta didik bagaimana masyarakat telah membuat warganya seperti adanya sekarang dan bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan pribadi warganya melalui konsensus sosial. Brameld juga ingin memberikan keyakinan tentang pentingnya perubahan sosial. Perubahan sosial tersebut harus dicapai melalui prosedur demokrasi. Para rekonstruksi sosial menentang intimidasi, menakut-nakuti, dan kompromi semu. Mereka mendorong agar para peserta didik mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah sosial yang mendesak (*crucial*) dan kerjasama atau bergotong royong untuk memecahkannya.

Kurikulum Rekonstruksi Sosial memiliki komponen-komponen yang sama dengan model kurikulum lain tetapi isi dan bentuk-bentuknya berbeda.

#### 1) Tujuan dan isi kurikulum

Setiap tahun program pendidikan mempunyai tujuan yang berbeda. Dalam program pendidikan ekonomi-politik, umpamanya untuk tahun pertama tujuannya membangun kembali dunia ekonomi-politik. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah (1) mengadakan survai kritis terhadap masyarakat (2) mengadakan studi tentang hubungan antara keadaan ekonomi lokal dengan ekonomi nasional dan dunia, (3) mengadakan studi tentang latar belakang historis dan kecenderungan-kecenderungan perkembangan ekonomi, hubungannya dengan ekonomi lokal, (4) mengkaji praktek politik dalam hubungannya dengan faktor ekonomi, (5) memantapkan rencana perubahan praktek politik, (6) mengevaluasi semua rencana dengan kriteria apakah telah memenuhi kepentingan sebagian terbesar orang (Nasution, 1984: 28).

## 2) Metoda

Dalam pembelajaran Rekonstruksi Sosial para pengembang kurikulum berusaha mencari keselarasan antara tujuan-tujuan nasional dengan tujuan peserta didik. Guru-guru berusaha membantu para peserta didik menemukan minat dan kebutuhannya. Para peserta didik sesuai dengan minatnya masing-masing, baik dalam kegiatan pleno maupun kelompok-kelompok berusaha memecahkan masalah sosial yang dihadapinya. Kerjasama baik antara individu dalam kegiatan kelompok, maupun antarkelompok dalam kegiatan pleno sangat mewarnai metoda rekonstruksi sosial. Kerjasama ini juga terjadi antara para peserta didik dengan manusia sumber dari masyarakat. Bagi rekonstruksi sosial, belajar merupakan kegiatan bersama, ada ketergantungan antara seorang dengan yang lainnya. Dalam kegiatan belajar mereka tidak ada kompetisi, yang ada adalah kooperasi atau kerjasama, saling pengertian dan konsensus. Anak-anak sejak sekolah dasarpun diharuskan turut serta dalam survai kemasyarakatan serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Untuk kelas-kelas tertinggi selain mereka dihadapkan kepada situasi nyata juga mereka diperkenalkan dengan situasi-situasi ideal. Dengan hal itu diharapkan para peserta didik dapat menciptakan model-model kasar dari situasi yang akan datang (Nasution, 1984: 68).

## 3) Evaluasi

Dalam kegiatan evaluasi para peserta didik juga dipartisipasikan. Partisipasi mereka terutama dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Soal-soal yang akan diujikan dinilai lebih dulu baik ketepatan maupun keluasan isinya, juga keampuhannya menilai pencapaian tujuan-tujuan pembangunan masyarakat yang sifatnya kualitatif. Evaluasi tidak hanya menilai apa yang telah dikuasai peserta didik, tetapi juga menilai pengaruh dari kegiatan sekolah terhadap masyarakat. Pengaruh tersebut terutama menyangkut perkembangan masyarakat dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat.

### *d. Kurikulum Kompetensi*

Seiring dengan perkembangan zaman di mana informasi semakin melimpah, cepat, dan mudah diperoleh, maka pemilikan kompetensi menjadi suatu kerharusan untuk menyesuaikan dengan

perubahan. Kompetensi dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak (Depdiknas, 2004).

Abad dua puluh ditandai oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi mempengaruhi setiap bidang dan aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Sejak dahulu teknologi telah diterapkan dalam pendidikan, tetapi yang digunakan adalah teknologi sederhana seperti penggunaan papan tulis dan kapur, pena dan tinta, sabak dan grip, dan lain-lain. Dewasa ini sesuai dengan tahap perkembangannya yang digunakan adalah teknologi maju, seperti audio dan *video cassette*, *overhead projector*, *film slide* dan *motion film*, mesin pembelajaran, komputer, CD-rom, dan internet.

Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, di bidang pendidikan berkembang pula teknologi pendidikan. Aliran ini ada persamaannya dengan pendidikan klasik, yaitu menekankan isi kurikulum, tetapi diarahkan bukan pada pemeliharaan dan pengawetan ilmu tersebut tetapi pada penguasaan kemampuan atau kompetensi (Hamalik, 2008:146). Suatu kompetensi yang besar diuraikan menjadi kompetensi yang lebih sempit/khusus dan akhirnya menjadi perilaku atau kegiatan (*performance*) yang dapat diamati atau diukur. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan khususnya kurikulum adalah dalam dua bentuk, yaitu bentuk perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). Penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan dikenal sebagai teknologi alat (*tools technology*), sedang penerapan teknologi perangkat lunak disebut juga teknologi sistem (*system technology*) (Ibrahim & Kayadi, 1994: 29).

Teknologi pendidikan dalam arti teknologi alat, lebih menekankan kepada penggunaan alat-alat teknologis untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Di dalam kurikulumnya berisi rancangan atau desain kurikulum yang ditunjang oleh penggunaan media atau alat bantu pembelajaran. Dalam arti teknologi sistem, teknologi pendidikan menekankan kepada penyusunan program pembelajaran atau rencana pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem. Program pembelajaran ini bisa semata-mata program sistem, bisa program sistem yang ditunjang dengan alat dan media, dan bisa juga program sistem yang dipadukan dengan alat dan media pembelajaran (Syaudih, 2004: 124).

Pada bentuk pertama, pembelajaran tidak membutuhkan alat dan media yang canggih, tetapi bahan ajar dan proses pembelajaran disusun secara sistem dalam bentuk satuan pelajaran (*lesson unit*). Alat dan media digunakan sesuai dengan kondisi tetapi tidak terlalu dipentingkan.

Pada bentuk kedua, pembelajaran disusun secara sistem dan ditunjang dengan penggunaan alat dan media pembelajaran. Penggunaan alat dan media belum terintegrasi dengan program pembelajaran, bersifat "*on-off*", yaitu bila digunakan alat dan media akan lebih baik, tetapi bila tidak menggunakan alatpun pembelajaran masih tetap berjalan.

Pada bentuk ketiga program pembelajaran telah disusun secara terpadu antara bahan dan kegiatan pembelajaran dengan alat dan media. Bahan ajaran telah disusun dalam kaset audio, video atau film, atau diprogramkan dalam komputer. Pembelajaran tidak bisa berjalan tanpa melibatkan penggunaan alat-alat dan program tersebut. Contoh-contoh dari model desain pembelajaran tersebut adalah: pembelajaran berprogram, pembelajaran dengan menggunakan video, audio, film, pembelajaran dengan bantuan komputer (*computer aided instruction* atau CAI), belajar dengan bantuan computer (*computer aided learning* atau CAL), pembelajaran modul, pembelajaran melalui internet (*e-learning* atau *web site learning*), dan lain-lain.

Ada beberapa ciri dari kurikulum kompetensi yang dikembangkan dari konsep teknologi pendidikan, yaitu: 1) Tujuan, tujuan diarahkan pada penguasaan kemampuan akademik, kemampuan vokasional, atau kemampuan pribadi yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi. Tujuan-tujuan yang bersifat umum yaitu standar kompetensi dirinci menjadi tujuan-tujuan yang lebih khusus (kompetensi dasar), yang kemudian dijabarkan lagi menjadi perilaku yang dapat diukur atau performansi (indikator); 2) Metoda, metoda yang merupakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai proses mereaksi terhadap perangsang-perangsang yang diberikan dan apabila terjadi respons yang diharapkan maka respons tersebut diperkuat. Tujuan-tujuan pembelajaran telah ditentukan sebelumnya. Pembelajaran dalam konsep awalnya bersifat individual, tiap peserta didik menghadapi serentetan tugas yang harus dikerjakannya, dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Pada saat tertentu ada

tugas-tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Setiap peserta didik harus menguasai secara tuntas tujuan-tujuan dari program pembelajaran (pembelajaran tuntas).

Pelaksanaan pembelajaran mengikuti langkah-langkah sebagai berikut, a) Penegasan tujuan. Para peserta didik diberi penjelasan tentang pentingnya bahan yang harus dipelajari. Sebagai tanda menguasai bahan mereka harus menguasai secara tuntas tujuan-tujuan dari suatu program; b) Pelaksanaan pembelajaran. Para peserta didik belajar secara individual melalui media buku-buku ataupun media elektronik. Dalam kegiatan belajarnya mereka dapat menguasai keterampilan-keterampilan dasar ataupun perilaku-perilaku yang dinyatakan dalam tujuan program. Mereka belajar dengan cara memberikan respons secara cepat terhadap persoalan-persoalan yang diberikan; c) Pengetahuan tentang hasil. Kemajuan peserta didik dapat segera diketahui oleh peserta didik sendiri, sebab dalam model kurikulum ini umpan balik selalu diberikan. Para peserta didik dapat segera mengetahui apa yang telah mereka kuasai dan apa yang masih harus dipelajari lebih serius. 3) Organisasi bahan ajaran, bahan ajaran atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan sesuatu kompetensi. Bahan ajaran atau kompetensi yang luas/besar dirinci menjadi bagian-bagian atau sub kompetensi yang lebih kecil, yang menggambarkan obyektif. Urutan dari obyektif-obyektif ini pada dasarnya menjadi inti dari organisasi bahan, 4) Evaluasi, kegiatan evaluasi dilakukan pada setiap saat, pada akhir suatu pelajaran, suatu unit, ataupun semester. Fungsi evaluasi ini bermacam-macam, sebagai umpan balik bagi peserta didik dalam penyempurnaan penguasaan suatu satuan pelajaran (evaluasi formatif), umpan balik bagi peserta didik pada akhir suatu program atau semester (evaluasi sumatif). Juga dapat menjadi umpan balik bagi guru dan pengembang kurikulum untuk penyempurnaan kurikulum. Evaluasi yang mereka gunakan umumnya berbentuk penilaian kompetensi. Sesuai dengan landasan pemikiran mereka, bahwa model pembelajarannya menekankan sifat ilmiah, bentuk penilaian ini dipandang yang paling cocok, dapat mengukur perilaku atau performansi (Syaudih, 2004: 36).

Program pembelajaran teknologis sangat menekankan efisiensi dan efektivitas. Program dikembangkan melalui beberapa kegiatan

uji coba dengan sampel-sampel dari suatu populasi yang sesuai, direvisi beberapa kali sampai standar yang diharapkan dapat dicapai. Dengan model pembelajaran ini tingkat penguasaan peserta didik dalam standar konvensional jauh lebih tinggi dibandingkan dengan model-model lain. Apalagi kalau digunakan program-program yang lebih berstruktur seperti pembelajaran berprogram, pembelajaran modul, atau pembelajaran dengan bantuan video dan komputer, yang dilengkapi dengan sistem umpan balik dan pembimbingan dari tutor yang teratur dapat mempercepat dan meningkatkan penguasaan peserta didik.

Meskipun memiliki kelebihan-kelebihan, kurikulum teknologis tidak terlepas dari beberapa keterbatasan atau kelemahan. Model ini terbatas kemampuannya untuk mengajarkan bahan ajaran yang kompleks atau membutuhkan penguasaan tingkat tinggi (analisis-sintetis, evaluasi, pemecahan masalah dan kreativitas) juga bahan-bahan ajaran yang bersifat afektif. Beberapa percobaan menunjukkan kemampuan peserta didik untuk mentransfer hasil belajar cukup rendah. Pembelajaran teknologis sukar untuk dapat melayani bakat-bakat peserta didik belajar dengan metoda-metoda khusus. Metoda mengajar mereka cenderung seragam. Keberhasilan belajar peserta didik juga sangat dipengaruhi oleh sikap mereka; bila sikapnya positif maka peserta didik akan berhasil, tetapi bila sikapnya negatif, tingkat penguasaannya pun relatif rendah. Masalah kebosanan juga berpengaruh terhadap proses belajar.

#### **4. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pengembangan Kurikulum**

Pengembangan kurikulum pendidikan dasar harus dikaitkan dengan karakteristik kualitas sumber daya manusia yang diperlukan untuk kehidupan mereka di masyarakat, dan sekaligus mempertimbangkan karakteristik perbedaan kelompok peserta didik di masing-masing jenis dan jenjang satuan pendidikan dasar. Konsep dasar yang komprehensif dan luas tentang fungsi pokok pendidikan dasar tidak hanya dipergunakan untuk masyarakat, tetapi hendaknya tertuju pada suatu kajian tentang praktek dan kebijakan pendidikan dasar pada tingkat awal dari semua negara. Tujuannya, untuk memberikan suatu landasan yang mantap bagi praktek belajar peserta

didik di masa depan dan mengembangkan keterampilan hidup (*life skills*) yang esensial untuk membekali peserta didik agar mampu hidup bermasyarakat.

Dalam menghadapi harapan dan tantangan masa depan yang lebih baik, pendidikan dipandang sebagai esensi kehidupan, baik bagi perkembangan pribadi maupun perkembangan masyarakat. Misi pendidikan, termasuk pendidikan dasar, adalah memungkinkan setiap orang, tanpa kecuali, mengembangkan sepenuhnya semua bakat individu, dan mewujudkan potensi kreatifnya, termasuk tanggung jawab terhadap dirisendiri, dan pencapaian tujuan pribadi. Misi itu akan dapat tercapai melalui strategi yang disebut belajar sepanjang hidup (*learning throughout life*), yang dipandang sebagai detak jantung dari masyarakat.

Hal ini berarti bahwa kurikulum (program Kajian Kebijakan Kurikulum SD – Tahun 2007 9 belajar) pendidikan dasar harus memfasilitasi peserta didik untuk belajar lebih bebas dan mempunyai pandangan sendiri yang disertai dengan rasa tanggung jawab pribadi yang lebih kuat untuk mencapai tujuan hidup pribadinya atau tujuan bersama sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu untuk seluruh lapisan peserta didik pendidikan dasar, maka pengembangan kurikulumnya harus dirancang sebagai keseluruhan dari penawaran lembaga pendidikan (sekolah) termasuk kegiatan di luar kelas/sekolah dengan rangkaian mata pelajaran dan kegiatan yang terpadu. Setiap satuan pendidikan memperoleh identitas atas dasar caranya mereka menjalankan program-program belajar yang dikembangkannya. Faktor-faktor yang menentukan isi tiap program harus muncul jauh di luar batas-batas sekolah/satuan pendidikan. Faktor-faktor itu timbul melalui kekuatan-kekuatan sosial, kultural, ekonomi, dan politik. Kurikulum suatu sekolah/satuan pendidikan dasar harus mewakili keseluruhan sistem pengaruh yang membangun lingkungan belajar bagi peserta didik. Program itu sendiri terdiri atas unsur-unsur tertentu yang mencakup maksud dan tujuan, kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar peserta didik.

Pengembangan program belajar (kurikulum) pada tingkat pendidikan dasar harus meliputi hal-hal esensial yang dibutuhkan peserta didik, seperti: bidang-bidang studi apa yang akan disajikan;

untuk maksud-maksud khusus apa bidang studi tersebut disajikan; bagaimana bidang studi tersebut hendak disusun dan dihubungkan; dan bagaimana bidang studi tersebut diajarkan kepada peserta didik.

Secara konseptual, pengembangan kurikulum pendidikan dasar masa depan perlu mangakomodasikan secara sistematis dimensi-dimensi pengembangan peserta didik sebagai berikut: 1). Pengembangan individu - aspek-aspek hidup pribadi (dimensi pribadi); 2). Pengembangan cara berpikir dan teknik memeriksa – kecerdasan yang terlatih (dimensi kecerdasan); 3). Penyebaran warisan budaya – nilai-nilai civic dan moral bangsa (dimensi sosial); 4). Pemenuhan kebutuhan sosial yang vital dan menyumbang kepada kesejahteraan (Hamalik, 2008: 211). Untuk mendukung keterlaksanaan pengembangan kurikulum pendidikan dasar masa depan tersebut di atas, perlu dikembangkan suatu masyarakat belajar (*learning society*) pada setiap satuan pendidikan dasar. Hal tersebut dimungkinkan, karena setiap aspek kehidupan, baik pada tingkat individual maupun sosial, menawarkan kesempatan untuk belajar dan bekerja. Oleh karena itu, pengembangan program belajar (kurikulum) pendidikan dasar di masa depan perlu mendorong dan memfasilitasi penggalan potensipendidikan dari media teknologi informasi modern, dunia kerja atau kultural, dan pengisian waktu luang. Selain itu, perlu dikembangkan pula kebiasaan peserta didik untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri, baik yang terkait dengan apa yang mereka pelajari di satuan pendidikannya, maupun yang terkait dengan pemecahan masalah yang dihadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Dalam implementasi kurikulum ini Mulyani Sumantri, 1988: 23) membedakan tiga model implementasi yang terletak dalam suatu garis kontinum. Pada ujung paling kiri terletak model implementasi *Fidelity*, di tengahnya model *Mutual adaptive* dan pada ujung paling kanan adalah *Enactment*. Sehingga susunannya seperti berikut: *Fidelity Mutual adaptive Enactment*.

Dalam model *Fidelity*, implementasi kurikulum harus persis sesuai dengan desain kurikulum. Desain kurikulumnya bersifat standar, dokumen kurikulum lengkap, dan seluruh komponen kurikulum telah dijabarkan secara rinci.

*Mutual adaptive*, implementasi kurikulum memperhatikan kondisi, situasi dan kebutuhan peserta didik yang belajar saat itu. Guru mengadakan perubahan atau penyempurnaan sesuai kondisi dan situasi sekolah dan kebutuhan perkembangan peserta didik yang belajar. Desain kurikulum standar hanya berisi komponen pokok, sebagai kurikulum inti, penjabarannya dilakukan oleh guru. Model *Enactment*, guru menyusun dan mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat, baik kondisi, kebutuhan, perkembangan peserta didik maupun sekolah dan masyarakat sekitarnya.

Model *fidelity* biasanya diterapkan dalam kurikulum standar yang bersifat nasional, dapat juga diterapkan dalam kurikulum satuan pendidikan, asal desain kurikulum tersebut sudah standar, semua komponen kurikulumnya sudah terumuskan secara rinci dengan indikator-indikator yang jelas. Para pelaksana kurikulum, yaitu guru tinggal melaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Penyusunan kurikulum standar pada tingkat satuan pendidikan di Indonesia membutuhkan waktu, mengingat kondisi dan tahap perkembangan satuan pendidikan yang ada saat ini sangat beragam. Mengingat hal itu, model implementasi kurikulum yang mungkin lebih banyak dapat digunakan dalam pelaksanaan KTSP adalah model mutual adaptif dan/atau enactment. Guru dalam mengimplementasikan desain kurikulum yang telah mereka susun dapat mengadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai kondisi, kebutuhan dan perkembangan peserta didik, lembaga pendidikan dan masyarakat, tetapi tetap dengan sasaran perkembangan peserta didik secara optimal. Dalam implementasi yang bersifat mutual adaptif dan enactment tersebut, upaya ke arah pengembangan desain kurikulum yang bersifat standar, perlu terus dilakukan.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Indonesia akan memasuki babak baru pengembangan pendidikan standar. Pendidikan ini diarahkan pada pencapaian atau penguasaan standar tingkat tinggi, kelas dunia atau kelas nasional, walaupun dapat saja standar kelas lokal. Pengembangan pendidikan ini sepertinya mengabaikan keragaman kondisi daerah dan kemampuan peserta didik.

Pada negara-negara yang telah menerapkan pendidikan standar, keragaman tersebut diakui adanya, tetapi tidak menjadi penghalang untuk dilaksanakan. Pendidikan standar atau *"Standards-based education (SBE) is based on the belief that all students are capable of meeting high standards"* (Parkay, FW. et all (2006: 223). Mulai tahun 1990 Amerika Serikat menerapkan pendidikan standar. Berkenaan dengan penerapan pendidikan ini di Amerika Serikat lebh lanjut Parkay et al(2006: 224) menjelaskan: *"In the past, expectations for students from poor families and students who are member of minority groups are sometimes lower than for other students. Today's, SBE is seen as a way of ensuring that excellence and equity become part of our nation's public school system"*. Walaupun dalam kondisi dan tahap perkembangan masyarakat yang berbeda, dengan kesungguhan dan kerja keras, secara berangsur pendidikan standar diharapkan dapat diterapkan di Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dinyatakan ada delapan standar nasional pendidikan, yaitu standar: isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Kurikulum secara operasional berkenaan dengan seluruh komponen pendidikan yang distandarkan, tetapi dalam desainnya terutama berkenaan dengan komponen: kemampuan lulusan, isi, proses, dan penilaian hasil pembelajaran.

Banyak pandangan tentang kurikulum standar, secara konseptual para ahli (Parkay, et all; Marsh, CJ; Marzano & Kendall; etc.) membedakan antara standar isi (*content standards*) dan standar performansi (*performance standards*). Standar isi berkenaan dengan pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai peserta didik dalam berbagai mata pelajaran, *" what students should know and be able to do"*. Standar performansi menunjukkan tingkat penguasaan peserta didik dalam standar isi, *" how good is is good enough"* (Parkay, 2006: 225). Keduanya tidak dapat dipisahkan, dan standarnya sendiri sebenarnya terletak dalam tingkat performansinya, inilah yang menentukan apakah standar tersebut standar internasional, nasional atau lokal, bahkan sekolah.

Dalam KTSP, standar isi sudah ditentukan dan dirumuskan dalam standar kompetensi lulusan, standar kompetensi, dan kompe-

tensi dasar tiap mata pelajaran, dan ini merupakan standar kompetensi nasional minimal. Dengan demikian satuan pendidikan dapat menambahnya. Mengenai standar performansinya tidak dinyatakan dalam ketentuan-ketentuan KTSP, hal itu berarti sekolah atau daerah dapat menentukan sendiri.

Pengembangan pendidikan standar diarahkan pada realisasi pendidikan secara profesional. Hal itu sudah dimulai dengan pengembangan profesi guru dan dosen menuju terwujudnya guru dan dosen profesional, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, oleh guru-guru dan dosen profesional, akan melahirkan lulusan yang menguasai isi dan performansi standar dan profesional pula.

Dalam KTSP, untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mata-mata pelajaran dikelompokkan atas: agama dan akhlak mulia; kewarganegaraan dan akhlak kepribadian; ilmu pengetahuan dan teknologi; estetika; jasmani, olah raga, dan kesehatan. Penguasaan isi dan performansi secara standar dalam bidang atau kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kewarganegaraan dan akhlak kepribadian; estetika; dan jasmani, olah raga, dan kesehatan mengarah pada pengembangan lulusan yang memiliki integritas kepribadian dan komitmen nilai yang tinggi. Penguasaan isi dan performansi secara standar dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi mengarah pada pengembangan lulusan yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.

Keduanya menjadi landasan dalam pengembangan profesionalisme, sebab profesionalisme didasari oleh penguasaan pengetahuan dan kemampuan secara standar (keunggulan dan daya saing), dan berkinerja secara standar (integritas kepribadian dan komitmen pada nilai). Keduanya berkembang dan dikembangkan melalui pendidikan, latihan, pengalaman sebelumnya, pembinaan dan penciptaan iklim kerja dalam lingkungan kerja saat ini.

##### **5. Analisis Kritis terhadap Politisasi Pendidikan dan Ekonomi dalam Perubahan Kurikulum**

Terjadinya perubahan kurikulum dari waktu ke waktu selalu menggunakan asumsi mengikuti dinamika perkembangan

IPTEK, dimana pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi garda terdepan dalam semangat perubahan kurikulum. Disisi lain sebenarnya asumsi di atas tidak pernah sinkron dan terwujud dalam praktek perubahan kurikulum. Sebagai contoh perubahan kurikulum 1964 sebenarnya politik untuk meniadakan MANIPOL-USDEK, lalu kurikulum 1975 digunakan untuk tujuan politik pemerintah memasukkan Pendidikan Moral Pancasila, dimana pendidikan harus memberikan doktrin-doktrin moral pancasila yang sakti mandraguna dan semua elemen bangsa tidak boleh memberikan kritik apaun karena akan dibenturkan dengan istilah melanggar pancasila dan sebagai komunis.

Perubahan kurikulum 1984 digunakan untuk tujuan politik yaitu memasukkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Dampak perubahan kurikulum ini memberikan doktrin-doktrin kepada siswa tentang pentingnya sejarah perjuangan bangsa yang semua kemasanya tidak terbuka untuk dikritisi namun lebih pada mengedepankan tujuan tertentu agar siswa mendukung hegemoni kekuasaan pemerintah. Pada era Orde baru, perubahan kurikulum sangat tampak ada sebuah pergesekan doktrin politik, seiring pergantian politik pada era reformasi pada perkembangannya tidak jauh berbeda dengan orde sebelumnya dalam politisasi pendidikan, hanya saja pada era reformasi doktrin tersebut tidak nampak secara “blak-blakan” karena dalam praktek pemerintahan terdapat adanya kritik dari luar.

Jika kurikulum dimaknai sebagai jantung atau ruhnya pendidikan, maka perubahan kurikulum semata-mata karena pendidikan harus merespon situasi perkembangan. Idealnya perkembangan selalu menuju perbaikan bukan sebaliknya. Perubahan kurikulum tidak hanya mengulang lembaran lama yang sudah usang dan sekedar mengarah pada tujuan politik pemerintah semata. Perubahan kurikulum tahun 2004 dengan nama kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang disempurnakan dalam implementasinya pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) tahun 2006 secara teoritis terdapat perubahan positif. Akan tetapi dalam implementasinya perubahan tersebut berujung pada ukuran keberhasilan pendidikan yang didasarkan pada aspek kognitif (UAN). Hal tersebut menyebabkan proses pendidikan tidak lagi berdasarkan

kompetensi siswa semata tapi bergeser kembali pada eksplorasi pengetahuan agar lulus dalam ujian.

Jika pendidikan hanya terfokus pada ukuran kognitif maka akan mudah dijadikan kendaraan pemerintah untuk pendidikan politik di sekolah dan selama itu pula pendidikan tidak akan bisa mengembangkan kompetensi siswa menjadi dirinya sendiri yang harus dieksplorasi semua kemampuannya secara menyeluruh menyangkut kognisi, afeksinya dan sosialnya. Sehingga bertolak dari pemahaman tersebut, persoalan yang berhubungan dengan nilai-nilai moral akan tercapai melalui pendidikan afeksi, sedang kualitas pengembangan ilmu pengetahuan tercapai melalui pendidikan kognisi serta budaya sosial kemasyarakatan yang diwadahi dalam muatan lokal masing-masing daerah agar menjadi warga masyarakat yang selalu menjunjung nilai-nilai budaya sendiri yang dianggap “adhi luhung”.

### **C. Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, kurikulum dibutuhkan adanya perubahan setiap saat karena kurikulum akan selalu merespon adanya perkembangan dalam kehidupan, baik perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan sosial dan budaya, dan perkembangan politik.

Kedua, dalam perkembangan kurikulum harus memperhatikan beberapa unsur diantaranya, 1) peserta didik, 2) satuan pendidikan dan masyarakat, 3) peranan pengembang kurikulum terutama guru. Peserta didik sebagai obyek kurikulum harus mendapat mprioritas utama dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya satuan pendidikan dan masyarakat sebagai pengguna hasil pendidikan akan menjadi faktor terpenting dalam pengembangan, dan guru sebagai pelaksana kurikulum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dakir, 2004. *Pengembangan Kurikulum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depdiknas. 2005. *Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang undang-undang guru dan dosen*. Jakarta: Depdiknas.
- Hamalik, Oemar. 1995. *Kurikulum Dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Model-Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PPS UPI.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Harsono, Eko Budi. 2004. *Undang-undang tentang Pendidikan Agama Islam*. Tersedia di <http://www.suarapembaruan.com/news/2004/01/10/kesra/ke02.htm>. Diakses pada Tanggal 5 Juni 2015.
- Ibrahim & Kayadi. 1994. *Pengembangan Inovasi dalam Kurikulum*, Jakarta: UT Depdikbud.
- Ihsan, Hamdani dan A. Fuad Ihsan. 2007. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sumantri, Mulyani. 1988. *Kurikulum dan Pengajaran*, Jakarta: Proyek LPTK.
- Mulyasa. 2005. *Menjadi kepala sekolah profesional*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.
- Nasution. 1984. *Dasar-Dasar Kurikulum*, Jakarta: Pustaka Nasional.
- Oliva, P. 1992. *Developing The Curriculum 3rd ed*. New York: Harpers Collin Publisher,
- Purkey, W.W. 2003. *Self-Concept and School Achievement*. Englewood liffs, NJ: Prentice Hall.
- Reddy, S.K. 1992. *Educational and Psychological Measurement: Effects of Ignoring Correlated Measurement Error In Structural Equation Models*, Sage Published, Educational

Sulthon

and Psychological Measurement, 1992. 52:549 Do1. 10.1177/00131264492052003005.

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2004). *Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. *Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

\_\_\_\_\_. 2009. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

# **HOMESCHOOLING DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DAN UNDANG-UNDANG SISDIKNAS**

**Asrori**

ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama),  
Jawa Tengah, Indonesia  
asroaree@gmail.com

## **Abstrak**

Tulisan ini mengkaji tentang *homeschooling* dalam sudut pandang pendidikan islam dan undang-undang sisdiknas. Berdasarkan hasil analisis kepustakaan, diperoleh hasil bahwa *homeschooling* adalah sebuah kegiatan belajar yang dilakukan di rumah dan tidak di lembaga sekolah dengan sistem yang terprogram. Di Indonesia mempunyai pijakan yang sangat kuat yaitu berdasarkan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 27 termasuk pendidikan informal, dasar lain yang bisa di jadikan pijakan adalah dasar filosofi yaitu pembukaan UUD 1945 dimana pemerintah diwajibkan melindungi seluruh rakyatnya. Sedangkan *homeschooling* berdasarkan perspektif Pendidikan Islam mempunyai dasar dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dan telah di lakukan oleh para penyebar agama Islam yang telah mendidik masyarakat Islam dengan nilai-nilai al-Qur'an di surau, masjid dan pondok pesantren.

**Kata kunci: Homeschooling, Perspektif, Pendidikan, Islam**

## **Abstract**

*HOMESCHOOLING IN THE PERSPEKTIVE OF ISLAMIC EDUCATION AND SISDIKNAS RULES. This study aims to examine about home schooling in islamic education and sisdiknas rules point of view. Based on the analysis of literature, the result showed that homeschooling is a learning activity that is done at home and not in school institutions with programmed systems. Indonesia has a very*

*strong foundation to hold it. That is based on Law No. 20, 2003 Article 27, including informal education. Another foundation is the basic philosophy of the opening of UUD 1945 in which the government is obliged to protect all citizens. While based on the perspective of Islamic Education, homeschooling has basis in the Qur'an and Sunnah and has been done by Muslim missionaries who have educated Islamic society with the values of the Koran in the mosque and boarding.*

**Keywords:** *Homeschooling, Perspective, Islamic, Education*

## **A. Pendahuluan**

Anak dalam Islam adalah amanah yang diberikan Allah kepada hamba-Nya untuk dididik dan dipelihara sebaik-baiknya agar kelak kalau sudah dewasa memahami dan mengerti Tuhannya, mau mengerjakan segala kewajiban-kewajiban yang dibebankannya. Allah memberikan amanat kepada kedua orang tua tidak bisa secara pemaksaan sesuai dengan kehendak orang tua, tetapi itu adalah kehendak Allah dan sekaligus kepercayaan Tuhan kepadanya. Boleh juga anak merupakan titipan Allah yang suatu saat titipan itu akan diambil oleh pemiliknya tanpa permisi kepada orang tuanya. Sebagai orang yang dititipi, harus benar-benar memberikan yang terbaik untuk merawatnya, memeliharanya dan mendidiknya.

Kemauan dan kemampuan untuk mendidik dimiliki oleh setiap orang tua. Kemampuan tersebut ditampakkan ketika ibu mulai mengandung janin yang ada dalam perut, ia selalu merawat dan menjaganya sebaik mungkin agar tidak ada masalah atau penyakit yang menggangukannya. Bahkan dalam hal makan dan minum juga ia berhati-hati dan memilih-milih sesuai dengan kebutuhan si bayi. Amanat yang begitu berat inilah yang menyebabkan orang tua berusaha keras untuk memberikan pendidikan kepada anaknya dengan sebaik mungkin. Bahkan sering sekali orang tua dalam memasukkan anaknya ke sekolah selalu berpikir “nasib anakku kugadaikan pada sekolah X”. Memang benar bahwa nasib seorang anak kedepan banyak bergantung pada lembaga pendidikan yang mendidiknya. Fenomena ini yang menghantarkan orang tua berpikiran untuk menyekolahkan anaknya di lembaga-lembaga pendidikan yang favorit, karena mereka berasumsi, kesuksesan anak di masa mendatang tergantung kesuksesan anak ketika belajar di bangku sekolah. Selain amanat yang

besar kepada orang tua, juga hasrat keinginannya untuk menjadikan anak sukses dengan kategori menjadi pejabat, orang kaya dan bermoral yang menjadikan mereka harus mencari lembaga favorit dengan ekstra. Tapi apa yang terjadi ketika mereka sudah percaya sepenuhnya kepada lembaga pendidikan, sementara anaknya tidak juga sukses sesuai dengan harapannya? Mereka akan katakan bahwa percuma saja saya membiayai anakku dengan mahal.

Sekarang ini sebagian kecil orang tua sudah mulai berkembang sebagian masyarakat yang cenderung memiliki pola pikir/mindset ketidakpercayaan untuk menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat atas, hal ini karena disebabkan antara cita-cita yang ia harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Orang tua dalam rangka mencapai kesuksesan anaknya lebih percaya pada pendidikan di rumah inilah yang dinamakan *homeschooling*.

*Homeschooling* yang telah menjamur di masyarakat, keberadaannya perlu diperhatikan, mengingat pendidikan ini sangat bermanfaat bagi generasi bangsa, dapat mendorong orang tua untuk terlibat langsung dalam mendidik anaknya. Di samping itu, dilihat dari sisi perkembangan fasilitas pendidikan yang semakin pesat dengan adanya kemajuan teknologi berupa internet maka pendidikan ini sangat memungkinkan menjadi solusi keterbelakangan masyarakat Indonesia yang selama ini selalu diberitakan.

*Homeschooling* adalah pendidikan informal yang diakui oleh Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan informal ini merupakan fenomena baru yang masih langka sehingga banyak orang tidak mengerti bahkan mencemooh atau bahkan menganggap anaknya di penjara di rumah, karena itu pembahasan tentang *homeschooling* sangat menarik untuk di bahas, apa itu *homeschooling*, apa dasar hukumnya, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana dalam pandangan pendidikan Islam? Pertanyaan-pertanyaan ini akan di jawab dalam penelitian kepustakaan ini.

Dalam usaha menjawab permasalahan diatas, kajian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan. Studi kepustakaan dari sumbernya dibedakan menjadi dua bagian yaitu: kepustakaan konseptual dan kepustakaan penelitian. Kepustakaan konseptual meliputi konsep-konsep atau teori-teori yang ada pada buku-buku

dan artikel yang ditulis oleh para ahli yang dalam penyampaianya sangat ditentukan oleh ide-ide atau pengalaman para ahli tersebut.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian *Homeschooling***

*Homeschooling* adalah hal yang baru berkembang di masyarakat dengan pemahaman bahwa *homeschooling* merupakan sebuah kegiatan belajar yang dilakukan di rumah dan tidak di lembaga sekolah dengan sistem yang terprogram.

Tidak mudah untuk mencari pengertian *homeschooling*, tetapi pada hakekatnya *homeschooling* menurut Cambridge Dictionaries Online (2015) adalah 'the teaching of children at home, usually by parents'. Maksud dari kata *homeschooling* secara terminologi adalah pendidikan bagi anak-anak yang dilakukan rumah, khususnya dilakukan oleh orang tuanya. Selain itu, pengertian *homeschooling* secara istilah dapat ditemukan di dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yaitu pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan sistem yang terprogram yang diakui sama dengan pendidikan formal.

Sedangkan menurut (Sumardiono, 2007: 4), pengertian *homeschooling* adalah model pendidikan dimana sebuah keluarga memilih untuk bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anaknya dengan menggunakan rumah sebagai basis pendidikannya. Hal ini berarti orang tua bertanggung jawab dan terlibat langsung menentukan proses penyelenggaraan pendidikan, penentuan arah dan tujuan pendidikan, nilai-nilai yang hendak dikembangkan, kecerdasan dan keterampilan, kurikulum dan materi, serta metode dan praktek belajar.

Menurut undang-undang Sisdiknas, pendidikan ini bukan merupakan lembaga formal tetapi kedudukannya sama dengan pendidikan formal baik dari sisi kegiatan belajar maupun ijazah yang dikeluarkan untuk anak didiknya. Pendidikan *homeschooling* dapat diakui oleh pemerintah dikarenakan cara belajarnya dengan sistem yang terprogram dan juga di atur dalam Undang-Undang Sisdiknas.

## 2. Relevansi *Homeschooling* dalam Sistem Pendidikan Nasional

Supaya mengetahui ada dan tidaknya relevansi *homeschooling* dalam sistem pendidikan nasional maka perlu dipahami bagaimana sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional menurut 121 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 adalah, keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Komponen pendidikan menurut sistem pendidikan terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan lembaga satuan pendidikan. Arti pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pengertian ini terlihat ada sisi kontradiksi ketika mencermati kata berkualifikasi sebagai guru ketika hal itu diterapkan dalam *homeschooling*, dimana orang tua yang tidak berkualifikasi sebagai guru tidak secara pasti dia sebagai pendidik.

Berkaitan dengan kualifikasi pendidik, oleh pemerintah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi : (a) Kompetensi pedagogik (b) Kompetensi kepribadian (c) Kompetensi profesional (c) Kompetensi sosial.

Pasal 29 UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa kualifikasi pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:

1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (SI);
2. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak

usiadini, kependidikan lain, atau psikologi; dan

3. Sertifikasi profesi guru untuk PAUD.

Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (SI);
2. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan
3. Sertifikasi profesi guru untuk SD/MI.

Pendidik pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (SI);
2. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SMP/MTs, kependidikan lain, atau psikologi; dan
3. Sertifikasi profesi guru untuk SMP/MTs.

Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (SI);
2. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SMA/MA, kependidikan lain, atau psikologi; dan
3. Sertifikasi profesi guru untuk SMA/MA.

Mencermati penjabaran kualifikasi tersebut, seorang pendidik pada *homeschooling* hendaknya orang tua yang akan menjadi guru di rumah haruslah memenuhi syarat kualifikasi tersebut dan kalau tidak bisa memenuhinya maka harus memanggil guru untuk mendidik anaknya di rumah. Sedangkan arti tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Arti peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Adapun satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Sedangkan tujuan pendidikan menurut pasal (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.

Menurut pengertian dan tujuan sistem pendidikan nasional yang ada dalam undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 *homeschooling* sangat relevan dengan di Indonesia dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia hanya saja bila orang tua tidak memiliki kualifikasi yang memadai untuk menjadi guru bagi anaknya ia harus memanggil guru untuk mengajar di rumah dan ini membutuhkan biaya yang mahal.

Relevansi *homeschooling* bisa dilihat juga pada sisi sejarah pendidikan di Indonesia. *Homeschooling* pernah juga dilakukan oleh bapak pejuang kita di zaman Belanda yaitu KH. Agus Salim. Pada saat itu orang-orang berusaha ingin bisa bersekolah di sekolah yang dikelola Pemerintah Belanda kalau sekarang SD Negeri. Pada saat itu Agus Salim menempuh jalan yang berbeda yakni mendidik anak-anaknya yang berjumlah sepuluh anak di didik di rumah oleh dirinya sendiri sebagai gurunya. Baginya anak adalah sesuatu yang sangat istimewa, dia tidak ingin anak-anaknya dididik oleh orang-orang Belanda yang berbeda ideologi dengan bangsa dan agama.

Melihat sejarah tersebut *homeschooling* dapat dikatakan sangat relevan dengan pendidikan yang ada di tanah air dimana hal itu telah dilakukan oleh para pakar pendidikan di zaman penjajahan. Hal itu terlepas dari argumentasi Agus Salim dalam mendidik anaknya yaitu karena berbeda ideologi dan agama. Tapi yang perlu dijadikan pijakan bahwa *homeschooling* telah menunjukkan keberhasilan bagi anak didiknya di masa penjajahan.

Begitu juga yang dilakukan oleh pejuang kita Ki Hajar Dewantoro yang menerapkan *homeschooling* dalam pendidikan di Taman Siswa yang didirikan pada tahun 1922. Pendidikan menurutnya harus mencakup tiga prinsip dasar yaitu "*Ing ngarso sung*

*tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*” yang artinya di depan dapat menjadi tauladan, di tengah dapat memberi bimbingan dan di belakang dapat memberi dorongan Di Taman Siswa anak di latih untuk mencari jati dirinya sendiri dengan menggali potensi yang telah di karuniakan Allah. Beliau menggunakan prinsip bahwa Allah memberikan potensi pasti sesuai dengan kebutuhan zaman dan kebutuhan individunya, karena itu ia tidak pernah membedakan anak didik itu ada yang bodoh dan ada yang pintar, semuanya sama, tinggal seberapa besar anak mampu mengolah potensi yang ada pada dirinya dan itu perlu pemantauan orang tua yang sangat ketat.

Mencermati prinsip yang digunakan oleh Ki Hadjar Dewantoro, *homeschooling* berdasarkan sejarah telah menuai kesuksesan dan hal itu sangat relevan dengan sistem pendidikan nasional sekarang ini. Dimana anak dipantau oleh orang tua secara ketat dan anak didik tidak di anggap sebagai anak yang bodoh atau juga pintar, tetapi yang penting adalah meningkatkan potensinya. Lain halnya kalau di bangku sekolah, sampai saat ini masih aja ada guru yang menganggap anak didiknya itu bodoh atau pintar. Ini merupakan kesalahan yang harus mendapat perhatian serius dari orang tua yang menyekolahkan anaknya di lembaga sekolah.

### **3. Dasar Hukum *Homeschooling***

*Homeschooling* telah mendapat kekuatan hukum yang sangat kuat dan posisi yang strategis dalam sistem pendidikan nasional, yakni telah diakomodir dalam undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Dengan diikutsertakanya *homeschooling* dalam UU Sisdiknas menambah semakin jelasnya program pendidikan ini dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya.

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan danmembentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan berdasarkan tujuan pendidikan nasional yaitu bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.

Atas dasar fungsi dan tujuan tersebut, Pasal 27 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengatur *homeschooling* dengan menyebutnya pendidikan informal yaitu kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri ( Ayat 1). Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan (Ayat 2). Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27 UU Sisdiknas telah meletakkan dasar yang kokoh bagi baerjalannya *homeschooling* di masyarakat Indonesia. Selain dasar hukum, bisa juga dijadikan pijakan dasar filosofis bahwa dalam pembukaan UUD 1945 mengamanatkan Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dasar filosofis merupakan dasar yang kuat pula untuk bisa menyelenggarakan *homeschooling* bagi warga negara Indonesia. Hal itu terkafer dalam amanat yang menyebutkan bahwa Republik Indonesia wajib melindungi seluruh warga Indonesia dalam mencerdaskan warganya. Selain dasar filosofis, bisa juga digunakan dasar sosiologis, bahwa secara sosiologis masyarakat Indonesia telah menjalankan pendidikan dengan sistem *homeschooling* sejak zaman penjajahan Belanda misalnya Ki Hadjar Dewantoro dan Agus Salim. Hal ini menunjukkan bahwa *homeschooling* juga telah ikut memberikan peran aktifnya dan kontribusinya dalam mencerdaskan anak didik di Indonesia ini.

#### **4. Sistem Pelaksanaan *Homeschooling***

*Homeschooling* sebagai pendidikan informal dilakukan di rumah dengan sistem terprogram. Terprogram disini memiliki makna selain dilaksanakan secara sistematis tetapi dalam segi materinya dilaksanakan dengan mengacu pada kurikulum yang memadahi yang ditetapkan oleh negara. Kurikulum yang menjadi acuan dapat

menggunakan dasar kurikulum yang telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Dijelaskan pada Pasal 6 menyebutkan bahwa:

1. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
  - a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
  - b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
  - c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
  - d. Kelompok mata pelajaran estetika
  - e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan.
2. Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.

Sebagai contoh pembelajaran di *homeschooling* pada pelajaran matematika: Belajar matematika tidak hanya bisa dilakukan melalui mengerjakan latihan soal di lembar kerja. Untuk bisa mengerjakan *worksheet* sebaiknya anak harus terlebih dahulu diajarkan konsep dan menerapkan konsep tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Misalkan belajar ikatan bilangan dengan menggunakan balok atau bermain congklak untuk melatih anak memperkirakan atau mengestimasi jumlah sekelompok benda. Untuk mendapatkan ide-ide mengenai mengajarkan konsep matematika untuk anak usia dini silahkan klik di internet. Di website yang dimiliki oleh *Public Schools of North Carolina*, kita bisa mendapatkan berbagai kegiatan menarik untuk anak belajar matematika dari mulai TK sampai dengan grade 12. Jenis kegiatannya bisa dilihat berdasarkan topik atau minggu. Bahan pendukung untuk setiap permainan juga disediakan untuk diprint.

Adapun untuk mendapatkan ijazah dalam negeri kita bisa mendaftarkan anak kesalah satu komunitas *homeschooling* seperti “Berkemas” atau lembaga PKBM terdekat.

##### **5. Nilai Kompetitif dan Kelemahan *Homeschooling***

Menurut Randa (2015), ada kelebihan dan kekurangan

*homeschooling*. Adapun kelebihanannya yaitu:

1. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kondisi keluarga
2. Kegiatan pembelajarannya bisa lebih fokus
3. Lebih memberikan peluang kemandirian dan kreativitas individual yang tidak didapatkan di sekolah
4. Memaksimalkan potensi anak SN sejak usia dini dan mengikuti standar waktu yang ditetapkan oleh *homeschooling*
5. Kesesuaian pertumbuhan nilai-nilai anak dengan keluarga relatif terlindung dari paparan nilai dan pergaulan yang menyimpang
6. Biaya pendidikan disesuaikan dengan keadaan orang tua, home schooling dapat menjadi alternatif bentuk layanan pendidikan bagi anak autis.

Sedangkan kekurangan *homeschooling* (Randa: 2005) adalah sebagai berikut:

1. Butuh komitmen dan keterlibatan tinggi dari orang tua
2. Sosialisasi dengan teman sebaya menjadi relatif rendah,
3. Anak relatif tidak terekspos dengan pergaulan yang heterogen secara sosial
4. Perlindungan orang tua dapat memberikan efek samping ketidakmampuan menyelesaikan situasi sosial dan masalah yang kompleks yang tidak terprediksi sebelumnya
5. Kematangan kepribadian anak otomatis terlambat karena jarang terpapar dengan masalah interaksi sosial.

Sekarang pilihan kembali ke kita, orang tua. Kitalah yang paling tahu apa yang paling dibutuhkan anak kita. Jangan memaksakan anak untuk mengikuti sekolah mainstream jika memang anak kita tidak mampu. Terima mereka apa adanya. Anak merupakan ciptaan Tuhan yang paling indah.

## **6. *Homeschooling* dalam Perspektif Pendidikan Islam**

### **a. *Pengertian Pendidikan Islam***

Pendidikan dalam pengertian umum tentu pengertiannya sama dengan pendidikan konvensional, tetapi di tulisan ini yang menjadi perbedaan adalah pada kata “Islam”, kata ini dalam pendidikan Islam menunjukkan suatu ciri tertentu dan anatomi tertentu dari pendidikan

pada umumnya. Apa itu pendidikan Islam?

Pendidikan menurut Marimba (1989: 19) adalah bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik agar terbentuk kepribadian yang utama. Sedangkan menurut Tafsir (2005: 45) pendidikan adalah, berbagai usaha yang dilakukan oleh seseorang pendidik terhadap anak didik agar tercapai perkembangan maksimal yang positif. Usaha itu banyak macamnya antara lain dengan cara mengajarnya yaitu, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak didik. Bisa juga dilakukan dengan memberikan contoh atau tauladan dan baik juga merupakan usaha dalam mendidik anak.

Kata “pendidikan” yang umum kita gunakan sekarang, dalam bahasa Arabnya adalah “*tarbiyah*”, dengan kata kerja “*rabba*”. *Rabba* *yarubbu* artinya memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga dan memelihara. Sepadan dengan kata tersebut adalah kata “pengajaran” dalam bahasa Arabnya adalah “*ta’lim*” dengan kata kerjanya “*alama*”. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya “*tarbiyah wa ta’lim*” sedangkan “pendidikan Islam” dalam bahasa Arabnya adalah “*tarbiyah islamiyah*”. Kata kerja “*rabba*” (mendidik) sudah digunakan pada zaman nabi Muhammad saw. (Drajat, 2000: 25). Bisa disimpulkan *Tarbiyah* berarti sebuah usaha menjaga dan memelihara, mengembangkan potensi berdasarkan bakat anak, dan mengerahkan segenap usaha dalam mengembangkan potensi tersebut secara bertahap untuk mencapai kesempurnaan. Pendidikan secara teoritis mengandung pengertian “memberi makan” (*opvoeding*) kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohaniah, juga sering diartikan dengan “menumbuhkan” kemampuan dasar manusia. (Arifin, 1991: 32). Perlu dilihat apa saja unsur dalam pendidikan, Tafsir (2005: 32) menyebutkan bahwa unsur pendidikan adalah:

1. Menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang dewasa
2. Mengembangkan seluruh potensi
3. Mengarahkan seluruh fitroh dan potensi menuju kesempurnaan
4. Dilaksanakan secara bertahap.

Melihat unsur-unsur tersebut, dapat diketahui bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seorang pendidik

kepada anak didiknya agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.

Melihat makna pendidikan tersebut bahwa pendidikan secara khusus itu ada dua yaitu pendidikan rumah dan pendidikan sekolah. Di sini Islam mengakomodir dua pendidikan tersebut dan tidak hanya pendidikan sekolah saja. Karena itu ada kemungkinan seseorang untuk memilih pendidikan rumah saja (*homeschooling*) bisa juga memilih pendidikan formal di sekolah. Sedangkan tujuan pendidikan menurut Islam adalah membangun anak untuk bisa mengerjakan dan bertanggung jawab terhadap hidupnya di dunia dan di akhirat. Dasar pengertian ini di ambil dari hadits Nabi: capailah kehidupan akhirat dengan apa yang dikaruniakan Allah tapi jangan lupa kebutuhan kehidupanmu di dunia. Dan dalam hadits yang lain: kejarlah dunia seakan kamu hidup selamanya dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan kamu besok meninggal.

#### ***b. Dasar Pendidikan Islam***

Al-Qur'an merupakan dasar pendidikan Islam yang utama karena di situlah sumber-sumber nilai yang bisa diberikan oleh anak didik. Dalam al-Qur'an di jelaskan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa tingkatan (Q.S.58:11). Ayat ini menunjukkan adanya orang-orang yang berilmu atau pendidik dan orang-orang yang mencari ilmu atau anak didik. Al-Qur'an sebagai sumber nilai perlu di kaji dan di kembangkan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi untuk kemajuan anak didik menjadi beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, maju dan mandiri (Al-Munawar, 2005: 8). As-Sunnah merupakan dasar yang kedua setelah al-Qur'an sebagai dasar pendidikan dalam Islam. Nabi sendiri mengatakan: Tuhanku mendidiku dengan pendidikan yang mulia. Abdullah (1994: 154) menjelaskan bahwa "mendidik dan memelihara" merupakan salah satu dari sekian banyak makna implisit yang terkandung dalam kata Rabb. Di sini di gambarkan bahwa Islam dalam hal pendidikan dimulai dari al-Qur'an kemudian dari as- Sunnah.

Sistem *homeschooling* juga mendapat perhatian khusus dari Nabi dengan hadisnya: orang tua yang mendidik anaknya itu lebih baik dari sedekah satu mud. Hadits ini menunjukkan adanya dasar yang

sangat kuat bagi sistem *homeschooling* di Indonesia bagi umat Islam.

### c. *Sistem Pendidikan Islam di Indonesia*

Islam di bawa ke Indonesia di bawa oleh para pedagang sambil mengajarkan nilai-nilai Islam. Bahkan didikan dan ajaran Islam mereka berikah dengan perbuatan, contoh dan suri tauladan. Misalnya mereka berlaku jujur, sopan, ramah, menepati janji dan sebagainya. Ini adalah bentuk implementasi dari nilai-nilai yang mereka ajarkan yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah (Zuhairini dkk: 1997: 20). Bentuk pendidikan ini kalau kita baca sekarang kita namai pendidikan informal sebagaimana dalam undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. sekarang pendidikan informal masyarakat menyebutnya *homeschooling*.

Pada era awal masyarakat dididik oleh para pedagang tempatnya di surau-surau, masjid dan kemudian baru berkembang pondok pesantren. Pada awal mulanya pesantren hanya untuk mendidik anak kyai supaya pandai seperti bapaknya, kemudian masyarakat sekitar juga ikut bergabung belajar bersama pak kyai, karena rumah yang jauh mereka kemudian menginap di tempat pak kyai dan membentuk sebuah pesantren. Melihat deskripsi ini pesantren merupakan langkah pendidikan yang sama dengan *homeschooling* dimana kiyai mendidik anaknya di rumah sebagaimana pendidikan *homeschooling* sekarang dengan mendidik anak-anaknya di rumah.

## C. Simpulan

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa *homeschooling* di Indonesia mempunyai pijakan yang sangat kuat yaitu berdasarkan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 27 termasuk pendidikan informal, dasar lain yang bisa di jadikan pijakan adalah dasar filosofi yaitu pembukaan UUD 1945 dimana pemerintah diwajibkan melindungi seluruh rakyatnya, begitu juga secara sosiologis pendidikan *homeschooling* juga sudah pernah di lakukan oleh para tokoh kemerdekaan Indonesia yaitu Ki Hadjar Dewantoro dan Haji Agus Salim. Sedangkan *homeschooling* berdasarkan perspektif Pendidikan Islam mempunyai dasar dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dan telah di lakukan oleh para penyebar agama Islam yang telah mendidik masyarakat Islam dengan nilai-nilai al-Qur'an di surau, masjid dan pondok pesantren.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdurrahman Saleh. 1994. *Educational Theory Al-Qur'an Quranic Outlook*. Diterjemahkan oleh H.M. Arifin dan Zainuddin. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Al-Baynuni, Ahmad Izzudin. 1987. *Pendidikan Anak Menurut Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. 2005. *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'an Dalam Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Ciputat Press.
- Arifin, M. 1991. *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ashraf, Ali. 1996. *Horison Baru Pendidikan Islam*. Diterjemahkan oleh Sori Siregar. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Bakri, Qosim, dkk. 1992. *At-Tarbiyatu Wa Ta'lim*. Ponorogo: Darussalam Press.
- Cambridges Dictionary Online. 2015. Tersedia di <http://dictionary.cambridge.org/english/homeschooling>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2015.
- Drajat, Zakiah. 2000. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Marimba D, Ahmad. 1989. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: al-Ma'arif.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Randa, Valencia Mieke. 2015. *Kelebihan dan Kekurangan Homeschooling*. Tersedia di <http://www.parenting.co.id/dunia-mama/kelebihan+dan+kekurangan+homeschooling+untuk+abk>. Diakses pada Tanggal 22 Maret 2015.
- Sumardiono. 2007. *Homeschooling, Lompatan Cara Belajar*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sutrisno. 2006. *Fazlur Rahman Kajian terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Asrori

Tafsir, Ahmad. 2005. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Zuhairini dkk. 1997. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara Jakarta.

**KONSEKUENSI PENDIDIKAN BAGI  
PEMELUK AGAMA LOKAL:  
Analisis Kebijakan Pendidikan**

**Moh. Rosyid**

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia  
mrosyid72@yahoo.co.id

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan menelaah tentang konsekuensi pendidikan bagi pemeluk agama lokal. Untuk itu, dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Perolehan data bersifat studi kasus dan sumber data berupa pelaku yang merespon atas kebijakan negara di bidang pendidikan agama dalam jenjang pendidikan formal. Pengumpulan data bersifat interaktif dan fleksibel meliputi perumusan, pembatasan masalah, dan informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peserta didik yang beragama lokal (agama Adam) harus mengikuti pendidikan formal dan menerima materi ajar pendidikan 'Pancasila', sebagaimana amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menuangkan materi kurikulum dan PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Disamping itu, peserta didik yang berusia produktif jika tidak dididik dalam pendidikan formal pada dasarnya mengekang keinginan luhur diri anak yang bertolak belakang dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1).

**Kata kunci: pendidikan, agama, samin**

*Abstract*

*THE EDUCATIONAL CONSEQUENCES FOR LOCAL*

*RELIGIONS PEOPLE (EDUCATION POLICY ANALYSIS).*

*This article aims at studying the education consequences for the local religions people. For that reason, in conducting the study author used a qualitative approach. The data achievement are case studies and data sources in the form of principals who responded over the State policy in the field of religious education in the level of formal education. Data collection is both interactive and flexible include formulation, restrictions on the issue, and the informant. The results of this research show that learners who are local religious people (the religion of Adam) should follow formal education and receive the teaching material of Pancasila education, as the mandate of the ACT Number 20 in 2003 that containing the curriculum material and government rule (PP) Number 55 in 2007 about religious education and religious affairs. In addition, learners who are productive if not trained in formal education basically curb the desire of the sublime self of the child flips with ACT Number 23 of 2002 on child protection article 9 paragraph (1).*

**Keywords:** education, religion, samin

## **A. Pendahuluan**

Produk hukum nasional secara eksplisit menegaskan bahwa pelaksanaan pendidikan menjadi tugas dan kewajiban negara terhadap warganya dan warga negara pun harus taat terhadap kebijakan negara, meskipun kewajiban tersebut secara eksplisit tidak tertera sanksi bagi warga negara yang tidak menaatinya, kecuali tindak pidana. Menyangkut agama di luar *frame* yang telah tertuang dalam produk hukum pun tidak mendapatkan porsi telaah (agama lokal) bagi pemeluknya. Hal tersebut perlu ditelaah dalam konteks kebijakan publik di bidang pendidikan khususnya ketika tidak proaktif terhadap pembelajaran agama. Tugas dan kewajiban negara tertuang dalam Pembukaan UUD '45 alinea ketiga "untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa". Diperkokoh dalam perubahan keempat naskah UUD '45 Bab XIII Pasal 31 (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Mengkaji perihal hak berpendidikan bagi warga negara menjadi hal penting untuk ditelaah, sejauhmana fasilitas negara sebagai penyelenggara pendidikan dikhususkan bagi warga negara yang mengalami 'kelainan' sosial sebagai pemeluk agama (lokal, baca: aliran kepercayaan) di luar enam agama menurut perundang-undangan. Masyarakat Samin Kudus yang memeluk agama lokal (agama Adam), sehingga (jika mengharapakan) apakah berhak mendapatkan pendidikan khusus?. Adapun respon masyarakat Samin dalam bidang pendidikan dengan tiga bentuk respon. Pertama, tidak mengikuti pendidikan formal, mendidik generasinya di rumahnya sendiri (mondokari), praktik pendidikan informal, dengan materi prinsip hidup dan pantangan hidup yang diwariskan leluhurnya dengan pendidik orang tuanya dan tokoh adatnya. Kedua, aktif mengikuti pendidikan formal dan tidak mau diwajibkan menerima mata ajar agama, dan ketiga, aktif dalam pendidikan formal dan mengikuti mata ajar agama. Ketiga bentuk respon tersebut yang mendapatkan konsentrasi dalam telaah ini adalah tipologi kedua.

Di sisi lain, sebagai warga negara berhak mendapatkan pendidikan, meskipun beragama Adam, agama lokal yang belum diakomodir oleh negara dalam konteks sebagai mata ajar (muatan kurikulum) pendidikan formal. Pemerintah pun mengakomodir kemandirian pendidikan keagamaan dalam PP 55 Tahun 2007 Pasal 12 (2) Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan bagi pemeluk agama lokal (masyarakat Samin Kudus) tersebut tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional, sealur amanat Pembukaan UUD '45 perubahan keempat Pasal 28 E (1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran. Pasal 28 I (1) hak beragama dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hal tersebut merupakan pemahaman sepotong yang perlu ditelaah secara detil, tidak berhenti pada sebatas kebebasan, tetapi kebebasan yang dibatasi UU. Pembukaan UUD '45 perubahan keempat Pasal 28 J (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. UU Nomor 39 Tahun '99 tentang HAM Pasal 73 hak dan kebebasan yang diatur dalam UU (HAM) hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan UU, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Kebebasan asasi yang melekat pada setiap individu bukan berarti bebas tak terbatas, tetapi dibatasi oleh UU itu sendiri. Pembukaan UUD '45 Pasal 28 G (1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Pasal 29 (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pendidikan khusus dalam jalur pendidikan merupakan permasalahan yang perlu dikaji karena kata 'khusus' diidentikkan dengan keleluasaan warga dalam melaksanakan pendidikan bagi generasinya. Karena esensi pendidikan tidak atas perbedaan keyakinan dan agama, tetapi kebutuhan dasar demi meningkatkan kualitas hidupnya, diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Rumusan masalah dalam kajian ini, bagaimanakah formulasi pendidikan layanan khusus bagi warga negara yang memeluk agama lokal?, Tujuan penelitian ini menemukan formulasi pendidikan layanan khusus bagi warga negara yang memeluk agama lokal dan untuk memahami dampak hukum yang diterima pemeluk agama lokal dalam praktik pendidikan agama dalam pendidikan formal. Sedangkan signifikansi penelitian ini terpilah atas signifikansi teoretis dan signifikansi praktis. Signifikansi teoretis berupa terbentuknya teori baru, hemat peneliti, belum banyak teori yang menopang kaitannya dengan topik ini yakni formula pendidikan layanan khusus bagi pemeluk agama lokal. Pendidikan layanan khusus diperuntukkan bagi penyandang kelainan sosial, intelektual, dan kelainan fisik, psikis,

serta kelainan fisik dan psikis. Signifikansi praktis penelitian ini ditemukannya formula ideal bagi masyarakat yang memeluk agama lokal ketika menolak pemberian materi ajaran agama 'Pancasila' dan proses pendidikan dapat terlaksana bagi masyarakat yang hanya membutuhkan pendidikan informal karena memegang ajaran leluhurnya, Samin. Alasan permasalahan tersebut dikaji karena belum ada formulasi pendidikan layanan khusus bagi warga negara yang memeluk agama lokal dan untuk mengkaji dampak hukum yang diterima pemeluk agama lokal dalam praktik pendidikan formal di bidang pengajaran agama.

Bangunan teori dalam naskah ini meliputi definisi pendidikan, definisi layanan pendidikan, definisi pendidikan khusus, definisi kebijakan, definisi kebijakan pendidikan, dan definisi pendidikan agama. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 (1) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Unsur yang dikembangkan bagi peserta didik di antaranya adalah kekuatan spiritual keagamaan. Adapun tujuan pendidikan dalam Pasal 3 untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Layanan pendidikan adalah aktivitas yang diperoleh peserta didik dari penyelenggara pendidikan dalam proses pembelajaran yang terpetakan atas sarana prasarana, proses pembelajaran, hingga keberhasilan pendidikan yang direngkuh oleh peserta didik dengan sukses. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32 (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Kebijakan dalam konteks ini bermakna kebijakan publik yakni (i) fakta strategis-politis yang mengedepankan aspek perumusan kebijakan dan (ii) fakta teknis antara menolak atau menerima kebijakan (Tilaar dan Riant, 2008: 185). Menurut Tilaar dan Riant (2008: 16) konsep kebijakan pendidikan merupakan hasil tindakan seseorang atau sekelompok pakar tentang rambu-rambu tindakan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sehingga kebijakan mengatur tingkah laku dalam pelaksanaan dan evaluasi yang menentukan bobot kebijakan.

Adapun aspek kebijakan pendidikan meliputi pertama, hakikat manusia sebagai makhluk yang dimanusiakan. Kedua, kebijakan pendidikan dilahirkan dari teori dan praktik pendidikan. Ketiga, mengembangkan perkembangan individu dan masyarakat yang berpendidikan. Keempat, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan harus melibatkan masyarakat karena proses pendidikan merupakan proses interaksi sosial. Kelima, berdasarkan riset pendidikan dan peran multidisiplin keilmuan sehingga dapat terimplementasi. Keenam, bahwa semua kebijakan (kebijakan publik) memerlukan analisis. Ketujuh, ditujukan bagi peserta didik. Kedelapan, diharapkan terbentuknya masyarakat demokratis, Kesembilan, berkaitan dengan penjabaran visi dan misi pendidikan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Kesepuluh, harus terlaksana dalam lembaga pendidikan atau masyarakat dengan mengedepankan efisiensi. Kesebelas, berdasarkan kebutuhan peserta didik, bukan berdasarkan kekuasaan. Kedua belas, berdasarkan kepentingan rakyat dan hasil olahan rasional, bukan berdasarkan intuisi atau irasional, ketiga belas, berpijak pada kejelasan tujuan pendidikan, dan keempat belas, kebijakan pendidikan diarahkan pada kebutuhan peserta didik, bukan kepuasan birokrat.

Penelitian kebijakan pendidikan berpijak dari fakta pendidikan untuk pijakan kebijakan pendidikan nasional. Penelitian ini bersumber dari realitas sosial masyarakat Samin Kudus yang merespon kebijakan pendidikan nasional pada jenjang pendidikan formal dalam menerima materi pendidikan agama 'Pancasila.' Naskah ini menggunakan kombinasi metode penelitian (i) pendekatan kepustakaan, berupa produk perundang-undangan dan pustaka lainnya, (ii) metode kualitatif yaitu penelitian dengan ciri menggunakan setting alami,

besifat deskriptif, menekankan proses, dengan pendekatan induktif, dan memberi perhatian terhadap makna, (iii) penelitian kasus yaitu penelitian secara mendalam terhadap unit sosial tertentu dengan cepat dan ekonomis, (iv) penelitian tindakan (action research), mengembangkan pendekatan baru dalam memecahkan masalah, dan (v) penelitian grounded, proses pencarian data sebanyak-banyaknya tanpa berbekal hipotesa bertujuan mendeskripsikan peristiwa dan memformulasikan penjelasan perihal munculnya peristiwa atas dasar observasi.

PP 55/2007 Pasal 1 (1) pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pasal 2 (1) Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama, (2) Pendidikan agama bertujuan berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Pasal 3 (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. (2) Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama. Pasal 4 (1) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama, (2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama, (3) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama, (4) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik, (5) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada

peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut peserta didik, (6) Tempat melaksanakan ibadah agama sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya, (7) Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 5 (1) Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan, (2) Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik, (3) Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (4) Pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat di antara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain, (5) Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab, (6) Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olahraga, (7) Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses, (8) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan, (9) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi.

Pasal 6 (1) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dan disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, (2) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, (3) Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat menyediakannya, maka Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakannya

sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Pasal 7 (1) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (7), dan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sampai dengan penutupan setelah diadakan pembinaan/pembimbingan oleh Pemerintah dan/atau pemda, (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a) satuan pendidikan tinggi dilakukan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama, b) satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan bupati/ walikota setelah memperoleh pertimbangan dari Kakandepag Kab./ Kota, c) satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan oleh Pemda menjadi bertaraf internasional dilakukan kepala Pemda yang mengembangkannya setelah memperoleh pertimbangan dari Kakanwil Depag Provinsi atau Kakandepag Kab./Kota, (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan agama sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, serta tentang pendidik pendidikan agama sebagaimana Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menag.

Penelitian berdasarkan pendekatannya terpilah dua, kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif meliputi (i) eksperimental murni, eksperimental kuasi, eksperimental lemah, subyek tunggal, (ii) noneksperimental deskriptif, komparatif, korelasional, survey, ekspos fakto, dan tindakan. Pendekatan kualitatif terpilah (i) interaktif meliputi etnografis, historis, fenomenologis, studi kasus, teori dasar, dan studi kritis, (ii) noninteraktif meliputi analisis konsep, analisis kebijakan, dan analisis historis (Nana, 2006: 53). Penelitian ini kategori studi kasus yang dilakukan komunitas Samin dalam merespon kebijakan negara di bidang pendidikan agama pada pendidikan formal.

Pendekatan penelitian kualitatif tertuang dalam telaah noninteraktif spesifikasi analisis kebijakan yang diarahkan menemukan konsekuensi positif atau negatif sebuah kebijakan pendidikan. Adapun kegunaannya (i) pengembangan teori, (ii) penyempurnaan praktik, (iii) penentuan kebijakan (memberikan sumbangan bagi perumusan, implementasi, dan perubahan kebijakan), (iv) klarifikasi isu dan

tindakan sosial, dan (v) sumbangan studi khusus (kontroversial) (Nana, 2006: 101). Kegunaan penelitian kualitatif dalam konteks naskah ini adalah untuk mewujudkan kelima kegunaan tersebut.

Penelitian di bidang pendidikan menurut Sudjana dan Ibrahim (2001: 6) dapat menggunakan dua pendekatan yakni positivistik (kuantitatif) atau naturalistik (kualitatif) hasil penelitian berupa deskriptif interpretatif, sedangkan tingkatan penelitian kualitatif dalam melihat derajat kepastian jawaban terpilah historis, eksploratif (penjajagan), deskriptif, *expost facto*, dan eksperimen. Menurut Sukmadinata (2006: 42) penelitian bidang pendidikan mencakup penelitian pendidikan dari segi ilmu (teori) pendidikan, praktik pendidikan, serta ilmu dan praktik pendidikan. Pertama, penelitian pendidikan segi teori terpilah (i) kajian filosofis (idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme), (ii) orientasi pendidikan (transmisi, transaksi, dan transformasi), dan (iii) konsep pendidikan (perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan teknologi kependidikan). Kedua, penelitian praktik pendidikan berdasarkan (i) kelompok usia (pendidikan keluarga, pendidikan luar sekolah, pendidikan di sekolah, pendidikan usia dini, dan pendidikan orang dewasa), (ii) jenjang (sekolah dasar, menengah, dan tinggi), (iii) bidang studi (agama, bahasa, seni, olahraga, kesehatan, dan sebagainya), (iv) jenis (pendidikan umum, kejuruan, khusus, dan luar biasa). Ketiga, penelitian pendidikan aspek teori dan praktik terpilah (i) kurikulum, (ii) pembelajaran, (iii) bimbingan konseling (BK), dan (iv) manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan terpilah teori manajemen, kepemimpinan, kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan penjaminan. Tujuan penelitian kualitatif dalam pendidikan menurut Sudjana dan Ibrahim (2001: 209) mendeskripsikan kegiatan pendidikan untuk menemukenali kekurangan/kelebihan agar disempurnakan dan menganalisis fakta pendidikan secara alami. Penelitian ini terfokus bidang kebijakan pendidikan berdasarkan fakta berupa respon masyarakat Samin Kudus dalam jenjang pendidikan formal ketika diwajibkan menerima mata ajar agama.

Jenis penelitian hasil pemilahan Suprayogo dan Tobroni (2001: 7) berdasarkan bidang keilmuan, metode analisis, dan kualifikasi hasil. Bidang keilmuan terpilah penelitian sosial yakni penelitian yang objeknya berupa gejala atau fenomena sosial

kemasyarakatan dan kebudayaan. Berdasarkan metode analisis terpilah kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif bertujuan memahami makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat dan datanya bersifat naturalistik dengan metode induktif dengan model pelaporan deskriptif dan naratif. Sugiyono (2006: 399) penelitian kualitatif biasanya berangkat dari permasalahan remang-remang, kompleks dan mendalam, mengkonstruksikan fenomena sosial yang rumit, dan menemukan hipotesa dan teori. Sedangkan analisis kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena berdasarkan perspektif peneliti dengan model statistik, biasanya populasinya luas, permasalahannya jelas, teramati dan terukur, dan menguji hipotesis. Berdasarkan kualifikasi hasil, kategori penelitian dasar (*basic research*) dan terapan (*applied research, operation research, action research*).

Berdasarkan bidang keilmuan dikategorikan jenis penelitian keilmuan sosial-budaya yang berobjekkan realitas sosial-budaya masyarakat Samin Kudus yang merespon kebijakan pemerintah dalam jalur pendidikan formal untuk mata ajar agama 'Pancasila'. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah kualitatif karena memahami perilaku sosial berdasarkan perspektif masyarakat Samin Kudus dalam memenuhi kebutuhan hidup asasi berupa memperoleh pendidikan formal. Penelitian ini kategori penelitian terapan bertujuan memahami masyarakat Samin Kudus ketika merespon kebijakan pemerintah bidang pendidikan formal dalam menerima materi ajar agama 'Pancasila'.

Lokus penelitian ini adalah masyarakat Samin Kudus dengan pertimbangan (i) peneliti telah menelitinya pada tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009 dengan menekankan aspek persebaran, geneologi, keberagamaan, dan perkawinan. Menurut penulis, belum menemukan penelitian yang mengulas sepak-terjang dan bentuk responnya (perlawanannya) terhadap kebijakan pemerintah dalam jalur pendidikan formal untuk mata ajar agama 'Pancasila' dan (ii) belum ditemukan kajian khusus tentang perlawanan dalam pelaksanaan pendidikan formal.

Naskah ini menggunakan pendekatan kualitatif, perolehan data bersifat studi kasus dan sumber data berupa pelaku yang merespon atas kebijakan negara di bidang pendidikan agama dalam jenjang pendidikan formal. Pengumpulan data bersifat interaktif dan

fleksibel meliputi (i) perumusan, pembatasan masalah, dan informan, (ii) dengan sumber data dan (iii) melengkapi data (Sukmadinata, 2006: 114). Pengumpulan data dalam penelitian terdiri observasi, kuesioner, wawancara, dokumentasi, etnografi, gabungan ketiganya (triangulasi) atau analisis antarkomponen (Sugiyono: 2006: 193). Menurut Sudikan (2001: 105) analisis antarkomponen dengan tujuan mengombinasikan dan memformulasikan seluruh teknik pengumpulan data secara padu. Sedangkan langkah penelitian kebijakan (i) mengidentifikasi kondisi lingkungan sosial-politik, (ii) konseptualisasi studi, (iii) analisis teknis, (iv) perumusan rekomendasi, dan (v) mengkomunikasikan hasil studi (Danim, 2005: 9).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bentuk strategi multimetode yakni cara menggabungkan berbagai metode sesuai dengan tarjet data yang diraih dengan harapan penyempurnaan sumber data. Adapun metode tersebut meliputi metode penelitian pendidikan dari segi ilmu (teori) pendidikan, praktik pendidikan, ilmu dan praktik pendidikan, dan metode kebijakan pendidikan. Untuk memperkuat keterandalan data, Endraswara (2006: 111) mengedepankan aspek kredibilitas, transferabilitas, auditabilitas dan dependabilitas (reliabilitas), konfirmabilitas, dan triangulasi.

## **B. Pembahasan**

### **1. Masyarakat Samin**

Masyarakat Samin Kudus adalah komunitas yang hidup di pedesaan dan mayoritas berprofesi petani, tangguh, berprinsip dan berpantang hidup yang diajarkan leluhurnya melalui tradisi lisan berupa pantangan untuk tidak *Drengki*; membuat fitnah, *Srei*; serakah, *Panasten*; mudah tersinggung atau membenci sesama, *Dawen*; mendakwa tanpa bukti, *Kemerren*; iri hati/syirik, keinginan untuk memiliki barang yang dimiliki orang lain, *Nyiyo Marang Sepodo*; berbuat nista terhadap sesama penghuni alam, *Bejok reyot iku dulure, waton menungso tur gelem di ndaku sedulur* (menyia-nyiakan orang lain tidak boleh, cacat seperti apapun, asal manusia adalah saudara jika mau dijadikan saudara). Sedangkan pantangan hidupnya dalam berinteraksi meliputi *bedok*; menuduh, *colong*; mencuri; *pethil*;

mengambil barang (barang yang masih menyatu dengan alam atau masih melekat dengan sumber kehidupannya) misalnya: sayur-mayur ketika masih di ladang, *Jumput*; mengambil barang (barang yang telah menjadi komoditas di pasar) misalnya: beras, hewan piaraan, dan kebutuhan hidup lainnya, *Nemu Wae Ora Keno*; menemukan menjadi pantangan.

Adapun lima pantangan dasar ajaran Samin meliputi: tidak boleh mendidik dengan pendidikan formal dan nonformal, tidak boleh bercelana panjang, tidak boleh berpeci, tidak diperbolehkan berdagang, dan tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu. Pertama, tidak diperbolehkan mendidik anak melalui pendidikan formal (sekolah) dan pendidikan nonformal (kursus), anak hanya dibekali pendidikan informal (pendidikan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya sendiri dalam rumah tangganya) bermaterikan prinsip dasar beretika. Tidak aktif pada pendidikan formal, menurut analisis penulis, dengan tujuan (a) jika melaksanakan pendidikan formal, maka merangsang anak untuk membaca dan menulis, kedua kemampuan itu mengarahkan dan merangsang anak memenuhi syarat formal menjadi pekerja di luar pertanian, imbasnya anak akan bekerja di luar pantauan orang tua dan timbul suatu harapan untuk melepaskan ikatan kekeluargaan. Hal ini pernah dialami oleh Bpk. Awini (warga Samin Larekrejo) menjadi pekerja industri di Kota Tangerang, Jawa Barat, dan mendapatkan pasangan hidup, tetapi bercerai, dan (b) jika melaksanakan pendidikan formal berdampak komunikasi dengan masyarakat umum dengan luas-terbatas, maka anak akan mudah terangsang dengan budaya yang selama ini dijauhi oleh Samin, misalnya, menikah dengan orang selain pengikut Samin.

## **2. Konsekuensi yang Diterima Pemeluk Agama Lokal dalam Praktik Pendidikan Agama pada Pendidikan Formal**

Substansi agama menjadi dasar pelaksanaan pendidikan nasional, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sehingga jenjang dan materi pendidikan agama sesuatu yang harus disajikan kepada peserta didik. Diperkuat PP 55

Tahun 2007 Pasal 3 (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Pasal 6 (1) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah disediakan oleh Pemerintah atau pemda sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, (2) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, dan (3) Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat menyediakannya, maka Pemerintah dan/atau pemda wajib menyediakannya sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Pertama, penyediaan pendidik agama oleh Pemerintah atau Pemda mempertimbangkan kebutuhan yang sifatnya kondisional. Maksudnya, sangat ditentukan kemampuan keuangan pemerintah dalam menyediakan tenaga didik (guru agama) yang menapaki posisi terendah dibanding tenaga lainnya yang direkrut pemerintah atau Pemda. Kedua, penyediaan pendidik agama oleh penyelenggara satuan pendidikan pun pesimis, dengan pertimbangan pengadaan guru bidang studi selalu terhalang keuangan, apalagi pengadaan guru aliran kepercayaan (agama lokal) yang berposisi minoritas. Ketiga, Jika penyelenggara pendidikan tidak mampu menyediakan (mengadakan) guru agama, maka pemerintah/Pemda wajib menyediakannya. Pengadaan guru agama sangat mungkin direspon oleh Pemerintah, tetapi pengadaan guru agama (aliran kepercayaan) menjadi sesuatu yang jauh panggang daripada api.

### **3. Eksistensi Aliran kepercayaan/ Kebatinan**

Untuk memperoleh legalitas, aliran kebatinan mengadakan simposium nasional tanggal 7-9/11/'70 di Yogyakarta yang menghasilkan simpulan bahwa kata 'kepercayaan' yang tertuang dalam UUD '45 Pasal 29 ayat 2 bahwa kepercayaan (kebatinan, kejiwaan, dan kerohanian) disamakan/disejajarkan dengan agama. Tanggal 27-30/12/'70 diselenggarakan Munas I di Yogyakarta berhasil membentuk Sekretariat Kerja Sama Kepercayaan (kebatinan, kejiwaan, dan kerohanian) [SKK] sebagai wadah pengganti Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI). Sejak saat itu, istilah 'kebatinan' digantikan 'kepercayaan'. Ketika sidang MPR-RI tahun

1973,1978, dan 1983 memasukkan 'kepercayaan' dalam GBHN sebagaimana Tap MPR Nomor IV 'bidang agama dan kepercayaan terhadap TYME, sosial budaya'. Tetapi Tap MPR Nomor IV/MPR/'78 dan '83 serta tap dalam GBHN '88 bahwa 'Kepercayaan' terhadap TYME tidak merupakan agama dan pembinaannya tidak mengarah pada pembentukan agama baru. Berlandaskan Pidato Presiden di hadapan DPR RI tanggal 16/8/'78 bahwa kepercayaan merupakan bagian dari kebudayaan nasional dan merupakan budaya yang hidup dan dihayati oleh bangsa. Pada tahun 1978, 'kepercayaan' yang semula berada dalam wewenang Depag -pelaksanaannya pada subbag umum pada bagian TU Kanwil Depag Provinsi- dialihkan pada Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap TYME di bawah Dirjen Kebudayaan, Depdikbud, berdasarkan Keppres Nomor 27/'78 tanggal 31/8/'78.

Berdasarkan Keputusan Menteri P dan K tanggal 30/6/'79 Nomor 0145/0/,79 ditetapkan tugas pokok Direktorat PPK adalah pembinaan kehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap TYME berfungsi (1) mempersiapkan perumusan kebijakan teknis pembinaan penghayat kepercayaan terhadap TYME sesuai kebijakan teknis Dirjen, (2) menyusun materi dan program pembinaan penghayat kepercayaan terhadap TYME, (3) penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan serta melaksanakan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap TYME, dan (4) melakukan penelitian atas pelaksanaan kegiatan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap TYME (Ridin, 1999: 6).

Kongres IV tahun 1960 di Malang menyimpulkan bahwa dasar kebatinan adalah Tuhan Yang Maha Esa, agama menitikberatkan penyembahan kepada Tuhan, sedangkan kebatinan menekankan pengalaman batin dan penyempurnaan manusia. Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN, pembinaan penghayat Kepercayaan terhadap TYME berada di bawah Depag. Tetapi GBHN 1978 menegaskan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan agama, sehingga bukan wilayah kerja Depag, yang berbunyi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan agama dan pembinaannya dilakukan (1) agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru, (2) untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang

perlu agar pelaksanaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dasar Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (ketentuan ini mengalami perubahan dalam GBHN 1983 dan 1988). Maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden nomor 27 dan 40 tahun 1978, pembinaan aliran ini berada di bawah Dirjen Kebudayaan, Depdikbud. Pedoman yang ditetapkan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan budaya spiritual berunsurkan tuntunan luhur dalam wujud perilaku, hukum dan ilmu suci, yang dihayati penganutnya dengan hati nurani dalam kesadaran dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penghayatan dilakukan dengan membina keteguhan tekad dan kewaspadaan batin serta menghaluskan budi pekerti dalam tata pergaulan menuju kebersihannya jiwa (hati) dan kedewasaan rohani (spiritual) untuk mencapai kesejahteraan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di alam kekal. Pada sarasehan nasional tahun 1981 ditegaskan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau peribadatan serta pengamalan budi luhur (ENI, Jilid VIII, 2004: 379).

#### **4. Solusi**

Anak usia 7 s.d 15 tahun wajib mengenyam pendidikan (wajib belajar) di bawah tanggung jawab orang tua. Sedangkan negara berkewajiban memfasilitasi berupa hard ware (lembaga pendidikan beserta kebutuhan pendidikan) dan soft ware (kurikulum dan kebijakan). Kurikulum di dalamnya menyertakan mata ajar pendidikan agama (agama yang tertera dalam perundangan). Konsekuensinya, jalan tengah sebagai fase awal yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan adalah menerapkan pendidikan hukum dan HAM dan pendidikan multikultural. Kedua konsep ini sebagai fondasi terciptanya saling hormat-menghormati antarsesama manusia yang berbeda agama, budaya, ras, dan golongan.

#### **5. Pendidikan Hukum dan HAM**

Hukum adalah panglima, tetapi hukum pula membuat manusia menjadi kebal hukum atau lunglai jika menjadi penegak hukum. Analisis Hendar di kewajiban (*obligation*) negara guna

melindungi hak atas kebebasan (*the right to liberty/freedom*) terhadap warga negaranya terpilah atas pertama, tersedianya perangkat hukum atau undang-undang yang menjamin hak atas kebebasan, terutama yang disebut kebebasan-kebebasan dasar (*fundamental freedom*) yaitu kebebasan beragama, berpikir, dan berkeyakinan untuk dijadikan rujukan bersama. Kedua, harus dipastikan, tiap orang yang mengecap kebebasan dasar mendapat perlindungan dari penegak hukum (*law enforcement officials*). Misalnya para pelaku kebebasan ini tidak diganggu, tidak diancam, tidak diintimidasi, dan tidak dianiaya. Ketiga, memastikan suatu pencapaian atas independensi dan imparialitas sistem peradilan dalam menjalankan penegakan hukum (*law enforcement*). Selanjutnya mengapa kebebasan beragama dikategorikan kebebasan fundamental? Karena kebebasan itu hak alamiah dan bersifat kodrati yang bukan hak bagi manusia (*right for itself*) akan tetapi melekat pada diri seseorang (*right in itself*). Dalam analisis Hendar di selanjutnya, kebebasan beragama tercantum dalam Pasal 18 Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan hak politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan Pasal 28 E ayat 1 dan 29 UUD'45 yang belum ada penjelasan lebih lanjut dalam menjamin kebebasan beragama.

Mengulas HAM menurut Ufuan dalam tulisannya yang termuat dalam Harian Kompas, 27/8/2007, terpilah HAM absolut dan relatif. HAM absolut adalah HAM yang dalam situasi apa pun tak boleh dikurangi dan dilanggar siapa pun sesuai prinsip nonderogable human rights, seperti: (i) hak untuk hidup, (ii) tidak disiksa, (iii) kebebasan pribadi, pikiran dan nurani, (iv) kebebasan beragama, (v) tidak diperbudak, (vi) persamaan di muka umum, dan (vii) hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Sedangkan HAM relatif adalah penggunaannya dibatasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti: kebebasan media dibatasi oleh kode etik jurnalistik, kode etik penyiaran, dan kebebasan berpendapat dibatasi oleh aneka kewajiban yang tertuang dalam undang-undang. Sehingga muncul perbedaan antara Hak Manusia (HM) dengan Hak Asasi Manusia (HAM). HM adalah hak yang mendapat pengakuan internasional, dibela, dan dipertahankan internasional, sedangkan HAM bagian integral UUD, bersifat yuridis, statis, dan terkait satu negara. Misalnya, perkawinan sejenis di negara lain tidak bisa

dipaksakan di Indonesia, sebab tidak diatur dalam UUD '45. Jadi, tidak semua hak dapat dikategorikan sebagai HAM karena pengaturannya dalam UUD, UU organik, dan perjanjian internasional.

Menghormati HAM adalah esensi negara konstitusi harus melaksanakan (1) negara dibentuk atas dasar proklamasi dan disahkannya UUD '45, (2) terciptanya fungsi pelayanan, memperbaiki kondisi perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, (3) keberadaan UUD '45 sebagai hukum tertinggi dalam pengaturan lembaga negara, (4) UUD '45 menjadi acuan penyusunan perundangan, (5) dalam konstitusinya, republik konstitusional selalu didasarkan atas kewajiban negara (*obligation of State*) untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi atau mempromosikan HAM, dan (6) republik konstitusional harus didasarkan konstitusi yang selalu bersifat terbuka atas perubahan dan perkembangan (*berwatak visioner*) (Benny, dalam Kompas, 18/8/2007).

UU Nomor 39 Tahun '99 tentang HAM Pasal 1 (1) HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 8, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab pemerintah. Pasal 12, setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan HAM.

Kaitannya dengan hak beragama, Pasal 22 (1) setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu dan (2) negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan Pasal 71, pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam UU, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara RI.

Perlu memahami sejarah diprodukannya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM, dan PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Dalam analisis Saifur (2009) adanya UU tersebut tidak muncul dari kehampaan. Adanya *Universal Declaration of Human Right* tanggal 10/12/1948 diawali dengan trauma Perang Dunia II karena nilai-nilai seperti kebebasan, persaudaraan, dan kebahagiaan dirumuskan sesuai dengan sistem ideologi, tata norma, dan situasi ruang-waktu yang melekat pada warga Barat saat itu dan disusul dengan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat) tanggal 9/12/1975. Dilanjutkan dengan program aksi Wina tahun 1993 sebagai desakan terhadap percepatan universalisasi HAM. Pemerintah RI baru menandatangani pada tanggal 23/10/1985 dan diratifikasi pada tahun 1998 dalam bentuk UU Nomor 5/1998.

Dalam dokumentasi Harian Kompas (14/12/2009) bahwa gagasan tentang HAM sering kali yang tampak sebagai 'hak' warga negara -yang bisa dipenuhi bisa tidak- dari pada 'kewajiban' -negara semestinya memenuhinya-. Cakupan HAM tidak hanya hal prinsip hidup merdeka, hal sipil dan politik, hak hidup dan berbicara, juga mencakup hak ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 1/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Meskipun terdapat produk hukum yang berpotensi mengabaikan hak warga negara, seperti (i) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (investor yang membuka lapangan kerja dengan memangkas perlindungan kesejahteraan terhadap buruh), (ii) UU 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang memberi keleluasaan perusahaan swasta menguasai dan mengomersialkan sumber air yang menjadi hajat hidup rakyat, meniadakan akses warga kepada sumber air bersih juga menyebabkan kerusakan lingkungan, (iii) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Mengakomodasi pemodal asing di sektor strategis kehutanan dan pertambangan, hak penggunaan atas tanah untuk jangka waktu lebih lama serta menghapus pajak impor, (iv) PP Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas penerimaan Negara

Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan. Hal ini memungkinkan perusahaan tambang mengubah hutan lindung dan produksi menjadi kawasan tambang skala besar dengan biaya sangat murah.

## **6. Pendidikan Multikultural**

Pendidikan multikulturalisme merupakan respons terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok yang beranggapan bahwa peserta didik memiliki lima ciri yakni (i) mampu dan mau, (ii) ingin berkembang, (iii) berlatar belakang berbeda, dan (iv) memiliki potensi dasar pada dirinya (Mahfud, 2008: 177). Pendidikan multikultural menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pemanfaatan keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, jender, kemampuan, dan ras (Yaqin, 2005: 5).

Dengan memahami hal tersebut maka muncul paradigma pendidikan multikultural yakni anggapan bahwa setiap individu memiliki kemampuan dalam melaksanakan kehidupan dalam kondisi tidak selalu sama dalam berbagai hal. Sehingga perlu memahami agar tercipta saling menghargai di atas perbedaan sebagai fitrah kehidupan. Pendidikan yang seragam dan tidak menghargai pluralitas membawa implikasi negatif berupa mematikan kreativitas dan munculnya cara pandang yang tidak toleran (Naim dan Sauqi, 2008: 49).

## **C. Simpulan**

Simpulan dalam artikel ini, yaitu: pertama, peserta didik yang beragama lokal (agama Adam) harus mengikuti pendidikan formal dan menerima materi ajar pendidikan 'Pancasila', sebagaimana amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menuangkan materi kurikulum dan PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Tidak adanya formulasi pendidikan khusus bagi pemeluk agama lokal karena tidak diakomodir oleh produk hukum yang berlaku dalam praktik pendidikan. Kedua, peserta didik yang berusia anak (usia produktif) jika tidak dididik dalam pendidikan formal pada dasarnya mengekang keinginan luhur diri anak yang bertolak belakang dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9

(1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Pasal 13 (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, dan ketiga, praktik pendidikan rumahan (*homeschooling*) pada dasarnya mengakomodir kebutuhan masyarakat Samin karena produk hukum tentang *homeschooling* belum ada, maka pendidikan formal adalah solusi yang harus dipenuhi.

Saran penulis dalam naskah ini berupa, pertama, jika masyarakat Samin bersikukuh dalam memegang prinsip leluhurnya tidak aktif dalam pendidikan formal atau aktif dalam pendidikan formal, tetapi tidak mau diwajibkan mengikuti materi agama Pancasila, dalam kaca pandang patologi sosial mendapat julukan sosiopatik setel (*adjusted*) yakni dengan sadar dan ikhlas menerima statusnya dan penamaan oleh pihak luar (Kartini, 1992: 44). Konsekuensinya dalam beraktivitas (1) dibatasi (membatasi) partisipasi sosial, dibatasi ruang gerak dalam mobilitas sosial, dan mengalami proses demoralisasi dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya (Kartini, 1992: 36-40) dan kedua, negara harus memfasilitasi pendidikan yang diidolakan warga Samin berupa pendidikan rumahan (*homeschooling*) dalam bentuk diterbitkannya PP pendidikan rumahan.

Pemerintah untuk segera menerbitkan PP *homeschooling* (sekolah rumahan) agar jalur pendidikan informal disetarakan dengan pendidikan formal dalam hal status dan kedua, perlunya penegasan bahwa agama adalah wilayah batin, sehingga perbedaan keyakinan antarindividu dalam memegang agama dan keyakinannya tidak untuk dijadikan modal saling menyalahkan, tetapi sebagai modal pembangunan bangsa (hikmah di tengah perbedaan).

## DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan. 2005. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harman, Benny K. 2007. *Tantangan Republik Konstitusional*. Kompas, 18/8/2007
- Hendardi. 2005. *Beragama, Kebebasan Dasar*. Kompas, 10/9/2005.
- Kartono, Kartini. 1992. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mahfud, Choirul. 2008. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rakesarasin.
- Naim, Ngainun dan Sauqi, Achmad. 2008. *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Arruz.
- Nugroho, D. Riant. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Penpres Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama.
- PP Nomor 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Rosyid, Moh. 2008. *Samin Kudus Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pendidikan Agama vis a vis Pemeluk Agama Minoritas*. Semarang: Unnes Press.
- Sofwan, Ridin. 1999. *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. 2001. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung Sinar Baru: Algensindo.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-*

*Agama*. Bandung: Rosda.

Tilaar, H.A.R dan Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

UU Nomor 39/1999 tentang HAM

UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Usfunan, Yohanes. 2007. *HAM dan Pembatasannya*. Kompas, 27/8/2007.

Yaqin, M. Ainul. 2005. *Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.

*halaman ini bukan sengaja dikosongkan*

---

## **KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DALAM PERSPEKTIF GENDER**

**Muhamad Mustaqim**  
YAYASAN PRAMESTA MULYA,  
Jawa Tengah, Indonesia  
muhamadmustaqim10@gmail.com

### **Abstrak**

Tulisan ini bermaksud mengkaji tentang implementasi kurikulum pada pendidikan dasar yang berbasis pada kesetaraan gender. Untuk maksud tersebut, penulis melakukan penelitian kualitatif. Dengan melihat berbagai fenomena bias dan diskriminasi gender yang selama ini membudaya, termasuk dalam dunia pendidikan menjadikan upaya untuk membangun kurikulum berperspektif gender menemukan relevansinya. Pendidikan dasar, sebagai upaya membangun pengetahuan, keterampilan dan sikap sejak dini menjadi hal penting dalam sosialisasi dan penanaman keadilan gender. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa implementasi kurikulum berperspektif gender ini bisa dilakukan melalui beberapa pendekatan, baik secara implisit, eksplisit, perubahan maupun aksi sosial sebagai upaya dalam meminimalisir bias gender yang ada dalam pendidikan, tentunya dengan berbagai formulasi yang ditawarkan.

**Kata kunci: kurikulum, pendidikan, gender**

### **Abstract**

*BASIC EDUCATION CURRICULUM IN A GENDER PERSPECTIVE. This paper intends to examine the implementation of the curriculum in primary education based on gender equality. For that purpose, the authors did a qualitative research. By looking at*

*the various of bias phenomena and gender discrimination that is widespread, including in the world of education is making efforts to build the curriculum based on gender perspective finds its relevance. Primary education, as an effort in building the knowledge, skills and attitude since early phase becomes an important thing in the socialization and instilling the gender justice. From the results of research that has been done, it can be noted that the implementation of the curriculum based on gender perspective can be done through a number of approaches, either implicitly or explicitly, changes, or social action in an effort to minimize the gender bias that exists in education, of course with the variety of formulations that are offered.*

**Keywords:** *curriculum, primary education, gender*

## **A. Pendahuluan**

Sebagaimana dipahami bersama bahwa pendidikan merupakan elemen penting dalam pembangunan karakter manusia. Melalui pendidikan, manusia mengetahui, mengenal, melaksanakan tema, kaidah teknologi yang dirasa bermanfaat untuk kepentingan kehidupannya. Melalui pendidikan pula, manusia mampu mewujudkan tujuan penciptaan, yakni dalam dimensi kehambaan dan dimensi kepemimpinan.

Salah satu tujuan pendidikan adalah bagaimana manusia mengimplementasikan nilai-nilai keadilan untuk sesama. PBB melalui Unesco telah menggariskan pilar pendidikan yang terdiri dari empat hal utama, bahwa pendidikan harus berorientasi pada *how to know* (pengetahuan/kognitif), *how to do* (ketrampilan/psikomotorik), *how to be* (sikap/afeksi), dan *how to live together*, hidup bersama secara damai dan santun. Hal ini mengisyaratkan adanya pemahaman akan persamaan dan perbedaan yang harus selalu dihargai dan dihormati. Salah satu aspek perbedaan yang sering kali menyebabkan ketidakadilan adalah aspek gender. Gender secara sederhana dapat dipahami sebagai perbedaan atas laki-laki dan perempuan berdasar konstruksi sosial dan budaya. Hal ini berbeda dengan seks atau jenis kelamin, yang membedakan laki-laki dan perempuan berdasar atas konstruksi biologis.

Secara bahasa, gender sering diartikan dengan jenis kelamin. Namun secara istilah pengertian seks atau jenis kelamin sangat berbeda

sekali. Jika seks adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada bentuk biologis, maka gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada konstruk sosial budaya yang tercipta (Wahid, 2003: 123). Contoh dari perbedaan yang bersifat seks adalah, jika laki-laki mempunyai jakun, kumis, penis, sedangkan perempuan mempunyai payudara, pinggul besar, vagina, menstruasi dan beranak. Sedangkan contoh dari gender seperti laki-laki itu kuat, tabah, pandai dan sebagainya. Sedangkan perempuan itu lemah, cengeng, rapuh dan kurang pandai. Jadi kalau seks adalah given, takdir dari Tuhan yang tidak bisa dirubah, lain halnya dengan gender yang merupakan penciptaan sosial yang bisa dirubah.

Dalam konteks agama juga seringkali mengalami bias gender, dimana terjadi praktik subordinasi terhadap kaum perempuan. Hal ini dimungkinkan karena tiga hal, pertama, adanya teks yang memang bias gender. Kedua, adanya kesalahan interpretasi terhadap ajaran agama. Ketiga, adanya perlakuan menyimpang dari pribadi-pribadi yang berlindung dibalik institusi agama (Yakin, 2005: 177).

Dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa gender merupakan peran, sifat dan perilaku manusia di dalam kehidupan sehari-hari, yang sangat dipengaruhi oleh anggapan-anggapan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan seks adalah ciri-ciri fisik atau genetis yang ada pada manusia, sehingga mereka bisa disebut sebagai laki-laki atau perempuan. Karena gender didasarkan pada konstruk sosial yang tercipta (budaya), maka gender tidak bisa dipisahkan dengan budaya itu sendiri. Karena pada dasarnya gender dibentuk oleh kultur dalam suatu masyarakat (Muslikhati, 2004: 20). Di sini, pandangan gender dalam sebuah komunitas masyarakat berbeda-beda dan bersifat relatif.

Pendidikan dasar, sebagai upaya membangun pengetahuan, ketrampilan dan sikap sejak dini menjadi hal penting dalam sosialisasi dan penanaman keadilan gender. Namun yang terjadi praktik pendidikan dasar, seringkali melestarikan dan mereproduksi konstruksi sosial yang bias gender. Budaya patriarki yang menjadi pangkal bias gender semakin diperkuat melalui institusi pendidikan. Contoh sederhana saja, relasi kuasa dalam kelas di Sekolah Dasar, senantiasa menempatkan laki-laki ke dalam posisi yang superior, ketua kelas misalnya. Masih jarang kita jumpai posisi ketua kelas di

SD yang ditempati oleh seorang perempuan. Hal remeh dan kecil ini menandakan bagaimana bangunan kultur seringkali terdapat diskriminasi gender, dan ini selalu dilestarikan dari generasi ke generasi. Di sinilah, menjadi penting untuk melakukan rekonstruksi relasi sosial dalam pendidikan dasar. Dan kurikulum kiranya menjadi aspek yang mempunyai peran penting dalam proses rekonstruksi ini. Melalui kurikulum yang berkeadilan gender, diharapkan akan mampu membuka ruang dialogis terhadap pengarus utamaan gender di ruang pendidikan dasar secara proporsional.

Pengembangan kurikulum yang kontekstual, menjadi momentum dasar bagaimana implementasi kurikulum berperspektif gender mampu membuka peluang untuk membangun budaya pendidikan yang berkeadilan gender. Untuk mengimplementasi konsep ini, tentunya diperlukan kesadaran gender di semua kalangan, mulai dari pengelola pendidikan, guru dan murid.

Tulisan ini bermaksud membangun kurikulum pendidikan dasar, khususnya di tingkatan SD/MI yang berperspektif gender. Di sini, implementasi nilai gender bukan hanya pada aspek isi atau kontens saja, namun semua kontens dan materi bisa merepresentasikan pemahaman gender bila mempunyai perspektif gender. Sehingga peran guru dan pengelola pendidikan akan sangat mewarnai pelaksanaan kurikulum berperspektif gender ini.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Kurikulum**

Untuk memahami tentang konsep kurikulum, berikut akan dipaparkan pengertian kurikulum baik secara bahasa maupun istilah. Ditinjau dari segi bahasa (etimologi), kurikulum berasal dari kata latin curriculum, yang merupakan gabungan dari dua kata *curir* dan *curere*. *Curir* artinya pelari, sedangkan *curere* berarti tempat berlari atau berpacu. Pada awalnya, istilah curriculum ini digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani Kuno (Mudhofir, 2009: 3). Mengingat filsafat dan ilmu pengetahuan berasal dari Yunani, maka istilah olahraga inipun akhirnya digunakan dalam bidang pendidikan.

Dalam segi istilah atau terminologi, ada beberapa pendapat tentang istilah kurikulum ini. Secara umum, kurikulum seringkali

diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Dalam UU No. 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Secara lebih mudah, kurikulum dapat dipahami sebagai seperangkat/sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar mengajar. Sehingga kurikulum merupakan pedoman dan dasar yang digunakan oleh penyelenggara pendidikan untuk melakukan proses pembelajaran. Karena merupakan sebuah sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen yang saling terkait dan mempengaruhi.

Dalam kerangka yang lebih spesifik, kurikulum merupakan bentuk operasional yang menjabarkan konsep pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum disusun dan dirumuskan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan yang telah ada. Di sini, obyek kajian dalam kurikulum tidak terlepas dari tujuan yang dilandasi prinsip dasar filsafat yang dipilih, kualifikasi pendidik, kondisi subyek pendidik, materi yang diajarkan, buku teks, organisasi kurikulum, penjenjangan, metode, bimbingan dan penyuluhan, administrasi, prasarana, biaya lingkungan dan evaluasi (Roqib, 2009: 77). Hingga saat ini, pemahaman kurikulum memanglah sangat luas. Untuk lebih terperinci, maka pelaksana pendidikan (pembelajaran) nantinya menyusun apa yang disebut dengan pengembangan kurikulum.

Dalam pemahaman yang lain, kurikulum dalam pendidikan dapat dimaknai dalam tiga konteks. Pertama, sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik (*course of studies*). Dalam konteks ini kurikulum merupakan seperangkat materi yang harus dipelajari oleh murid dalam proses pembelajaran. Kedua, sebagai pengalaman belajar (*learning experience*). Yaitu sebagai kegiatan dan aktifitas yang dilakukan oleh murid dalam proses pembelajaran tersebut. Dalam hal ini segala aktifitas itu meliputi intra maupun ekstra kurikulum, dengan catatan aktifitas tersebut di bawah kontrol dan tanggung jawab guru atau sekolah.

Ketiga, sebagai program belajar (*learning plan*). Dalam pemahaman ini, kurikulum menyangkut sistem perencanaan yang berisi tujuan yang harus ditempuh, proses dan media, serta alat evaluasi yang digunakan. Sebenarnya ketiga konteks ini merupakan konsekuensi logis dari pengertian kurikulum, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

## **2. Fungsi Kurikulum**

Pada dasarnya kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sehingga apa yang dilaksanakan oleh guru dalam proses pembelajaran, merupakan implementasi dari pengembangan kurikulum yang telah disusunnya. Guru dalam hal ini merupakan aktor yang memainkan skenario bernama kurikulum. Guru yang baik pada dasarnya guru yang mampu melaksanakan kurikulum (RPP) yang telah dibuatnya, tetap dengan melakukan improvisasi, sehingga pembelajaran bersifat dinamis.

Kurikulum bagi sekolah atau pengawas, berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Melalui kurikulum, sekolah mampu mengontrol arah dan capaian pendidikan yang telah dilaksanakan dalam satuan pendidikan. Sehingga akan ada evaluasi untuk penyempurnaan pembelajaran di masa yang akan datang. Khusus bagi wali murid, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Mengingat pendidikan merupakan wahana yang harus dilakukan secara komprehensif - ingat konsep tiga pilar pendidikan formal-informal-nonformal - maka orang tua juga akan mampu membimbing anaknya dalam pencapaian tujuan pendidikan. Sedangkan bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Masyarakat mampu memberikan kontribusi baik materiil maupun non materiil, bila masyarakat memahami arah pendidikan yang termanifestasikan melalui kurikulum. Dan bagi murid, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Melalui kurikulum murid dapat mengetahui isi, tujuan dan bahan ajar yang akan diajarkan dalam pembelajaran.

## **3. Komponen Kurikulum**

Komponen kurikulum dalam hal ini berkaitan dengan unsur-

unsur dasar yang selalu ada dalam kurikulum. Mengingat kurikulum adalah seperangkat sistem, maka sistem tersebut tentu saja terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut berhubungan dan saling berinteraksi, yang masing-masing bertugas mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Sebenarnya ada beberapa pendapat tentang jumlah dan isi komponen kurikulum. Namun, yang sering digunakan adalah empat komponen kurikulum yaitu: tujuan, isi (bahan pelajaran), strategi pelaksanaan (proses belajar mengajar), dan penilaian (evaluasi).

**a. Tujuan**

Tujuan merupakan orientasi awal dari sebuah program atau kegiatan. Dalam hal ini, kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya program pengajaran di Sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dalam setiap kurikulum lembaga pendidikan, pasti dicantumkan tujuan-tujuan pendidikan yang harus dicapai oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.

**b. Isi**

Komponen isi/struktur kurikulum berkenaan dengan pengetahuan ilmiah dan jenis pengalaman belajar yang akan diberikan kepada murid agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang maupun jalur pendidikan yang ada.

**c. Pelaksanaan/proses**

Strategi pelaksanaan kurikulum memberi petunjuk bagi para pelaksana pendidikan untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara benar dan efektif. Strategi ini merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh

dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan dan mengatur kegiatan, baik yang secara umum berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran.

*d. Komponen Evaluasi*

Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelaikan program.

**4. Kurikulum Pendidikan Dasar**

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan no 67 tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di jelaskan tentang kerangka dasar kurikulum pada pendidikan dasar, baik SD maupun MI. Berikut akan dipaparkan kerangka dasar tersebut.

Pertama, Kerangka Dasar Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan Struktur Kurikulum pada tingkat nasional dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah serta pedoman pengembangan kurikulum pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

Kedua, Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah merupakan pengorganisasian kompetensi inti, matapelajaran, beban belajar, kompetensi dasar, dan muatan pembelajaran pada setiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

Sedangkan prinsip-prinsip penyusunan kurikulum, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum adalah sebagai berikut:

*a. Peningkatan Iman, Takwa, dan Akhlak Mulia*

Iman, takwa, dan akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun agar semua

mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia.

***b. Kebutuhan Kompetensi Masa Depan***

Kemampuan peserta didik yang diperlukan yaitu antara lain kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis dan kreatif dengan mempertimbangkan nilai dan moral Pancasila agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab, toleran dalam keberagaman, mampu hidup dalam masyarakat global, memiliki minat luas dalam kehidupan dan kesiapan untuk bekerja, kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya, dan peduli terhadap lingkungan. Kurikulum harus mampu menjawab tantangan ini sehingga perlu mengembangkan kemampuan-kemampuan ini dalam proses pembelajaran.

***c. Peningkatan Potensi, Kecerdasan, dan Minat sesuai dengan Tingkat Perkembangan dan Kemampuan Peserta Didik***

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotor) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spritual, dan kinestetik peserta didik.

***d. Keragaman Potensi dan Karakteristik Daerah dan Lingkungan***

Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum perlu memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah.

***e. Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional***

Dalam era otonomi dan desentralisasi, kurikulum adalah salah satu media pengikat dan pengembang keutuhan bangsa yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, kurikulum perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan daerah dan nasional.

**f. *Tuntutan Dunia Kerja***

Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama bagi satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

**g. *Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni***

Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

**h. *Agama***

Kurikulum dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman, taqwa, serta akhlak mulia dan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua matapelajaran ikut mendukung peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia.

**i. *Dinamika Perkembangan Global***

Kurikulum menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun bangsa, yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas. Pergaulan antarbangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain.

**j. *Persatuan Nasional dan Nilai-nilai Kebangsaan***

Kurikulum diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena

itu, kurikulum harus menumbuhkembangkan wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI.

**k. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat**

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat ditumbuhkan terlebih dahulu sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain.

**l. Kesetaraan Gender**

Kurikulum diarahkan kepada pengembangan sikap dan perilaku yang berkeadilan dengan memperhatikan kesetaraan jender.

**m. Karakteristik Satuan Pendidikan**

Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi dan ciri khas satuan pendidikan. Sehingga tujuan pembelajaran dapat relevan dengan keadaan sekolah. Dalam prinsip pelaksanaan kurikulum tersebut, secara jelas disebutkan bahwa kurikulum harus diarahkan pada pengembangan sikap dan perilaku yang berkeadilan dengan memperhatikan kesetaraan jender. Hal ini menjadi titik poin bahwa implementasi kurikulum diupayakan untuk mampu membangun ruang kesetaraan, termasuk dalam dimensi gender.

**5. Bias gender dalam pendidikan**

Kajian bias gender dalam pendidikan (Suryadi, 2004: 128-157) meliputi:

1. Kaum laki-laki lebih dominan dalam memilih jurusan dan mempelajari kemampuan atau ketrampilan pada bidang kejuruan teknologi dan industri sehingga dengan jenis ketrampilan kejuruan yang dipelajarinya itu, laki-laki seolah-olah secara khusus dipersiapkan untuk menjadi pemain utama dalam dunia produksi. Sementara itu, perempuan lebih dipersiapkan untuk melaksanakan peran pembantu, misalnya ketatausahaan dan teknologi kerumahtanggaan.
2. Jumlah murid perempuan yang memilih jurusan IPA atau matematika di SMU lebih kecil proporsinya sehingga mereka lebih sulit untuk memasuki berbagai jurusan keahlian di

perguruan tinggi, misalnya dalam berbagai bidang teknologi dan ilmu-ilmu eksakta lainnya. Pada kedua jenis jurusan keahlian itu, proporsi mahasiswi hanya mencapai 19,8 %. Di lain pihak mahasiswi lebih dominan dalam jurusan-jurusan keahlian terapan bidang manajemen (57,7%), pelayanan jasa dan transportasi (64,2%), bahasa dan sastra (58,6%) serta psikologi (59,9%).

3. Pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) perempuan lebih dominan pada program diploma yang menyiapkan guru SLTP ke bawah (68,2%) dan program sarjana yang menyiapkan guru sekolah menengah (55,7%). Gejala ini menunjukkan, perempuan lebih banyak yang dipersiapkan untuk menjadi guru pendidikan dasar dan menengah. Keadaan ini juga ditunjukkan dengan jumlah seluruh guru perempuan dari TK sampai SMU, proporsi perempuan lebih besar (50,8%) daripada jumlah guru laki-laki (49,2%). Sebaliknya tenaga dosen didominasi oleh laki-laki dengan proporsi 70% pada berbagai tingkat jabatan dosen di PT, dan semakin tinggi jabatan dosen semakin kecil proporsi dosen perempuan. Demikian juga untuk jabatan struktural masih didominasi kaum laki-laki, walaupun ada jumlahnya masih sedikit.
4. Kesenjangan gender menurut jurusan, bidang kejuruan, dan program keahlian dalam pendidikan ini tercermin pula dalam proporsi pegawai negeri sipil (PNS), PNS perempuan hanya menempati proporsi 35,4%, dan semakin tinggi golongan jabatan semakin kecil proporsi perempuannya. Hampir semua keahlian PNS dipegang oleh laki-laki kecuali keahlian di beberapa bidang seperti farmasi (57,7%), biologi (47,9%), bahasa dan sastra (45%), dan psikologi (61,1%).

Dari data yang disajikan Suryadi, terlihat jelas ketimpangan dan bias gender dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, masih dibutuhkan gebrakan dalam menghilangkan bias gender terutama sejak dalam lingkungan pendidikan di

Sekolah Dasar. Hal ini dapat diimplementasikan dalam kurikulum berperspektif gender.

## **6. Implementasi Kurikulum Perspektif Gender**

Adanya beberapa bias gender yang terjadi dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar menunjukkan bahwa budaya patriarki dalam struktur dan sistem sosial masyarakat kita bisa digolongkan tinggi. Salah satu upaya untuk melakukan perbaikan sistem dan budaya pendidikan adalah melalui kurikulum yang berbasis gender. Karena kurikulum merupakan seperangkat sistem, maka pembangunan kurikulum yang “ramah” gender, diharapkan mampu memperkecil kecenderungan bias gender yang ada. Melalui implementasi kurikulum perspektif gender, maka segala bentuk kesalahan persepsi, bias gender, maupun diskriminasi gender nantinya dapat dikurangi sedikit demi sedikit.

## **C. Simpulan**

Penerapan pembelajaran dalam lembaga pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berakhlak baik, dan memanusiakan manusia tanpa melihat kepada jenis kelamin tertentu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka uraian tentang prinsip-prinsip pembelajaran dengan kurikulum gender dapat dilihat sebagai berikut:

### **1) Kesiapan Pendidik dalam pemahamannya mengenai gender**

Pendidik diharapkan memiliki kesiapan untuk melaksanakan pembelajaran yang berperspektif gender bagi mata pelajaran yang diampunya. Oleh karena itu, para pendidik sebaiknya menajamkan perasaan mengenai gender agar dalam pembuatan rpp dan proses pembelajaran di kelas tidak ditemukan lagi bias gender.

### **2) Sikap Pendidik Harus Adil Dan Setara dalam Memperlakukan Peserta Didik**

Pendidik memperlakukan peserta didik laki-laki dan perempuan sama. Mereka mendapat tugas dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Tindakan affirmative bisa dilakukan

apabila laki-laki atau perempuan ada yang belum optimal dalam menggunakan kesempatan belajar. Misalkan bagi murid perempuan diberi kesempatan untuk aktif dalam pembelajaran dengan cara memberikan kesempatan pertama bagi murid perempuan untuk merespon dan mengeluarkan pendapatnya dalam pembelajaran sebelum laki-laki. Pendidik mempraktikkan kesetaraan gender dalam perilakunya di kelas. Para pendidik hendaknya tidak melakukan pelecehan secara gender terhadap murid laki-laki maupun perempuan, baik secara tersirat maupun nyata. Pelecehan secara tersirat bisa dalam bentuk kata-kata yang tidak etis, yang secara tidak langsung dapat merendahkan martabat jenis kelamin tertentu.

### 3) Tidak Mengajari atau Menggurui

Tugas Pendidik adalah mendidik dan bukan untuk menggurui peserta didik. Dalam proses pembelajaran, apalagi untuk hal-hal yang sudah umum diketahui dan dialami oleh peserta didik. Yang harus dilakukan seorang pendidik adalah menjadi perantara mendialogkan apa yang diketahui dan dialami oleh peserta didik. Proses belajar mengajar akan lebih efektif apabila peserta didik secara aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik akan mengalami, menghayati, dan menarik pelajaran dari pengalaman itu, dan akhirnya hasil belajar merupakan bagian dari diri, perasaan, dan tentu saja dalam proses seperti itu peserta didik didorong dan dikondisikan untuk lebih kreatif (Zaini, 2002: 98).

### 4) Terbuka

Pendidik hendaknya terbuka secara akademik, menggunakan sumber rujukan yang berperspektif gender. Jika dalam materi tertentu tidak ada buku rujukan yang berperspektif gender, maka pendidik harus memberi muatan gender tersendiri dalam menganalisis buku tersebut agar semakin menguatkan pengenalan mengenai gender dan tidak terjebak kembali dalam lingkaran bias gender.

### 5) Dialog

Prose pembelajaran dua arah dengan cara berdialog merupakan cara pembelajaran yang berdasarkan kepada azas

kesetaraan. Maka proses pembelajaran yang berlangsung bukan pengajaran yang bersifat satu arah, melainkan proses komunikasi dalam berbagai bentuk kegiatan belajar seperti berbagi pengalaman, menelaah wacana, diskusi, memberi komentar kasus, dan sebagainya. Untuk membantu visualisasi beragam persoalan yang didiskusikan dibutuhkan berbagai media, seperti wacana, gambar, film, hand out, kertas dan alat tulis lainnya. Dengan adanya media ini memungkinkan terjadinya dialog kritis antara semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran mulai dari guru dan peserta didik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muslikhati, Siti. 2004. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Nasution. 1993. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan no 67 tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum.
- Roqib, Moh. 2009. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: LKIS.
- Suryadi, Ace & Ecep Idris. 2004. *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*. Cet. I. Bandung: Genesindo
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahid, Nusron, et. al. 2003. *Ultimatum Transisi*. Jakarta: Pustaka Salemba.
- Yaqin, Ainul. 2005. *Pendidikan Multikultural: Cross-cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Zaini, Hisyam dkk. 2002. *Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Center for Teaching Staff Development (CTSD) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

# **MANAJEMEN KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN: Studi Kasus di STAIN Kudus**

**Kisbiyanto**

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia  
kisbiyanto@gmail.com

## **Abstrak**

Kualitas manajemen pendidikan tergantung pada perilaku organisasi. Oleh karena itu, perilaku harus terorganisir secara sistematis. Penelitian ini menjelaskan tentang (1) bagaimana untuk mengelola perilaku individu sumber daya manusia, (2) bagaimana cara untuk mengelola perilaku kelompok sumber daya manusia, dan (3) bagaimana untuk mengelola perilaku organisasi sumber daya manusia. Penelitian ini dirancang dalam pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan, dan menggunakan dokumen. Keabsahan dan kehandalan data diverifikasi dengan uji kredibilitas, pengalihan, dependability, dan confirmability tes. Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif. Hasil penelitian adalah: (1) kinerja perilaku individu sumber daya manusia di tingkat tinggi ada di ushuluddin dan Fakultas dakwah, sedangkan di tingkat menengah ada di Fakultas tarbiyah dan syariah (2) pelaksanaan perilaku kelompok sumber daya manusia di tingkat tinggi di Tarbiyah dan Fakultas syariah, dan tingkat menengah adalah Fakultas ushuluddin dan dakwah, dan (3) pelaksanaan perilaku individu sumber daya manusia di tingkat menengah di tarbiyah, syariah, ushuluddin dan dakwah Fakultas.

**Kata kunci: manajemen, sumber daya manusia, pendidikan**

**Abstract**

*THE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL HUMAN RESOURCES POLICY (CASE STUDY IN STAIN KUDUS).*

*Quality of educational management depends on organizational behavior. Therefore, every behavior must be systematically organized. This research explained about (1) how to manage the individual behavior of human resources, (2) how to manage the group behavior of human resources, and (3) how to manage the organizational behavior of human resources. This research was designed in the qualitative approach. Data were gathered by using interview, observation, and using document. The validity and reliability were verified by credibility, transferability, dependability, and confirmability test. The data were analyzed by using interactive model. The results of research were: (1) the performance of individual behavior of human resources in high level was at ushuluddin and dakwah faculty, while at tarbiyah and syariah faculty was in medium level (2) the performance of group behavior of human resources in high level was at tarbiyah, syariah faculty, and in medium level, there were ushuluddin and dakwah faculty, and (3) the performance of individual behavior of human resources in medium level was at tarbiyah, syariah, ushuluddin and dakwah faculty.*

**Keywords:** *management, human resources, education*

**A. Pendahuluan**

Penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung dalam sistem pendidikan. Faktor tujuan, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, kurikulum, metodologi, media dan sarana, serta evaluasi dalam pendidikan. Semua faktor pendidikan tersebut merupakan supporting system utama dalam pendidikan yang harus mendapat perhatian. Berhasil atau gagalnya suatu tindak pendidikan tergantung pada pemenuhan sumber daya pendidikan. Di samping itu, sumber daya dimaksud harus dikelola secara efisien dan efektif agar berjalan dengan baik dan berdampak pada pencapaian tujuan.

Subyek penyelenggaraan pendidikan pertama dan utama adalah pendidik. Pendidikan pada awalnya merupakan sentral dari aktifitas pembelajaran. Pendidik juga yang menjadi pimpinan dalam penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan. Pendidik juga bisa menjadi pengawas pada waktu dia sudah berpengalaman dan

cukup cakap untuk diangkat sebagai pengawas pendidikan. Pendidik sebagai pimpinan di lembaga pendidikan memberi contoh dan arahan bagi para pendidik lain, para tenaga kependidikan termasuk pegawai administrasi, pustakawan, laboran, dan juga memimpin para peserta didik. Bahkan, pendidik sering kali menjadi pemimpin di masyarakatnya, baik yang terkait tugas pendidikan maupun di luar pendidikan.

Manajemen sumber daya manusia menjadi perhatian khusus pada banyak lembaga profesional, lembaga formal, maupun non-formal, bahkan di lembaga-lembaga sosial-non profit. Arti penting pengelolaan bidang sumber daya manusia itu bisa dilihat pada struktur kelembagaan pada lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta, misalnya badan kepegawaian nasional, bagian kepegawaian, bagian personalia, bagian ketenagaan, dan sebagainya. Manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan tidak luput dari kajian tentang perilaku manusia. Manusia berbuat untuk berkarya dan berprestasi melalui perilakunya. Ada perilaku baik yang lurus sesuai aturan, ada pula perilaku jelek yang menyimpang dari aturan. Dua dimensi perilaku manusia itu mempunyai potensi yang sama, artinya manusia bisa cenderung berperilaku baik sekaligus bisa cenderung berperilaku jelek. Manajemen pendidikan juga memberikan kajian tentang tiga tingkatan perilaku manusia, yaitu perilaku individu, perilaku kelompok, dan perilaku organisasi. Ketiga tingkatan perilaku itu dikelola agar manusia terarah pada situasi efisien dan efektif dalam bertindak. Upaya manajemen untuk mengelola perilaku manusia mendapat perhatian dalam ilmu pengetahuan, khususnya manajemen pendidikan. Karena itulah, penelitian ini dianggap menarik dan diberi judul Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan.

Kajian ini tentang manajemen perilaku sumber daya manusia dalam pendidikan di STAIN Kudus, khususnya di Jurusan Tarbiyah, Syariah, Dakwah dan Ushuluddin. Masalah yang dikaji terfokus pada (1) Bagaimana pengelolaan perilaku individu yang meliputi motivasi, persepsi, kepribadian, sikap, dan nilai pada pendidik di STAIN Kudus?, (2) Bagaimana pengelolaan perilaku kelompok yang meliputi dinamika tim, keputusan, kekuasaan, politik organisasi, konflik, dan kepemimpinan pada pendidik di STAIN Kudus?, 3) Bagaimana pengelolaan perilaku organisasi yang meliputi struktur hubungan

kerja, dan interaksi organisasi dengan lingkungan pada pendidik di STAIN Kudus? Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat dan pemerintah yaitu kementerian agama dan dinas pendidikan, serta pengelola dan pendidik lembaga pendidikan pada umumnya.

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu pengamatan/observasi, wawancara dan dokumentasi. Di samping itu juga menggunakan *Focus group discussion* (FGD) dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman kelompok (Bungin, 2003: 131). FGD juga dimaksudkan untuk menarik kesimpulan terhadap makna-makna intersubyektif yang sulit dimaknai sendiri oleh peneliti karena keterbatasan informasi sehingga mendapat obyektifitas dari peserta diskusi.

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan informasi dari sumber yang berupa dokumen/arsip, foto, dan bahan statistik yang lain. Data diperoleh dari dokumentasi data-data yang berkaitan dengan pengelolaan madrasah diniyah di Kudus, baik yang berupa tulisan/dokumen resmi maupun dokumen pribadi seperti makalah, artikel, catatan dan surat-surat, misalnya buku panduan, buku laporan, buku laporan dan sebagainya. Agar data yang diperoleh, yang berujung pada kesimpulan atau verifikasi, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dilakukan pemeriksaan keabsahan data.

Teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, sebagaimana dikatakan Moleong (2001: 103) meliputi: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif dan pengecekan. Namun, dalam penelitian ini, tidak semua teknik di atas digunakan, hanya beberapa teknik yang tepat dan diperlukan saja yang digunakan, khususnya triangulasi. Untuk pengecekan keabsahan data menggunakan empat kriteria Moleong (2001: 15), yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

## **B. Pembahasan**

### **1. Manajemen Perilaku Manusia**

Luthans (2006: 20) mendefinisikan perilaku organisasi

sebagai pemahaman, prediksi dan manajemen perilaku manusia dalam organisasi. Robbins (2008: 10) mendefinisikan perilaku organisasi sebagai suatu bidang kajian yang mempelajari dampak perorangan, kelompok dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan tentang hal-hal tersebut demi perbaikan efektifitas organisasi. Mc Shane dan Glinov (2008: 4) mendefinisikan perilaku organisasi sebagai kajian tentang sesuatu yang dipikirkan, dirasakan, dan dikerjakan orang di dalam dan sekitar organisasi (*the study of what people think, feel, and do in and around organizations*). Dia menjelaskan bahwa studi yang dimaksud adalah kajian yang sistematis tentang karakteristik level individu, level tim, dan level organisasi yang berpengaruh pada perilaku kerja dalam organisasi. Greenberg dan Baron (2000: 4) mendefinisikan bahwa perilaku organisasi adalah pengetahuan tentang perilaku dalam latar organisasi dengan kajian sistematis tentang proses individu, kelompok, dan organisasi (*knowledge about the behaviors in organizational settings by systematically studying individual, group, and organizational processes*).

Greenberg menekankan tiga tingkat analisis, yaitu perilaku individu ditekankan pada aspek sikap kerja (*work attitudes*), perilaku kelompok ditekankan pada aspek komunikasi (*communication*), dan perilaku organisasi ditekankan pada aspek struktur (*structure*) dalam organisasi. Jadi pengertian inti perilaku organisasi adalah kajian tentang perseorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan tentang hal-hal tersebut untuk perbaikan efektifitas organisasi. Jadi ada tiga tingkat perilaku organisasi, yaitu tingkat (1) individu yaitu terkait dengan perilaku dan nilai saat berinteraksi, (2) tingkat kelompok yaitu pengaruh terhadap perilaku anggota oleh dinamika anggota kelompok, norma dan nilai kelompok, dan (3) tingkat organisasi yaitu proses pengambilan keputusan manajemen (Ardana 2008: 3). Jadi perilaku organisasi merupakan bidang kajian tersendiri yang membutuhkan keahlian tertentu yaitu pada aspek spesifik meliputi tiga determinan perilaku dalam organisasi, yaitu individu, kelompok dan struktur.

Komponen bidang kajian dalam perilaku organisasi semakin banyak. Menurut Owens (1981: xi) perilaku organisasi

menitikberatkan kajian pada komponen motivasi, kepemimpinan, iklim organisasi, perubahan organisasi dan manajemen konflik. Sedangkan Robbins (2008: 10) mengemukakan komponen atau topik inti motivasi, perilaku dan kekuasaan pemimpin, komunikasi interpersonal, struktur dan proses kelompok, pembelajaran, pengembangan sikap dan persepsi, proses perubahan, konflik, desain pekerjaan dan stres pekerjaan. Simon (2000: ix) dalam *administrative behavior* mengemukakan struktur pilihan orang dalam organisasi, pengambilan keputusan dalam organisasi, pengaruh organisasi, dan kewenangan, komunikasi, efisiensi, dan kesetiaan dalam organisasi, serta struktur organisasi.

McShane and Glinov (2008: 19) menjelaskan tiga tingkatan dalam perilaku organisasi yang disebutnya sebagai *the multiple levels of analysis anchor*, sebagai berikut: (1) *the individual level includes the characteristics and behaviors of employees as well as the thought processes that are attributed to them such as motivation, perceptions, personalities, attitudes, and values*, (2) *the team level of analysis looks at how people interact, it includes team dynamics, decisions, power, organizational politics, conflict, and leadership*, and (3) *the organization level is focused on how people structure their working relationships and on how organizations interact with their environments*.

Sedangkan Umam (2010: 34-35) mengemukakan tingkatan analisis dalam perilaku organisasi meliputi tiga tingkatan dan satu bidang sehingga menjadi empat. Empat unsur tersebut yaitu: (1) menganalisis perilaku organisasional dalam tingkat individu, (2) menganalisis perilaku organisasional dalam tingkat kelompok, (3) menganalisis perilaku organisasional dalam tingkatan organisasi, (4) faktor lingkungan.

Manajemen perilaku organisasi menitikberatkan pada kajian aspek perilaku individu yang meliputi motivasi, persepsi, kepribadian, sikap, dan nilai; aspek perilaku kelompok yang meliputi dinamika tim, keputusan, kekuasaan, politik organisasi, konflik, dan kepemimpinan; perilaku organisasi yang meliputi struktur hubungan kerja, dan interaksi organisasi dengan lingkungan pada pendidik. Ketiga struktur perilaku manusia beserta sifat-sifat dasar yang mengikutinya menjadi bahan kajian yang terfokus untuk penelitian ini. Dalam konteks masa kini, kajian perilaku sumber daya manusia dalam pendidikan semakin

mendekati masa kritis dan penting untuk dikaji untuk ditemukan solusinya. Pelanggaran, cara kerja yang tidak efisien, kenaikan gaji dan tunjangan yang kurang berdampak pada peningkatan kinerja, dan formalisasi pendidikan yang jauh dari tujuan substansi pendidikan semakin menguatkan pentingnya penelitian ini.

## **2. Manajemen Lembaga Pendidikan**

Pendidikan mempunyai karakteristik khusus, baik sebagai lembaga pendidikan maupun proses pembelajarannya. Karakteristik pendidikan tinggi merupakan pendidikan formal, namun lebih cenderung mempunyai kebebasan dalam akademik. Pendidikan mempunyai banyak ciri sebagai pendidikan formal, dilihat dari beberapa aspek yaitu tujuan, waktu, isi program, proses pembelajaran, dan pengendalian (Sudjana, 2004: 22).

Tujuan pendidikan meliputi (1) untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang fungsional dalam kehidupan masa kini dan masa depan dan (2) berorientasi pada pentingnya ijazah. Hasil belajar, berijazah dapat diterapkan langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan tersebut adalah membekali ilmu pengetahuan dan praktik bagi peserta didik. Peserta didik lebih diutamakan untuk menguasai ilmu pengetahuan keagamaan dan pengamalannya sebagai bekal hidup beragama dan bermasyarakat, sehingga tujuannya sangat khusus berbeda dengan pendidikan formal yang bertujuan membekali peserta didik dengan kemampuan umum untuk kehidupan masa depan. Pendidikan formal yang mewajibkan tanda kelulusan sebagai bukti formal pendidikan.

Waktu pendidikan (1) relatif lama sesuai dengan kebutuhan peserta didik, (2) menekankan masa sekarang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam meningkatkan kemampuan tertentu, dan (3) menggunakan waktu penuh dan terus menerus. Isi program berupa kurikulum berpusat pada kepentingan peserta didik. Kurikulum cenderung beragam sesuai perbedaan kebutuhan belajar peserta didik dan potensi daerah atau sosiokultural tertentu. Kurikulum pendidikan secara nasional dan daerah sebenarnya sudah ditentukan, namun dalam praktiknya, setiap lembaga pendidikan mempunyai otonomi dan mengembangkan sendiri kurikulum yang dianggap tepat dan sesuai dengan kebutuhan di lembaga atau daerah masing-masing.

Proses pembelajaran (1) dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga, berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat, (2) berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat, (3) struktur program bersifat luwes atau bisa menyesuaikan sewaktu program sedang berjalan, (4) berpusat pada peserta didik, dan (5) penghematan sumber-sumber yang tersedia. Pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat, maupun atas penyelenggaraan pemerintah, struktur program cenderung berbeda bahkan stratifikasinya, dan diselenggarakan secara bebas oleh masyarakat karena kebutuhan pada komunitas tertentu.

Pengendalian (1) dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik, pendidikan formal yang pengendaliannya dilakukan oleh pengelola di tingkat yang lebih tinggi, dan (2) menggunakan pendekatan demokratis dari pada pendekatan kekuasaan. Pendidikan diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat sehingga berbasis pada kebutuhan masyarakat, yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Manajemennya secara mandiri oleh pelaksana pendidikan dan pada struktur yang hirarkhis dari pusat hingga daerah seperti pendidikan formal.

Sudjana (2004b: 53) menjelaskan enam fungsi dalam manajemen pendidikan non-formal, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, evaluasi dan pengembangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Perencanaan pendidikan nonformal mempunyai ciri-ciri:
  - a. Perencanaan merupakan model pengambilan keputusan secara rasional dalam memilih dan menetapkan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan.
  - b. Perencanaan berorientasi pada perubahan dari keadaan masa sekarang kepada suatu keadaan yang diinginkan di masa datang sebagaimana dirumuskan dalam tujuan yang akan dicapai.
  - c. Perencanaan melibatkan orang-orang ke dalam suatu proses untuk menentukan dan menemukan masa depan yang diinginkan.

- d. Perencanaan memberi arah mengenai bagaimana dan kapan tindakan akan diambil serta siapa pihak yang terlibat dalam tindakan atau kegiatan itu.
  - e. Perencanaan melibatkan perkiraan tentang semua kegiatan yang akan dilalui atau akan dilaksanakan. Perkiraan itu meliputi kebutuhan, kemungkinan-kemungkinan keberhasilan, sumber-sumber yang digunakan, faktor-faktor pendukung dan penghambat serta kemungkinan resiko dari suatu tindakan yang akan dilakukan.
  - f. Perencanaan berhubungan dengan penentuan prioritas dan urutan tindakan yang akan dilakukan. Prioritas ditetapkan berdasarkan urgensi atau kepentingannya, relevansi dengan kebutuhan, tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang tersedia, dan hambatan yang mungkin dihadapi.
  - g. Perencanaan sebagai titik awal untuk dan arahan terhadap kegiatan pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian, dan pengembangan.
2. Pengorganisasian adalah usaha mengintegrasikan sumber daya manusia dan nonmanusia yang diperlukan ke dalam satu kesatuan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana telah direncanakan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Pengorganisasian dalam pendidikan nonformal mempunyai ciri-ciri :
- a. Pengorganisasian berkaitan dengan upaya pemimpin atau pengelola untuk memadukan sumber daya manusia dan non-manusia yang diperlukan.
  - b. Sumber daya manusia terdiri atas orang-orang atau kelompok orang yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Persyaratan itu meliputi keahlian, kemampuan, dan kondisi fisik yang sesuai dengan tuntutan organisasi serta perkembangan lingkungan.
  - c. Adanya sumber daya nonmanusia meliputi fasilitas (gedung dan perlengkapannya), alat-alat dan biaya yang tersedia atau dapat disediakan, serta lingkungan fisik yang potensial.
  - d. Sumber-sumber itu diintegrasikan ke dalam suatu organisasi.

- e. Dalam organisasi terdapat pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab di antara orang-orang untuk menjalankan rangkaian kegiatan yang telah direncanakan.
  - f. Rangkaian kegiatan tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
  - g. Dalam kegiatan pencapaian tujuan, sumber daya manusia merupakan pemegang peran utama dan paling menentukan.
3. Penggerak adalah upaya pimpinan untuk menggerakkan (memotivasi) seseorang atau kelompok orang yang dipimpin dengan menumbuhkan dorongan atau motive dalam diri orang-orang yang dipimpin untuk melakukan tugas atau kegiatan yang diberikan kepadanya sesuai dengan rencana dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Untuk menumbuhkan dorongan yang ada dalam diri seseorang sehingga menjadi tingkah laku, maka orang perlu memahami dua hal, yaitu (a) seseorang hendaknya mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan dan cara-cara untuk melaksanakan kegiatan itu, dan (b) seseorang harus memahami pentingnya tujuan yang akan dicapai, baik yang berkaitan dengan kepentingan dirinya maupun yang berhubungan dengan kepentingan organisasi/lembaga dan lingkungannya. Efektifitas penggerak dipengaruhi beberapa faktor pendukung, antara lain :
- a. Pengayaan tugas, yaitu konsekuensi dari pentingnya kegiatan yang secara langsung dapat meningkatkan tanggung jawab yang lebih besar, ruang lingkup tugas, dan tantangan untuk memenuhi kebutuhan anggota melalui pelaksanaan tugas dalam kelompok.
  - b. Rotasi (perputaran) jabatan. Rotasi jabatan para pelaksana tugas yang dilakukan secara periodik dari satu tugas ke tugas lainnya dapat mengurangi kejenuhan dan ketidakpedulian para pelaksana tugas terhadap pekerjaan.
  - c. *Management by objectives* atau pengelolaan dengan tujuan, yaitu memberikan dukungan untuk memotivasi orang-orang dalam kerja kelompok sehingga mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
  - d. Partisipasi merupakan cara terbaik supaya setiap

orang memberikan kontribusi secara optimal terhadap kepentingan kelompok. Bagi setiap anggota kelompok, partisipasi berguna untuk memahami gagasannya sendiri yang dapat mendukung keputusan yang akan diambil bersama.

- e. Pengelola yang berangkai (*multiple manager*) dimana setiap anggota kelompok kerja dimotivasi untuk mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai pengelola kegiatan sehingga setiap orang dapat memaksimalkan perannya.
  - f. Pencapaian tujuan (*achievement*), yaitu penggerak perlu menyadari bahwa tujuan yang akan dicapai harus menantang para anggota kelompok dan juga dapat dicapai anggota kelompok.
  - g. Perkembangan (*development*), yaitu keinginan para anggota kelompok untuk mengembangkan dan memajukan diri, kelompok, dan organisasi akan berbeda tingkatannya antara satu anggota dengan anggota lainnya, sehingga keinginan dapat direfleksikan dengan tumbuhnya kebutuhan anggota agar potensinya diakui dan dikembangkan.
  - h. Pengakuan (*recognition*), yaitu setiap orang menyukai bahwa kontribusinya terhadap kepentingan kelompok diketahui dan diakui oleh orang lain.
  - i. Tanggung jawab (*responsibility*), suatu tugas tertentu harus jelas penanggungjawabnya sehingga tidak saling melempar tugas.
4. Pembinaan adalah rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. Unsur organisasi itu meliputi peraturan, kebijakan, tenaga penyelenggara, staf dan pelaksana, bahan dan alat (*material*), biaya, dan perangkat lainnya. Pembinaan meliputi dua subfungsi, yaitu pengawasan (*controlling*) dan supervisi (*supervising*).
  5. Evaluasi adalah kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, mendeskripsikan, dan menyajikan data atau informasi yang diperlukan sebagai masukan untuk

pengambilan keputusan. Jadi evaluasi dalam fungsi manajemen berkaitan dengan tiga substansi, yaitu :

- a. Penilaian dilaksanakan secara sistematis, yaitu dilakukan melalui prosedur tertentu yang tertib.
  - b. Data atau informasi yang dikumpulkan sebagai fokus kegiatan penilaian diperoleh melalui upaya pengumpulan, pengolahan, analisis, deskripsi dan penyajian dengan menggunakan metode dan teknik ilmiah.
  - c. Pengambilan keputusan menekankan bahwa data atau informasi yang disajikan akan berguna apabila menjadi masukan berharga untuk pengambilan keputusan tentang alternatif yang akan diambil.
6. Pengembangan adalah upaya memperluas atau mewujudkan potensi-potensi, membawa suatu keadaan secara bertingkat kepada suatu keadaan yang lebih lengkap, lebih besar, atau lebih baik, memajukan sesuatu dari lebih awal kepada yang lebih akhir atau dari yang sederhana kepada tahapan perubahan yang lebih kompleks. Dengan kata lain, pengembangan adalah upaya memajukan program pendidikan ke tingkat yang lebih sempurna, lebih luas, dan lebih kompleks. Pengembangan bisa dilihat pada aspek kualitatif dan kuantitatif:
- a. Pengembangan untuk meningkatkan, menekankan segi kualitatif, yaitu peningkatan diarahkan untuk menyempurnakan program pendidikan yang telah atau sedang dilaksanakan menjadi program baru yang lebih baik.
  - b. Pengembangan untuk memperluas program pendidikan, menekankan segi kuantitatif, yaitu memperluas jangkauan program, baik jangkauan wilayah maupun jangkauan sasaran (peserta didik).

### **3. Manajemen Perilaku SDM di STAIN Kudus**

Intisari dari hasil penelitian tentang manajemen perilaku sumber daya pendidikan untuk pendidik di STAIN Kudus, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, dan tingkat organisasi dapat disimpulkan secara singkat sebagai berikut:

1. Pengelolaan perilaku individu yang meliputi motivasi, persepsi, kepribadian, sikap, dan nilai pada pendidik yang

berorientasi proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan umum (*goals*) dan tujuan khusus (*objectives*) pada kinerjanya, disimpulkan termasuk kategori tinggi untuk dosen Ushuluddin dan Dakwah, dan kategori sedang untuk dosen Tarbiyah dan Syari'ah.

2. Pengelolaan perilaku kelompok yang meliputi dinamika tim, keputusan, kekuasaan, politik organisasi, konflik, dan kepemimpinan pada pendidik sebagai usaha mengintegrasikan sumber daya manusia dalam satu kesatuan untuk melaksanakan kegiatan kependidikan, disimpulkan kategori tinggi untuk dosen Tarbiyah dan Syari'ah, dan kategori sedang untuk dosen Ushuluddin dan Dakwah.
3. Pengelolaan perilaku organisasi yang meliputi struktur hubungan kerja, dan interaksi organisasi dengan lingkungan pada pendidik untuk mendorong anggota melakukan tugas atau kegiatan yang diberikan sesuai dengan rencana, disimpulkan sedang untuk dosen semua Jurusan Tarbiyah, Syari'ah, Ushuluddin, dan Dakwah.

Hasil penelitian ini menjadi bagian tak terpisahkan dari semua kajian tentang manajemen perilaku SDM Pendidikan dalam manajemen pendidikan. Aspek-aspek penting dalam kajian dan temuannya bisa bermanfaat bagi para ilmuwan dan praktisi dalam kependidikan, baik pada kajian pengembangan teoritik, maupun pada praktik pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Meskipun demikian, tentu saja ada aspek-aspek yang menjadi kekurangan dan kelemahan penelitian ini, baik secara substansi maupun metodologi. Kekurangan dan kelemahan itu justru menjadi pemacu bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya, dan juga akan menjadi tantangan bagi semua pihak dalam melakukan penelitian lainnya dalam bidang manajemen pendidikan, khususnya manajemen SDM pendidikan.

Semua pihak yakin bahwa manajemen pendidikan yang baik akan memperbaiki kualitas pendidikan. Tentu keyakinan itu bisa menjadi nyata jika kajian, penelitian, dan implementasi manajemen pendidikan selalu mendapat perhatian serius dan dilaksanakan secara

baik. Penelitian sebagai ujung tombak kajian keilmuan harus terus dilaksanakan, bukan hanya untuk kepentingan ilmu, tetapi lebih luas untuk kepentingan hajat hidup umat manusia. Harapan manusia bisa hidup sejahtera dengan ilmu dan amal diantarkan oleh bagaimana cara manusia memahami dan menjalani hidupnya.

### **C. Simpulan**

Dari pembahasan diatas bisa kita ambil kesimpulan berkaitan dengan kualitas manajemen yang berlangsung didalam sebuah lembaga pendidikan sangat tergantung pada bagaimanakah pola perilaku masyarakat yang berada dalam lembaga pendidikan tersebut, atau dengan kata lain bisa dibahasakan sebagai sebuah organisasi yang berkembang di lembaga pendidikan. Melihat begitu pentingnya perilaku sebuah organisasi pendidikan yang berimplikasi pada maju dan tidaknya lembaga pendidikan, maka perilaku harus terorganisir secara sistematis. Untuk mengelola perilaku individu sebagai sumber daya manusia tentunya memerlukan ikhtiar yang sistematis pula mulai dari, yang pertama; dari perilaku individu yang meliputi motivasi, persepsi, kepribadian, sikap, dan nilai pada pendidik. Yang kedua, Pengelolaan perilaku kelompok yang meliputi dinamika tim, keputusan, kekuasaan, politik organisasi, konflik, dan kepemimpinan pada pendidik sebagai usaha mengintegrasikan sumber daya manusia dalam satu kesatuan untuk melaksanakan kegiatan kependidikan, dan yang ketiga, Pengelolaan perilaku organisasi yang meliputi struktur hubungan kerja, dan interaksi organisasi dengan lingkungan pada pendidik untuk mendorong anggota melakukan tugas atau kegiatan yang diberikan sesuai dengan rencana. Ketiga segi diatas perlu dioptimalkan dengan dilaksanakan secara integral holistic mulai dari tataran atas sampai tataran bawahan sehingga akan didapatkan manajemen organisasi yang sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi dan Lia Yuliana. 2008. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Adiyta Media.
- Assegaf, Abd. Rachman. 2005. *Politik Pendidikan Nasional Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam.
- Bass, Bernard M. 1981. *Stogdill's Handbook of Leadership A Survey of Theory and Research*. New York: A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.
- Bogdan, Robert C dan Biklen, S Knopp. 1990. *Riset Kualitatif untuk Pendidikan : Pengantar Teori dan Metode*. Terjemahan Munandir. Jakarta: Pusat Antar Universitas untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktifitas Instruksional Universitas Terbuka.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bush, Tony. 2006. *Theories of Educational Leadership and Management*. London: SAGE Publications.
- Denzin, Norman, K and Lincoln, Yvonna S. 2000. *Handbook of Qualitative Research (Second Edition)*. California: Sage Publication, Inc.
- Djuhardi AS. 2007. *Profil Kompetensi Guru Madrasah Diniyah dalam Edukasi* Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbangdiklat Departemen Agama RI.
- Ekosusilo, Madyo. 2003. *Hasil Penelitian Kualitatif Sekolah Unggul Berbasis Nilai*. Sukoharjo: Univet Bantara Press.
- Fullan, Michael G. 1991. *The New Meaning of Educational Change (Second Edition)*. New York: Teachers College Press.
- Greenberg, Jerald and Robert A. Baron. 2000. *Behavior In Organization (Seventh Edition)*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Hanson, Mark E. 1996. *Educational Administration and Organizational*

- Behavior (Fourth Edition)*. Massachusetts USA: Allyn and Bacon.
- Hersey, Paul dan Blanchard, Ken. 1982. *Manajemen Perilaku Organisasi : Pendayagunaan Sumber Daya Manusia (Edisi Keempat)* Terjemahan Agus Dharma. Jakarta: PT. Gelosa Aksara Pratama.
- Lippitt, Gordon L. 1982. *Organization Renewal A Holistic Approach to Organization Development (Second Edition)*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Luthans, Fred. 2006. *Perilaku Organisasi (Edisi Kesepuluh)*. Terjemahan Vivin Andhika Yuwono dkk. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Masyhud, Sulthon, dkk. 2003. *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Matthew, Miles B, dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif . Terjemahan Tjetjep Rohendi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- McMillan, James H and Sally Schumacher. 2001. *Research In Education A Conceptual Introduction*. San Francisco: Longman.
- McShane, Steven L and Mary Ann Von Glinov. 2008. *Organizational Behavior (Fourth Edition)*. New York: McGraw-Hill.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik*. Bandung: Tarsito.
- Owens, Robert G. 1981. *Organizational Behavior in Education (Second Edition)*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Robbins, Stephen P. 2008. *Perilaku Organisasi (Edisi Kesepuluh)*. Terjemahan Benyamin Molan. Indonesia: PT. Indeks.
- Rogers, Everett M. 1995. *Diffusion of Innovations (Fourth Edition)*. New York: The Free Press.
- Simon, Herbert A. 2000. *Administrative Behavior : A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations (Fourth Edition)*. New York: The Free Press.
- Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sudjana, D. 2004a. *Pendidikan Nonformal (Nonformal Education) Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat, Teori Pendukung*,

Asas. Bandung: Falah Production.

Sudjana, D. 2004b. *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Falah Production.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suwarto. 1999a. *Perilaku Keorganisasian Buku Panduan Mahasiswa*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Suwarto. 2010b. *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Umam, Khaerul. 2010. *Perilaku Organisasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Dihimpun oleh Penerbit Asa Mandiri.

Usman, Husaini. 2008. *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winardi, J. 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prenada Media.

*halaman ini bukan sengaja dikosongkan*

---

## **HIDDEN CURRICULUM DALAM PEMBELAJARAN PAI**

**Hikmatul Mustaghfiroh**

COIN (Conge Institute), Jawa Tengah, Indonesia  
hikmatulmus@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Tulisan ini berupaya menelaah tentang kurikulum tersembunyi dalam sebuah proses pembelajaran. Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), kurikulum tersembunyi memiliki peran yang cukup signifikan dalam membentuk sikap dan karakter para siswa. Melalui penggunaan kurikulum tersembunyi, para guru dan sekolah-sekolah dapat mencapai tujuan pembelajaran PAI secara optimal. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kurikulum tersembunyi merupakan kurikulum yang tidak tampak, bisa terjadi secara spontanitas, tanpa terencana dan bisa muncul dari pengalaman belajar dalam sekolah. Di samping itu, meskipun kurikulum tersembunyi tidak mempunyai sistematika yang formal dan terukur, namun sangat berperan dalam mewujudkan sebuah tujuan pembelajaran, khususnya pembelajaran PAI. Pembelajaran PAI akan dapat dicapai dengan maksimal dengan dukungan kurikulum tersembunyi melalui aktifitas siswa, baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran.

**Kata kunci: kurikulum, tersembunyi, pembelajaran, PAI**

**Abstract**

*THE HIDDEN CURRICULUM IN LEARNING PAI. This paper describes the concept of hidden curriculum in a learning process. On learning of Islamic Education (PAI), the hidden curriculum has a significant role in shaping the attitudes and character of students. Through the use of hidden curriculum, teachers and schools will be able to achieve the learning objective of PAI optimal. Based on the research that was conducted, it can be known that hidden curriculum can happen spontaneously, and can appear from the learning experience at school. Besides, although the hidden curriculum does not have a formal and measured system, it has a significant role in creating a learning goal, especially in Islamic education learning. Islamic education learning can be achieved maximally by the support of hidden curriculum through students' activities both in and out of learning process.*

**Keywords:** *hidden curriculum, learning, Islamic Education*

**A. Pendahuluan**

Pembelajaran, kurikulum memiliki peran penting dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Ibarat skenario, kurikulum menjadi dasar dalam “drama” pembelajaran yang akan berlangsung. Secara umum, kurikulum mempunyai empat komponen dasar, yaitu: tujuan, bahan, proses dan evaluasi. Keempat komponen tersebut akan membentuk sebuah siklus yang akan terus berlangsung, saling ketergantungan dari bersinergi. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), merupakan salah satu rumpun mata pelajaran yang bertujuan membangun karakter religius peserta didik. PAI merupakan salah satu dari 5 kelompok mata pelajaran yang menjadi standar isi dalam kurikulum KTSP yang sekarang ini berlaku. Sehingga muatan rumpun pelajaran ini, menjadi standar isi, yang “wajib” diajarkan mulai pendidikan dasar sampai menengah. Dalam standar isi, PAI masuk pada rumpun mata pelajaran agama dan akhlak. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.

PAI memiliki tujuan yang sangat penting dalam pembentukan mental dan moral peserta didik. Meminjam taksonomi Benyamin S. Bloom, PAI mengisyaratkan terpenuhinya semua ranah pendidikan, mulai dari kognisi, psikomotor, dan afeksi. Sehingga dalam pencapaian tujuan pembelajaran PAI diperlukan strategi pembelajaran yang tepat.

Berbicara tentang pembelajaran, maka tidak bisa lepas dengan peran kurikulum. Kurikulum merupakan “cetak biru” proses pembelajaran yang berperan penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Melalui kurikulum yang tepat dan relevan, pembelajaran akan mampu mengantarkan peserta didik kepada tujuan yang hendak dicapai. Tidak hanya sebagai mata pelajaran dan pengalaman belajar, kurikulum juga dipandang sebagai rencana atau program belajar. Seperti yang dikemukakan Hilda Taba “*A curriculum is a plan for learning therefore, what is know about the learning process and the development of the individual has bearing on the shaping of the curriculum*” (Sanjaya, 2010: 7).

Pengertian ini merupakan pengertian kurikulum yang sebenarnya, dimana kurikulum berfungsi sebagai panduan pembelajaran. Segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yang meliputi tujuan, metode, media, materi, evaluasi dan sebagainya tertuang dalam kurikulum. Sehingga, proses pembelajaran merupakan manifestasi dari kurikulum yang telah ada.

Selain kurikulum yang disebutkan di atas, ada juga yang namanya kurikulum tersembunyi atau *hidden curriculum*. Secara mudah, kurikulum tersembunyi dipahami sebagai perangkat konsep yang menjadi panduan dalam pembelajaran, namun tidak secara tersurat. Hal-hal yang tidak terdokumentasikan/direncanakan/diprogramkan atau sifatnya tidak tertulis dan hal ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri, hal-hal inilah yang disebut dengan kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi merupakan aturan tidak tertulis, yang dilaksanakan oleh guru dalam mewujudkan tujuan tertentu dalam pembelajaran. Sehingga peran guru dalam pelaksanaan kurikulum tersembunyi ini sangatlah signifikan.

Jika dikaitkan dengan pembelajaran PAI, maka kurikulum

tersembunyi ini sangatlah relevan. Pembelajaran PAI secara umum berisi tentang aspek tauhid, syariat dan akhlak. Nilai-nilai spiritual dan moralitas menjadi tekanan tersendiri dalam pembentukan perilaku peserta didik. Kurikulum tersembunyi, berfungsi sebagai kegiatan sampingan yang dilakukan guru dalam pembentukan moralitas dan spiritualitas pribadi peserta didik. Melalui kurikulum tersembunyi, guru dan pengelola sekolah atau madrasah akan mampu membekali peserta didik dengan cara yang tidak disangka-sangka.

## **B. Pembahasan**

### **1. Konsep Kurikulum Tersembunyi**

Kurikulum tersembunyi merupakan frase dari gabungan dua istilah, yakni kurikulum (*curriculum*) dan tersembunyi (*hidden*). Kurikulum secara etimologis terdiri dari kata *curere* yang berarti tempat berlari (*gelanggang, arena*) dan *curir* yang artinya pelari atau atlet (Maarif, 2005: 56). Sedangkan secara istilah, kurikulum dapat dipahami sebagai landasan yang digunakan pendidik untuk membimbing peserta didiknya kearah tujuan yang diinginkan melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan dan sikap mental.

Jika dihubungkan dengan istilah tersembunyi, maka secara umum dapat dipahami bahwa kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang tidak terlihat, namun berperan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Sehingga kurikulum tersembunyi dalam hal ini merupakan sesuatu yang menjadi misi tertentu yang hanya diketahui oleh seorang guru ataupun pengelola pendidikan.

Kurikulum tersembunyi dapat dipandang sebagai tujuan yang tidak tertulis (*tersembunyi*). Kurikulum tersembunyi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terjadi tanpa direncanakan terlebih dahulu yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Pada umumnya, yang dimaksud sebagai kurikulum tersembunyi atau kurikulum terselubung adalah sebagai “hasil tersembunyi dari pendidikan dalam latar sekolah atau luar sekolah, hal ini terkait hasil yang dipelajari namun tidak secara tersurat dicantumkan sebagai tujuan” (Martin, 1983: 122). Kurikulum tersembunyi juga dapat merujuk pada penyaluran norma, nilai, dan

kepercayaan yang disampaikan oleh guru baik dalam isi pendidikan formal dan interaksi sosial di dalam lembaga sekolah (Giroux, 1983: 100). Bukan suatu perkara yang mudah untuk mendefinisikan kurikulum tersembunyi, karena terdapatnya perbedaan antar siswa dan pengalamannya serta karena kurikulum itu selalu berubah-ubah seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan keyakinan pada suatu masyarakat. Gambaran tentang kurikulum tersembunyi terwujudkan dalam gagasan bahwa lembaga sekolah tidak hanya sekedar menyebarkan pengetahuan, seperti tercantum dalam kurikulum resmi.

Kurikulum tersembunyi mengacu pada aturan-aturan atau kebiasaan yang tak tertulis, jika tidak dipahami bisa menjadikan sesuatu membingungkan dan membuat kita merasa terisolasi dan keluar dari sana (Blackwell, 2009: 24). Kurikulum tersembunyi diartikan sebagai sesuatu yang dipelajari oleh siswa di sekolah, dimana aktifitas pembelajaran direncanakan dan terorganisir melalui materi yang telah diberikan, tetapi tidak ada dalam diri mereka sendiri, dimasukkan dalam perencanaan atau terkadang dalam kesadaran mereka yang bertanggung jawab atas pengelolaan sekolah (Kelly, 2009: 7).

Kurikulum tersembunyi berfungsi dalam memperkuat ketidaksamaan sosial dengan mendidik siswa dalam berbagai persoalan dan perilaku menurut kelas dan status sosial mereka. Sama halnya seperti adanya ketidaksamaan distribusi modal budaya di masyarakat, berupa distribusi yang berhubungan dalam pengetahuan di antara para siswa (Apple, 1983: 82). Jackson menekankan tiga unsur yang harus ada dalam kurikulum tersembunyi, yaitu: dinamika kelas, interaksi antara guru dan siswa dan relasi kuasa. Kurikulum tersembunyi memperlihatkan pembelajaran sikap, norma, kepercayaan, nilai dan asumsi yang sering diekspresikan sebagai aturan, ritual dan peraturan (Colin, 1991: 24).

Kurikulum tersembunyi mencakup segala bentuk pendidikan, termasuk aktivitas rekreasional dan sosial tradisional, yang dapat mengajarkan bahan-bahan pelajaran yang sebetulnya tak sengaja karena bukan berhubungan dengan sekolah tetapi dengan pengalaman belajar.

Kurikulum tersembunyi juga dapat merujuk pada transmisi norma, nilai, dan kepercayaan yang disampaikan baik dalam isi pendidikan formal dan interaksi sosial di dalam sekolah-sekolah. Kurikulum tersembunyi ini sukar untuk didefinisikan secara eksplisit, karena berbeda-beda antar siswa dan pengalamannya serta karena kurikulum itu selalu berubah-ubah sering dengan berkembangnya pengetahuan dan keyakinan masyarakat.

Konsep kurikulum tersembunyi terekspresikan dalam gagasan bahwa sekolah melakukan lebih dari sekedar menyebarkan pengetahuan, seperti tercantum dalam kurikulum formal. Terdapat berbagai kritik tentang implikasi sosial, landasan politik, dan hasil budaya dari aktivitas pendidikan modern dibalik kurikulum tersembunyi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum tersembunyi mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Harapan yang tidak resmi
2. Hasil pembelajaran yang tidak disengaja
3. Pesan implisit yang timbul dari struktur sekolah
4. Dibuat oleh para siswa
5. Aspek kurikulum tersembunyi

Kurikulum tersembunyi mempunyai dua aspek, yaitu aspek relatif tetap dan aspek berubah-ubah. Aspek relatif tetap meliputi ideologi, keyakinan nilai budaya masyarakat yang mempengaruhi sekolah. Sedangkan aspek yang berubah-ubah meliputi aturan organisasi sistem sosial dan kebudayaan. Termasuk dalam aspek ini adalah pengelolaan kelas oleh guru, penyampaian dan kaidah pengajaran yang hendak di gunakan, dan sistem kenaikan kelas.

Sangatlah penting proses penyerapan siswa terhadap materi aktual melalui kurikulum tersembunyi, hal ini mempunyai implikasi khusus bagi figur yang menyampaikannya. Kegiatan tersebut meliputi penyampaian pelajaran sosial dan moral dengan kurikulum tersembunyi, karena karakteristik moral dan ideologi guru dan figur otoritas lainnya diterjemahkan dalam pelajaran mereka, meskipun hal ini tidak disadarinya (Kohlberg, 1983: 61).

Kurikulum tersembunyi bukan membicarakan masalah isi,

namun lebih menekankan pada proses dari apa yang sebenarnya terjadi (Smith, 1991: 258). Sebagai contoh, ketika sekolah mengharuskan siswa untuk memakai seragam, maka apa yang sebenarnya sedang diajarkan kepada siswa? Persamaan, keserasian, atau hal lain? Ini menjadi fokus kajian dalam kurikulum tersembunyi.

## **2. Konsep Pendidikan Agama Islam**

### **a. Pengertian**

Ada banyak definisi tentang pendidikan Islam. Namun, secara umum, pendidikan Islam dapat dipahami sebagai proses untuk membentuk manusia (muslim) yang mulia, untuk mampu mewujudkan keshalehan individu dan sosial dalam rangka pencapaian tujuan risalah Islam.

Di sini pendidikan Islam tidak semata-mata menekankan pada keshalehan individu, yakni kesalehan dalam hubungan dengan Tuhan. Tetapi lebih dari itu mampu membaca, memahami dan memberikan solusi terhadap realitas sosial yang ada, sehingga misi Islam dapat terwujud di dunia ini. Hal ini sesuai dengan eksistensi keterciptaan manusia itu sendiri, yaitu di samping sebagai hamba Allah (*Abdullah*), juga sebagai penyelamat bumi, wakil Allah di muka bumi (*khalifah Allah fi al ardhi*). Sedangkan definisi pendidikan agama Islam disebutkan dalam Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SD dan MI adalah "Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur'an dan Hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.

### **b. Tujuan Pendidikan Agama Islam**

Tujuan adalah suasana ideal yang ingin diwujudkan. Suasana ideal dalam pendidikan Islam, tampak pada tujuan akhir yang biasanya dirumuskan secara padat dan singkat (Muhaimin, 1999: 103), seperti kedewasaan, insan kamil, manusia seutuhnya atau kebahagiaan dunia

dan akhirat. Pencapaian suasana ideal tersebut tidak hanya merujuk pada tujuan akhir saja, Karena tujuan tersebut terlalu ideal dan belum memberikan suatu gambaran makna yang jelas, sangat normatif dan tidak operatif. Sehingga diperlukan penjabaran yang lebih rinci ke dalam bagian-bagian tertentu. Penjabaran tersebut sering disebut dengan tujuan khusus.

Pendidikan agama Islam juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam, keterampilan mempraktekannya, dan meningkatkan pengalaman ajaran Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini kemudian disebut dengan keberagaman, yaitu menjadi seorang Muslim dengan interaksi keberagaman yang penuh kesungguhan dan didasari oleh keimanan yang kuat.

Secara umum tujuan utama pendidikan Islam dapat disimpulkan untuk membangun manusia yang sesuai dengan fitrahnya, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah. Dapat kita tegaskan bahwa selain untuk mampu mendekatkan diri kepada sang khaliq, manusia yang sempurna juga mampu berhadapan dengan realitas kehidupan serta menebarkan cinta kasih kepada seluruh alam. Output pendidikan Islam adalah mereka yang tidak hanya mempunyai kesalehan individu, tapi juga mempunyai keshalehan sosial. Keadilan, perdamaian, persamaan dan kemanusiaan yang kemudian tercermin dalam term “rahmatan li alamin” adalah bagian penting yang harus diwujudkan Pendidikan Islam.

### *c. Dasar Pendidikan Agama Islam*

Dasar pendidikan Islam, dapat dikategorikan kedalam beberapa aspek sebagai berikut:

#### 1) Dasar yuridis/hukum

Dasar yuridis/hukum ialah dasar-dasar pelaksanaan pendidikan agama Islam yang bersumber dari peraturan perundang-undang yang secara langsung ataupun secara tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah-sekolah atau pun di madrasah.

#### 2) Dasar Religius

Dasar religius adalah dasar pelaksanaan pendidikan agama yang bersumber dari ajaran agama, dalam hal ini ajaran agama Islam. Berkaitan dengan dasar agama dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam, maka dasar pertama dan utama ialah Al-Qur'an yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, karena didalam Al-Qur'an sudah tercakup segala masalah hidup.

### 3) Dasar sosial

Dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan bimbingan dan petunjuk yang benar, yang bernilai mutlak untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam kehidupan di dunia ini, manusia merupakan makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dalam kehidupan bersama secara sosial inilah di butuhkan agama sebagai pegangan hidup.

### 4) Muatan Pendidikan Agama Islam

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, disebutkan bahwa Pendidikan agama Islam (PAI) dalam pembelajaran di Madrasah terdiri dari 4 mata pelajaran yaitu:

| Mata Pelajaran      | Madrasah Ibtidaiyyah (MI)   | Madrasah Tsanawiyah (MTs)   | Madrasah Aliyah (MA)   |
|---------------------|---|---|--|
| Al Qur'an dan Hadis | <p>a. Membaca, menghafal, menulis, dan memahami surat-surat pendek dalam Al Qur'an seperti surat al-Fatihah, an-Naas sampai dengan surat ad-Dhuha.</p> <p>b. Menghafal, memahami arti, dan mengamalkan hadis-hadis pilihan tentang akhlak dan amal salih.</p> | <p>a. Memahami dan mencintai Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam.</p> <p>b. Meningkatkan pemahaman Al-Qur'an, al-Fatihah, dan surat pendek pilihan melalui upaya penerapan cara membacanya, menangkap maknanya, memahami kandungan isinya, dan mengaitkannya dengan fenomena kehidupan.</p> <p>c. Menghafal dan memahami makna hadis-hadis yang terkait dengan tema isi kandungan surat atau ayat sesuai dengan tingkat perkembangan anak.</p> | <p>Memahami isi pokok Al-Qur'an, fungsi, dan bukti-bukti kemurniannya, istilah-istilah hadis, fungsi hadis terhadap Al-Qur'an, pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya, serta memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tentang manusia dan tanggung jawabnya di muka bumi, demokrasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> |

## Hikmatul Mustaghfiroh

|               |  |   |  |
|---------------|--|---|--|
| Akidah Akhlak | <p>Mengenal dan meyakini rukun iman dari iman kepada Allah sampai dengan iman kepada Qada dan Qadar melalui pembiasaan dalam mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, pengenalan, pemahaman sederhana, dan penghayatan terhadap rukun iman dan al-asma' al-husna, serta pembiasaan dalam pengamalan akhlak terpuji dan adab Islami serta menjauhi akhlak tercela dalam perilaku sehari-hari.</p> | <p>a. Meningkatkan pemahaman dan keyakinan terhadap rukun iman melalui pembuktian dengan dalil naqli dan aqli, serta pemahaman dan penghayatan terhadap al-asma' al-husna dengan menunjukkan ciri-ciri/ tanda-tanda seseorang dalam fenomena kehidupan dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>b. Membiasakan akhlak terpuji seperti ikhlas, taat, khauf, taubat, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, qana'ah, tawadhu', husnuzh-zhan, tasamuh, ta'awun, berilmu, kreatif, produktif dan pergaulan remaja, serta menghindari akhlak tercela seperti riya, nifak, ananiah, putus asa, marah, tamak, takabur hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah.</p> | <p>a. Memahami istilah-istilah akidah, prinsip-prinsip, aliran-aliran dan metode peningkatan kualitas akidah serta meningkatkan kualitas keimanan melalui pemahaman dan penghayatan al-asma' al-husna serta penerapan perilaku bertauhid dalam kehidupan.</p> <p>b. Memahami istilah-istilah akhlak dan tasawuf, menerapkan metode peningkatan kualitas akhlak, serta membiasakan perilaku terpuji dan menghindari perilaku tercela.</p> |
| Fikih         | <p>Mengenal dan melaksanakan hukum Islam yang berkaitan dengan rukun Islam mulai dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan taharah, salat, puasa, zakat, sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan tentang makanan dan minuman, khitan, kurban, dan cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.</p>  | <p>Memahami ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdah dan muamalah serta dapat mempraktikkan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari.</p>  | <p>Memahami dan menerapkan sumber hukum Islam dan hukum taklifi, prinsip-prinsip ibadah dan syari'at dalam Islam, fikih ibadah, mu'amalah, munakahat, mewaris, jimayah, siyasa, serta dasar-dasar istinbath dan kaidah ushul fiqh.</p>   |

|                                |   |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|
| Sejarah<br>Kebudayaan<br>Islam | Mengenal, mengidentifikasi, meneladani, dan mengambil ibrah dari sejarah Arab pra-Islam, sejarah Rasulullah Saw. khulafaurrasyidin, serta perjuangan tokoh-tokoh agama Islam di daerah masing-masing. | <p>a. Meningkatkan pengenalan dan kemampuan mengambil ibrah terhadap peristiwa penting sejarah kebudayaan Islam melalui perkembangan masyarakat Islam pada masa Nabi Muhammad Saw. dan para khulafaurrasyidin, Bani Umaiyah, Abbasiyah, Al-Ayyubiyah sampai dengan perkembangan Islam di Indonesia.</p> <p>b. Mengapresiasi fakta dan makna peristiwa-peristiwa bersejarah dan mengaitkannya dengan fenomena kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni.</p> <p>c. Meneladani nilai-nilai dan tokoh-tokoh yang berprestasi dalam peristiwa bersejarah.</p> | <p>a. Memahami dan mengambil ibrah sejarah dakwah Nabi Muhammad Saw. pada periode Makkah dan periode Madinah, masalah kepemimpinan umat setelah Rasulullah Saw. wafat, perkembangan Islam pada abad klasik/zaman keemasan (650-1250 M), abad pertengahan/zaman kemunduran (1250 M-1800 M), masa modern/zaman kebangkitan (1800-sekarang), serta perkembangan Islam di Indonesia dan di dunia</p> |
|                                |   |  | <p>b. Mengapresiasi fakta dan makna peristiwa-peristiwa bersejarah dan mengaitkannya dengan fenomena kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni.</p>   |
|                                |   |  | <p>c. Meneladani tokoh-tokoh Islam yang berprestasi dalam perkembangan sejarah kebudayaan/peradaban Islam.</p>   |

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa pembelajaran PAI merupakan pembelajaran yang tidak hanya menekankan pada penguasaan materi (kognitif) saja, namun lebih pada pembentukan sikap peserta didik (afeksi) dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai bekal bagi kehidupan di masa yang akan datang. Strategi pembelajaran diperlukan tidak hanya dari kurikulum yang tertulis dan terencana,

namun juga dari sesuatu yang tidak tertulis yang itu menjadi strategi tertentu dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selain itu, kurikulum tersebut juga terkadang tidak terencana, muncul dengan tiba-tiba, yang kemudian dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Pembelajaran PAI di madrasah sering kali menggunakan pola kurikulum ini dalam rangka pembentukan kepribadian Islami siswa. Sebagai contoh, pemberlakuan paket doa secara rutin tiap pagi, dengan konfigurasi doa-doa tertentu secara bersama-sama, adalah mempunyai makna tersendiri dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam konteks ini, kegiatan ini bias saja dimasukkan sebagai salah satu bentuk dari kurikulum tersembunyi. Madrasah sebagai basis pendidikan Islam memiliki berbagai aktifitas keagamaan yang terkadang tidak sesuai dengan kurikulum formal yang ada. Namun hal ini-dipercaya-sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian siswa. Ini secara tidak langsung menjadi faktor pendukung bagi pencapaian pembelajaran PAI yang masuk dalam kurikulum formal.

Secara formal, Kemenag sebagai otoritas pengawas pendidikan madrasah memang tidak mengeluarkan kurikulum khusus untuk pendidikan umum madrasah, kecuali kurikulum pelengkap untuk mata pelajaran agama. Bagi madrasah yang ada di lingkungan pesantren, mempunyai peluang yang cukup besar bagi adanya hidden curriculum. Kurikulum tersembunyi ini biasanya dilaksanakan diluar jam pelajaran resmi (Azra, 2005: 158).

Kurikulum tersembunyi yang menjadi kultur sekolah lebih banyak mempengaruhi proses pembentukan kepribadian siswa daripada kurikulum formal yang ada. Berbagai macam fungsi yang ada dalam lembaga pendidikan akan tampak dari apa yang faktual dilakukan oleh individu di dalam lembaga pendidikan tersebut (Koesoema, 2006: 184), meskipun dalam hal ini tidak berarti kita meremehkan peran kurikulum formal yang ada. Karena bagaimanapun, kurikulum formal memiliki struktur tujuan, perencanaan, pelaksanaan dan sistem evaluasi yang terukur secara jelas. Fungsi kurikulum tersembunyi tersembunyi dalam hal ini adalah sebagai penunjang bagi pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam kurikulum formal.

Kurikulum tersembunyi merupakan salah satu karakteristik pendidikan yang secara moral-sosial relevan, yaitu proses pendidikan yang didalamnya mengandung nilai-nilai yang diperlukan dalam kehidupan nyata dalam masyarakat (Soedijarto, 2008: 339). Kurikulum tersembunyi juga menekankan perhatian bahwa dalam kelas atau sekolah, ada hubungan yang sangat terkait dengan lembaga kehidupan publik. Pengalaman sosial dalam hal ini sangat cocok dan relevan dengan keadaan siswa dalam sekolah, sehingga siswa harus ditanamkan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat (Lynch, 1989: 2).

Hal ini setidaknya memiliki dua alasan yang mendasar, pertama sekolah merupakan dasar kehidupan siswa. Di sini, sekolah merupakan miniatur masyarakat yang ada. Ketika di sekolah siswa ditanamkan dengan nilai-nilai sosial, maka siswa akan dilatih untuk hidup secara baik dan benar di masyarakat.

Kedua, peserta didik adalah calon pemimpin masyarakat. Dengan membekali peserta didik dengan nilai dan norma sosial-agama, maka siswa nantinya ketika hidup ditengah masyarakat akan mampu menjadi pioneer bagi masyarakat yang baik. Kurikulum tersembunyi mempunyai titik signifikansinya dalam membekali peserta didik dengan sistem nilai yang Islam.

Kurikulum tersembunyi merupakan pesan-pesan yang dibawa oleh sekolah, namun tidak dikemas dalam satu pelajaran tersendiri. Misalnya tentang, patriotisme, kebaikan demokrasi, kejujuran, yang diselipkan ketika anak sedang belajar pelajaran matematika (Puline, 2007: 62).

Sebagai contoh, ketika guru menyuruh siswa untuk mengerjakan tugas secara mandiri, itu berarti ada nilai kejujuran yang sedang di ujikan kepada siswa, meskipun guru tidak menyebutkan hal itu kepada siswa. Ironisnya, sering terjadi misalnya ketika guru mengajarkan pelajaran akidah Akhlak tentang kejujuran, namun secara tidak langsung guru mengajarkan siswa untuk tidak jujur, yaitu dengan membiarkan siswa menyontek, bekerjasama dengan temannya dan sebagainya. Hal yang seperti inilah yang tidak akan kita temukan dalam kurikulum formal, sehingga peran kurikulum tersembunyi dalam hal ini sangat diperlukan.

Implementasi kurikulum tersembunyi, diperlukan kemampuan guru dan pengelola pendidikan dalam pemahaman dan pelaksanaan kurikulum ini. Kurikulum tersembunyi bisa juga diintegrasikan dengan program pengembangan diri peserta didik. Kegiatan pengembangan diri ini secara tidak terprogram dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan terjadwal, seperti: doa bersama, istighosah, upacara bendera, senam, ibadah khusus keagamaan, pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri;
2. Spontan, adalah kegiatan yang tidak terjadwal dalam kejadian khusus seperti: pembiasaan perilaku memberi salam, saling tolong menolong, membuang sampah pada tempatnya, budaya antri, mengatasi silang pendapat (pertentangan); dan
3. Keteladanan, adalah kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari seperti: tawadhu' (rendah hati), berpakaian rapi, sopan, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji kebaikan dan atau keberhasilan orang lain, disiplin dan sebagainya.
4. Melalui program tersebut, akan tercipta lingkungan pembelajaran dalam sekolah yang kondusif dan produktif. Dan hal ini secara langsung akan membantu tercapainya tujuan pembelajaran PAI. Inilah makna kurikulum tersembunyi, di mana bentuknya yang tidak terlihat, namun mempunyai peran yang signifikan.

### **C. Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kurikulum tersembunyi merupakan kurikulum yang tidak tampak, bisa terjadi secara spontanitas, tanpa terencana dan bias muncul dari pengalaman belajar dalam sekolah.
2. Meskipun kurikulum tersembunyi tidak mempunyai sistematika yang formal dan terukur, namun sangat berperan dalam mewujudkan sebuah tujuan pembelajaran, khususnya pembelajaran PAI.
3. Pembelajaran PAI akan dapat dicapai dengan maksimal dengan dukungan kurikulum tersembunyi melalui aktifitas siswa, baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran.

## Daftar Pustaka

- Apple, Michael and Nancy King. 1983. *What Do Schools Teach? The Hidden Curriculum and Moral Education*. Ed. Giroux, Henry and David Purpel. Berkeley, California: McCutchan Publishing Corporation.
- Azra, Azumardi 2005. *Dari Harvard Sampai Mekkah*. Jakarta: Republika.
- Blackwell, Jen. et.al. 2009. *Hidden Curriculum One Calendar For Kids*. USA: APC.
- Giroux, Henry and Anthony Penna. 1983. *Social Education in the Classroom: The Dynamics of the Hidden Curriculum. The Hidden Curriculum and Moral Education*. Ed. Giroux, Henry and David Purpel. Berkeley, California: McCutchan Publishing Corporation.
- Iskak, Ramli. 2003. *Inilah Kurikulum Sekolah*. Kuala Lumpur: PTS.
- Kelly, Vic. 2009. *The Curriculum: Theory and Practice*. California: Thousand Oaks.
- Koesoema, Doni. 2006. *Pendidikan Karakter di Jaman Keblinger*. Jakarta: Grasindo.
- Kohlberg, Lawrence. 1983. *The Moral Atmosphere of the School. The Hidden Curriculum and Moral Education*. Ed. Giroux, Henry dan David Purpel. Berkeley, California: McCutchan Publishing Corporation.
- Lynch, Kathleen. 1989. *The Hidden Curriculum, Reproduction in Education, an Appraisal*. USA: The Falmer Pres.
- Maarif, Samsul. 2005. *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*. Jogjakarta: Logung Pustaka.
- Marsh, Colin J. 1992. *Key Concept for Understanding Curriculum*. USA: The Falmer Press.
- Martin, Jane. 1983. *What Should We Do with a Hidden Curriculum When We Find One? The Hidden Curriculum and Moral Education*. Ed. Giroux, Henry, dan David Purpel. Berkeley, California: McCutchan Publishing Corporation.

- Muhaimin. 1999. *Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman*. Cirebon: Pustaka Dinamika.
- Permenag Nomor 2 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.
- Pudjiastuti, Pauline. 2007. *Sosiologi SMA kelas X*. Jakarta: Grasindo.
- Sanjaya, Wina. 2008. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Smith, Linda. 1991. *Ide-ide Filsafat dan Agama, Dulu dan Sekarang*. Yogyakarta: Kanisus.
- Soedijarto. 2008. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Tilaar, H.A.R. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan (Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural)*. Magelang: Indonesia Tera.

# MANAJEMEN KURIKULUM BIDANG PENELITIAN DI STAIN KUDUS

**Nurul Hikmah**

LPPG (Lembaga Peningkatan Profesi Guru),  
Jawa Tengah, Indonesia  
nununk.haikal@gmail.com

## **Abstrak**

Penelitian tentang pengorganisasian kurikulum bidang penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuannya untuk (1) menjelaskan perencanaan kebijakan kurikulum bidang penelitian, (2) mendeskripsikan silabi kurikulum bidang penelitian, dan (3) mendeskripsikan satuan acara perkuliahan kurikulum bidang penelitian di STAIN Kudus. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut: (1) perencanaan kurikulum 2008 STAIN Kudus menggunakan pendekatan dengan polaintegrated curriculum, (2) Silabi ketiga mata kuliah serumpun bidang penelitian itu berbeda secara jelas dari aspek ruang lingkungannya, (3) Satuan acara perkuliahan untuk ketiga mata kuliah rumpun bidang penelitian disusun dengan komponen kode mata kuliah, kelompok jenis mata kuliah, program studi, strata kesarjanaan, bobot sistem kredit semester, tatap muka empat belas kali, waktu sesuai bobot kredit, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, metode pembelajaran, sistem penilaian, serta bahan dan sumber belajar.

**Kata kunci : kurikulum, penelitian, STAIN KUDUS**

## **Abstract**

*CURRICULUM MANAGEMENT OF RESEARCH IN STAIN KUDUS. Research on organizing curriculum in area of research uses a qualitative approach. The goal is to (1) describe the policy planning*

*curriculum research field, (2) describe the curriculum syllabus of research areas, and (3) describe the event lecture curriculum unit area of research at STAIN Kudus. The results of his research as follows: (1) curriculum planning 2008 of STAIN Kudus uses integrated curriculum approach, (2) the syllabus of three subjects allied fields of study that differs clearly from the aspect of its scope, (3) Units event lecture for three courses grove area of research compiled by the component code of subjects, types of courses, programs of study, undergraduate scholarship, the weight of credit semester system, face to face fourteen times, time according to the weight of the credit, the standard of competence, basic competence, indicators, materials principal, teaching methods, assessment systems, as well as materials and learning resources.*

**Keywords:** *curriculum, research, STAIN KUDUS*

## **A. Pendahuluan**

Perguruan tinggi mempunyai fungsi utamanya sebagai lembaga khusus yang menangani sumber daya manusia di bidang keilmuan. Perguruan tinggi mempunyai tri dharma, yang disebut sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu dharma pendidikan, dharma penelitian, dan dharma pengabdian pada masyarakat. Perguruan tinggi mempunyai tugas utama dalam menyelenggarakan pendidikan tingkat tinggi. Ketiga dharma itu merupakan satu kesatuan integral yang tidak terpisah. Eksistensi sebuah kampus harus merepresentasikan ketiganya tanpa kecuali. Dengan demikian, kampus bukan hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga penelitian, dan juga lembaga pengabdian pada masyarakat.

Salah satu kendala umum dalam pengajaran adalah masalah kurikulum. Kurikulum yang statis akan menjadi materi didik yang tertinggal (*out of date*) dengan perkembangan sosial yang cepat. Kurikulum harus dinamis, sesuai dengan perkembangan sosial budaya. PTAIN sebagai perguruan tinggi, setiap empat atau lima tahun sekali harus melakukan pengembangan kurikulum dalam bentuk peninjauan kurikulum. Namun peninjauan itu bukan hanya berdampak administratif-formalistik, tetapi harus menjadi elan vital pengembangan kurikulum yang merespon perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan real masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi.

Masalah lain dalam kurikulum adalah tentang isi kurikulum yang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Isi kurikulum seharusnya merujuk pada rumusan tujuan atau sesuai dengan visi dan misi pendidikan. Kesenjangan ini harus diatasi dengan upaya penyesuaian terhadap tujuan. Komponen kurikulum (Nasution, 1993:3-4) yang terdiri dari tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar dan penilaian harus dirumuskan secara serasi, selaras dan seimbang, baik untuk kurikulum nasional maupun kurikulum muatan lokal.

Masalah lebih khusus dalam pemberlakuan kurikulum di perguruan tinggi adalah yang terkait dengan kurikulum bidang penelitian yang diajarkan dan dilatihkan kepada mahasiswa. Karena itu diupayakan evaluasi untuk pengembangannya. Evaluasi terkadang kurang terukur sehingga evaluasi dilakukan tanpa standarisasi sesuai kurikulum yang ideal. Evaluasi sebagai komponen penting kurikulum juga sering tidak dirumuskan secara jelas, meskipun tidak semua aspek penilaian itu diukur dengan angka. Kejelasan standarisasi evaluasi pada rumusan kurikulum akan membantu upaya pencapaian tujuan melalui proses evaluasi yang valid dan reliabel. Namun, gejala di atas tidak menyeluruh. Perguruan tinggi tertentu mempunyai sisi persamaan dan perbedaan dalam mengaplikasikan kurikulum bidang penelitian. Faktor-faktor persamaan dan perbedaan itu akan menjadi kajian yang menarik dalam penelitian ini. Sehingga, secara keilmuan penelitian ini mempunyai urgensi untuk dilaksanakan karena perguruan tinggi masa kini mengalami perkembangan dalam berbagai sendi, baik secara fisik maupun non-fisik, terutama perkembangan penelitian bagi calon sarjana, sarjana, magister, dan doktor.

Sisi lain yang melatarbelakangi penelitian ini adalah tentang kompetensi dalam pendidikan agama (kajian keislaman) yang tertampung pada PTAIN. Struktur dan karakteristik ilmu-ilmu yang dipelajari dan dikembangkan di perguruan tinggi pada umumnya bersifat terbuka, general dan belum membumi sehingga membutuhkan pengembangan dan pemberdayaan lebih lanjut. Upaya ini dalam satu sisi merupakan bagian dari sistem perencanaan institusional yang sudah dirumuskan sebelumnya, dan dalam sisi yang lain merupakan respon terhadap kebijakan baru kurikulum pendidikan di Indonesia yang berciri kurikulum berbasis kompetensi.

Upaya-upaya pengembangan kurikulum di perguruan tinggi tersebut sangat menarik karena merupakan bidang penting dalam perkembangan pendidikan dewasa ini.

Kajian ini adalah tentang kurikulum bidang penelitian pada penyelenggaraan pendidikan sarjana, yang secara rinci difokuskan pada perencanaan kebijakan kurikulum bidang penelitian di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, silabi kurikulum bidang penelitian di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, dan satuan acara perkuliahan (SAP) kurikulum bidang penelitian di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. Tujuan kajian ini berupaya menjelaskan perencanaan kebijakan kurikulum bidang penelitian di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, mendeskripsikan silabi kurikulum bidang penelitian di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, dan mendeskripsikan satuan acara perkuliahan (SAP) kurikulum bidang penelitian di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

Model yang digunakan dalam kajian ini adalah deskripsi kualitatif dengan satu lokasi penelitian di STAIN Kudus. Karakter utama dari pendekatan kualitatif adalah bukan dimaksudkan untuk menguji suatu teori, tetapi untuk mengungkapkan fenomena dan realitas melalui data-data secara deskriptif. Data-data spesifik dicari maknanya untuk membuat kesimpulan yang general dari makna-makna yang diperoleh dari data-data tersebut. Kajian dengan pendekatan kualitatif tidak ditentukan batas waktu secara jelas sampai peneliti memperoleh pemahaman yang benar-benar mendalam tentang obyek yang diteliti. Namun karena pertimbangan dan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, maka penelitian dapat diakhiri dan dibuat laporannya jika dianggap telah mencapai data dan analisis sesuai dengan rancangan. Namun demikian, penelitian ini tetap dibatasi waktu, yaitu dilaksanakan sepanjang pertengahan hingga akhir Juni 2013.

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu pengamatan/observasi, wawancara dan dokumentasi. Mestinya, focus group discussion (FGD) juga digunakan, selain dengan tujuan menemukan makna sebuah tema, FGD juga dimaksudkan untuk menarik kesimpulan terhadap makna-makna intersubjektif yang sulit dimaknai sendiri oleh peneliti karena keterbatasan informasi

sehingga mendapat obyektifitas dari peserta diskusi. Namun, dominasi pengumpulan data dari dokumen.

Dalam pengamatan, dua hal penting (Nasution, 1996:58) yang diperhatikan, yaitu informasi dan konteks. Dengan ketepatan dalam menghubungkan keduanya, maka didapat maknanya, karena makna diperoleh dari keterkaitan antara informasi dan konteksnya. Bentuk pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu: (1) pengamatan secara deskriptif, (2) pengamatan secara terfokus, dan (3) pengamatan selektif.

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan informasi dari sumber yang berupa dokumen/arsip, foto, dan bahan statistik yang lain. Data diperoleh dari dokumentasi data-data, baik yang berupa tulisan/dokumen resmi maupun dokumen pribadi seperti makalah, artikel, catatan dan surat-surat, misalnya buku panduan, buku laporan, buku laporan dan sebagainya. Agar data yang diperoleh, yang berujung pada kesimpulan atau verifikasi, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, meliputi: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif dan pengecekan. Namun, dalam penelitian ini, tidak semua teknik di atas digunakan, hanya beberapa teknik yang tepat dan diperlukan saja yang digunakan. Untuk pengecekan keabsahan data menggunakan empat kriteria Moleong (2001: 15), yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Untuk memberikan pemaknaan atas data atau fenomena yang ditemukan dan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka dilakukan analisis dengan pendekatan kualitatif dengan eksplanasi bersifat deskripsi. Dengan teknik analisis deskriptif, langkah yang ditempuh dalam analisis ini adalah mengorganisir data berupa gambar, foto, dokumen yang berupa laporan, biografi, artikel, buku-buku pedoman dan sebagainya (Moleong, 2001:103). Selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisis dengan model siklus interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Milles dan Huberman (1992:20).

## **B. Pembahasan**

### **1. Ruang Lingkup Kurikulum Perguruan Tinggi**

Salah satu usaha peningkatan mutu mahasiswa adalah dengan menentukan kebijakan dan penerapan kurikulum, baik kurikulum umum maupun khusus di perguruan tinggi, termasuk kurikulum bidang penelitian. Kurikulum umum biasanya kurikulum tingkat perguruan tinggi, kurikulum lokal didesain dan diajarkan kepada mahasiswa dengan tujuan dan target tertentu sesuai program studi masing-masing. Melihat implementasinya di lapangan, konsep kurikulum ini berbeda menyesuaikan tingkatan usia peserta didik dan jenjang sebuah lembaga pendidikan tersebut. Tingkatan-tingkatan tersebut dimulai dari kurikulum tingkat dasar, kurikulum tingkat menengah, kurikulum tingkat atas. Khusus dalam pembahasan ini penulis fokuskan kajian pada kurikulum tingkat atas pada perguruan tinggi.

#### *a. Pengertian Kurikulum Perguruan Tinggi*

Menurut Subandijah (1996: 2-3) dalam bukunya Pengembangan dan Inovasi Kurikulum, yang dimaksud kurikulum adalah “aktifitas dan kegiatan belajar yang direncanakan, diprogramkan bagi peserta didik di bawah bimbingan sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah”. Isi definisi tersebut dapat diklasifikasi menjadi dua substansi, yaitu (1) kurikulum sebagai program yang direncanakan dan dilaksanakan di sekolah dan (2) kurikulum sebagai program yang direncanakan dan dilaksanakan secara nyata di kelas. Perencanaan program dan pelaksanaannya tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kurikulum berkedudukan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan.

Pendidikan tinggi di Indonesia melaksanakan proses pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum nasional. Di samping itu, lembaga pendidikan juga menerapkan kurikulum muatan lokal yang ditentukan oleh masing-masing satuan lembaga pendidikan. Kedua macam kurikulum itu merupakan keharusan bagi setiap lembaga pendidikan untuk menerapkannya. Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003, kurikulum pendidikan wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, dan ilmu-ilmu dasar dan ilmu-

ilmu terapan yang mendukung tujuan pendidikan masing-masing fakultas, jurusan, dan program studi.

Jadi disamping materi yang telah ditentukan secara nasional, sebuah lembaga pendidikan harus menentukan dan mengajarkan kurikulum muatan lokal yang didesain, diajarkan dan diujikan di lembaga pendidikan tersebut. Dalam hal ini, perguruan tinggi menerapkan suatu sistem kurikulum bidang penelitian karena termasuk dalam bidang terapan yang pasti digunakan oleh mahasiswa dalam menyusun penelitian misalnya skripsi, atau tesis, maupun disertasi.

### **b. Pengembangan Kurikulum Bidang Penelitian**

Pengembangan kurikulum menurut Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto (1986:41) adalah “kegiatan menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan, pelaksanaan dan penyempurnaan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama kegiatan pengembangan tersebut”. Sedangkan pengembangan kurikulum menurut *Centre for Educational Research and Innovation* (CERI) dalam rumusan Soetopo (1986: 45) didefinisikan sebagai berikut:

*“curriculum development is the proces of analyzing and refining goals, aims and objectives, together with the translation of these into the content of course by formal or informal methods”.*

Kegiatan pengembangan kurikulum meliputi penyusunan kurikulum, pelaksanaannya di dalam proses belajar mengajar dan penyempurnaan terhadap komponen-komponen tertentu atas dasar hasil penilaian.

### **c. Landasan Pengembangan Kurikulum**

Menurut Nasution (1993: 1-2), pengembangan kurikulum didasarkan atas asas-asas tertentu, yaitu : (1) asas filosofis yang pada hakekatnya menentukan tujuan umum pendidikan, (2) asas sosiologis yang memberikan dasar untuk menentukan apa yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, budaya dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (3) asas organisatoris yang memberikan dasar-dasar dalam bentuk bagaimana bahan pelajaran disusun dan bagaimana luas dan urutannya, dan (4) asas psikologis yang memberikan prinsip-prinsip tentang perkembangan manusia

dalam berbagai aspek serta cara belajar agar bahan yang disediakan dapat dicerna dan dikuasai peserta didik sesuai dengan taraf perkembangannya.

Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto (1986: 46) menerangkan bahwa landasan pengembangan kurikulum dapat menjadi “titik tolak” sekaligus menjadi “titik sampai”. Titik tolak berarti pengembangan kurikulum dapat didorong oleh pembaharuan tertentu seperti penemuan teori belajar yang baru dan perubahan tuntutan masyarakat terhadap fungsi lembaga pendidikan. Titik sampai berarti kurikulum harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat merealisasikan perkembangan tertentu, seperti dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan-tuntutan sejarah masa lalu, perbedaan latar belakang peserta didik, nilai-nilai filsafat suatu masyarakat dan tuntutan-tuntutan kultur tertentu.

#### *d. Perencanaan Kurikulum*

Perencanaan menurut St. Vembriarto (1993: 28) dalam bukunya Pengantar Perencanaan Pendidikan adalah penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematis terhadap proses pengembangan pendidikan yang bertujuan untuk menjadikan pendidikan lebih efektif dan efisien dalam menanggapi kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat. Ada empat persoalan penting yang dibahas dalam perencanaan. Keempat hal tersebut yaitu (1) tujuan apa yang dicapai dengan perencanaan itu, (2) status sistem pendidikan yang ada dan bagaimana keadaannya sekarang, (3) kemungkinan-kemungkinan pilihan apa yang ditempuh untuk mencapai tujuan, dan (4) strategi yang terbaik untuk mencapai tujuan.

Jadi perencanaan dalam pendidikan adalah sebagai fungsi manajemen pendidikan. Fungsi perencanaan tersebut adalah untuk menentukan keadaan yang sebaik-baiknya dari hubungan-hubungan sumber daya internal dan eksternal dalam suatu sistem pendidikan dengan keadaan yang dinamis serta cara yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu sumber daya yang harus direncanakan adalah “materi pendidikan” atau kurikulum. Sumber daya “kurikulum” ini membutuhkan perencanaan yang tepat

dan strategis. Hasil perencanaan kurikulum yang baik menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Dalam konteks perkembangan, kurikulum harus selalu dikembangkan. Fungsi perencanaan kurikulum dan pengembangannya itu dimaksudkan untuk pengelolaan pendidikan agar tidak mengalami ketertinggalan.

*e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kurikulum*

Soetopo (1986: 40-41) mengemukakan tiga faktor umum yang mendorong pengembangan kurikulum, yaitu (1) perubahan yang diinginkan masyarakat sehingga mereka merencanakan adanya perubahan yang cukup penting di dalam kurikulum dan sistem pendidikan, (2) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, dan (3) pertambahan pesat penduduk dunia. Menurut Nasution (1993: 159) dalam bukunya Pengembangan Kurikulum, proses pengembangan kurikulum dijalankan karena (1) hasil penelitian dan pengembangan, (2) interaksi sosial, dan (3) metode pemecahan masalah.

*f. Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum*

Menurut Soetopo (1986: 48), prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum meliputi: (1) prinsip relevansi, yang meliputi relevansi dengan lingkungan, perkembangan masa dan tuntutan dunia kerja, (2) prinsip efektifitas yang meliputi efektifitas mengajar pendidik dan efektifitas belajar peserta didik, (3) prinsip efisiensi dalam penggunaan sumber daya pendidikan. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menurut Subandijah (1993:48) adalah: (1) prinsip relevansi, (2) prinsip efektifitas dan efisiensi, (3) prinsip kesinambungan, (4) prinsip fleksibilitas, (5) prinsip berorientasi pada tujuan, (6) prinsip pendidikan seumur hidup, dan (6) prinsip kesesuaian dengan model pengembangan kurikulum.

*g. Pendekatan dan Model Pengembangan Kurikulum*

Pendekatan dalam pengembangan kurikulum diorientasikan pada (1) tujuan pendidikan dan (2) bahan pelajaran. Subandijah (1993:55) mengemukakan tiga pendekatan dengan pola organisasi bahan sebagai berikut : (1) pendekatan dengan pola subject matter curriculum, yaitu pendekatan yang menekankan pada mata pelajaran/mata kuliah secara terpisah-pisah, (2) pendekatan dengan pola corelated curriculum, yaitu pendekatan dengan pola

pengelompokan beberapa mata kuliah yang seiring (serumpun), dan (3) pendekatan dengan pola *integrated curriculum*, yaitu pendekatan dengan penyatuan keseluruhan mata kuliah sebagai bahan ajar yang sistematis-integralistik.

#### ***h. Tahap-tahap Pengembangan Kurikulum***

Langkah-langkah utama dalam perencanaan kurikulum misalnya dengan model Tyler dalam Nasution (1993: 140) meliputi (1) menentukan tujuan pendidikan, (2) menentukan proses belajar mengajar, (3) menentukan organisasi kurikulum, dan (4) menentukan cara penilaian hasil belajar. Adapun tahap-tahap dalam pengembangan kurikulum menurut Subandijah (1993: 215) adalah: (1) pengembangan kurikulum pada tingkat lembaga, (2) pengembangan kurikulum pada tingkat/setiap bidang studi, dan (3) pengembangan pengajaran di kelas.

Tahap-tahap pengembangan kurikulum di perguruan tinggi dijalani secara terstruktur, sepanjang masa dari tahun ke tahun selama satu periode pemberlakuan kurikulum berkisar antara 4 hingga 5 tahun. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomo 232/U/2000, kurikulum pada perguruan tinggi untuk program sarjana (S1) berkisar antara 144 s/d 160 sks, sedangkan untuk program magister (S2) berkisar 36 s/d 50 sks, dan untuk program doktor (S3) berkisar 40 s/d 52 sks.

## **2. Perencanaan Kurikulum Pendidikan Tinggi Bidang Penelitian**

### ***a. Deskripsi tentang Perencanaan Kurikulum Bidang Penelitian***

Berdasarkan data yang dihimpun, perencanaan kurikulum pada program pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus dilakukan penyusunan secara periodik mulai kurikulum 1997, kurikulum 2003, dan kurikulum 2008, hingga kurikulum 2013. Kurikulum dari tiga periode itu dilakukan evaluasi dan penyusunan kembali hingga melibatkan para dosen dan ahli, baik dari dalam lembaga maupun ahli dari luar. Kurikulum 2008 disusun dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Jadi, kurikulum 2008 bisa disebut kurikulum dengan pendekatan dengan pola *corelated curriculum*, yaitu pendekatan dengan pola pengelompokan beberapa

mata kuliah yang seiring (serumpun). Artinya, kurikulum 2008 ini tidak kurikulum yang berpendekatan dengan pola *subject matter curriculum*, atau pendekatan yang menekankan pada mata pelajaran/ mata kuliah secara terpisah-pisah. Dari sini, kurikulum STAIN Kudus Tahun 2008 sudah melangkah lebih maju. Namun, tantangan ke depan untuk STAIN Kudus, para perencana kurikulum sebaiknya mempertimbangkan suatu pendekatan dengan *polaintegrated curriculum*, yaitu pendekatan dengan penyatuan keseluruhan mata kuliah sebagai bahan ajar yang sistematis-integralistik. Jadi, ada tiga mata kuliah yang bernuansa penelitian, yaitu praktikum penelitian, metodologi penelitian kualitatif, dan metodologi penelitian kuantitatif.

***b. Deskripsi tentang Silabi Kurikulum Bidang Penelitian***

Berdasarkan data yang dihimpun, silabi kurikulum bidang penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus didesain sebagai berikut:

- 1) Silabi Mata Kuliah Metodologi Penelitian
  - a. Pengertian ilmu, penelitian, dan kebenaran secara ilmiah
  - b. Ruang lingkup penelitian ilmiah
  - c. Jenis-jenis dan model penelitian ilmiah
  - d. Masalah, fokus, dan judul dalam penelitian ilmiah
  - e. Kredibilitas literatur, landasan teori, dan kerangka teoritik dan cara pengutipan dalam penelitian ilmiah
  - f. Data dan sumber data dalam penelitian ilmiah
  - g. Populasi dan sampel dalam penelitian ilmiah
  - h. Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah
  - i. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ilmiah
  - j. Validitas dan reliabilitas data dalam penelitian ilmiah
  - k. Macam dan teknik analisis data dalam penelitian ilmiah
  - l. Temuan, simpulan dan rekomendasi dalam penelitian ilmiah
  - m. Penyusunan abstrak dan lampiran-lampiran pendukung dalam penelitian ilmiah
  - n. Penyusunan laporan dan publikasi hasil penelitian
- 2) Silabi Mata Kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif
  - a. Pengertian metodologi penelitian dan metode penelitian

- kualitatif
  - b. Ruang lingkup penelitian kualitatif.
  - c. Jenis-jenis dan model penelitian kualitatif.
  - d. Masalah, fokus, judul, kajian pustaka, dan sistematika dalam penelitian kualitatif (studi lapangan).
  - e. Sumber data dalam penelitian kualitatif (studi lapangan).
  - f. Human instrumen dan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif (studi lapangan).
  - g. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif (studi lapangan).
  - h. Macam-macam dan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif (studi lapangan).
  - i. Penelitian kepustakaan (studi pemikiran tokoh dan studi teks)
  - j. Masalah, fokus, judul, kajian pustaka, dan sistematika dalam penelitian kualitatif (studi kepustakaan)
  - k. Sumber data dalam penelitian kualitatif (studi kepustakaan)
  - l. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif (studi kepustakaan)
  - m. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif (studi kepustakaan)
  - n. Content Analysis dan macam-macam teknik analisis data dalam penelitian kualitatif
- 3) Silabi Mata Kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif
- a. Pengertian metodologi penelitian dan metode penelitian kuantitatif
  - b. Ruang lingkup penelitian kuantitatif.
  - c. Jenis-jenis dan model penelitian kuantitatif (studi korelasi, studi komparasi, studi eksperimen, dan sebagainya).
  - d. Masalah, rumusan masalah, judul, dan teori dalam penelitian kuantitatif
  - e. Populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif
  - f. Macam-macam instrumen dan teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif

- g. Uji validitas dan reliabilitas instrument dalam penelitian kuantitatif
- h. Uji asumsi klasik dalam penelitian kuantitatif
- i. Penghitungan *statistic* deskriptif dalam penelitian kuantitatif
- j. Uji korelasi dalam analisis kuantitatif
- k. Uji komparasi dalam analisis kuantitatif
- l. Analisis multivariate dalam penelitian kuantitatif
- m. Analisis kuantitatif menggunakan SPSS, SEM, dan sebagainya
- n. Kesimpulan dalam teknik analisis data kuantitatif

**c. Deskripsi tentang Satuan Acara Perkuliahan Kurikulum Penelitian**

Satuan acara perkuliahan untuk ketiga mata kuliah rumpun bidang penelitian, yaitu metodologi penelitian, metodologi penelitian kualitatif, dan metodologi penelitian kuantitatif itu disusun dengan komponen kode mata kuliah, kelompok jenis mata kuliah, program studi, strata kesarjanaaan, bobot sistem kredit semester, banyak pertemuan empat belas kali, waktu sesuai bobot kredit, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, metode pembelajaran, sistem penilaian, serta bahan dan sumber belajar.

**C. Simpulan**

Kurikulum pada perguruan tinggi yang mengajarkan peserta didiknya untuk mampu melakukan tindakan penelitian, memerlukan strategi khusus agar semakin kontekstual dengan perkembangan metodologi dan isu-isu hangat bidang penelitian. Jenis-jenis dan strategi penelitian yang semakin luas dan kaya menyarankan agar kurikulum penelitian di perguruan tinggi menentukan berbagai spesifikasinya sesuai bidang dan program studi di perguruan tinggi. Penelitian ini mendapatkan hasil sebagai berikut: (1) perencanaan kurikulum 2008 STAIN Kudus menggunakan pendekatan dengan pola *integrated curriculum*, (2) Silabi ketiga mata kuliah serumpun bidang penelitian itu berbeda secara jelas dari aspek ruang

lingkupnya, (3) Satuan acara perkuliahan untuk ketiga mata kuliah rumpun bidang penelitian disusun dengan komponen kode mata kuliah, kelompok jenis mata kuliah, program studi, strata kesarjanaaan, bobot sistem kredit semester, tatap muka empat belas kali, waktu sesuai bobot kredit, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, metode pembelajaran, sistem penilaian, serta bahan dan sumber belajar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Buku Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.
- De Vos. 1987. *Pengantar Etika (terjemahan) Soejono Soemargono*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Denzin, Norman, K and Lincoln, Yvonna S. 2000. *Handbook of Qualitative Research (Second Edition)*. California: Sage Publication, Inc.
- Matthew, Miles B, dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- McMillan, James H and Sally Schumacher. 2001. *Research In Education A Conceptual Introduction*. San Francisco: Longman.
- Moleong, Lexy, J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nasution, S,. 1993. *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, S,. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nizar, Samsul. 2002. *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis*. Jakarta: Ciputat Press.
- Poedjawiyatna. 1985. *Etika : Filsafat Tingkah Laku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Praja, Juhaya S. 1997. *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*. Bandung: Tiara.
- Robbins, Stephen P. 2008. *Perilaku Organisasi (Edisi Kesepuluh)*. Terjemahan Benyamin Molan. Indonesia: Indeks.
- Rofiq, Moh. 2009. *Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*. Yogyakarta: LKiS.
- Salam, Burhanuddin. 2000. *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Satmoko, Retno, Sriningsih. 1999. *Landasan Kependidikan* :

- Pengantar ke Arah Ilmu Pendidikan Pancasila*. Semarang: CV. IKIP Semarang Press.
- Soetopo, Henyat dan Soemanto, Wasty. 1986. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: PT. Bima Aksara.
- Subandijah. 1996. *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarminta. 1991. *Filsafat Proses: Sebuah Pengantar Sistematis Filsafat Alfred North Whitehead*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suseno, Franz Magnis. 1987. *Etika Dasar*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tilaar, HAR. 1999. *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Tjiptono, Fandy dan Anastasia Diana. 2000. *Total Quality Manaaagement*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Vembriarto, St,. 1993. *Pengantar Perencanaan Pendidikan*. Jakarta: PT. Grasindo.

# **KURIKULUM PRAKTIK PROFESI LAPANGAN (PPL) JURUSAN TARBIYAH STAIN KUDUS**

**Hanik Rosyidah**

TASAMUH INSTITUTE, Jawa Tengah, Indonesia.

Hanikrosyidah70@yahoo.com

## **Abstrak**

PPL sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan siswa. Oleh karena itu, kurikulum PPL harus disusun secara sistematis. Penelitian ini menjelaskan tentang (1) rancangan dan isi kurikulum PPL, (2) implementasi dan evaluasi PPL di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan observasi dan dokumen. Validitas dan reliabilitas diverifikasi dengan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan adaptabilitas. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan model deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) rancangan dan isi PPL untuk siswa di madrasah dengan pendekatan khusus dalam pragmatik atau kompetensi, dan berisi administrasi mengajar dan sekolah, (2) implementasi dan evaluasi PPL dengan standar yang tinggi untuk melewati: penguasaan siswa, mengajar semua materi agama Islam, pengajaran Islam serta administrasi pendidikan, dan juga kerjasama dalam program dan kegiatan sekolah.

**Kata kunci: kurikulum, PPL, STAIN Kudus**

## **Abstract**

*FIELD PROFESSION PRACTICE CURRICULUM OF ISLAMIC EDUCATION DEPARTMENT OF STAIN KUDUS . PPL is important for improving student skills. Therefore, curriculum of PPL must be sistematically organized. This research explained about (1)*

*design and content of curriculum of PPL, (2) implementation and evaluation of PPL in State Islamic College of Kudus. This research were designed in the qualitative approach. Data were gathered by using observation and document. The validity and reliability were verified by credibility, transferability, dependability, and conformability test. The data were analyzed by using descriptive model. The results of this research are (1) the design and content of PPL for students in madrasah/islamic school with special approach in pragmatic or competence, and consist of both of teaching and school administration, (2) implementation and evaluation of PPL with higher standard for passing : students mastery, teaching all of islamic subject matters, islamic teaching and educational administration, and also collaboration in school programme and activities.*

**Keywords:** curriculum, PPL, STAIN Kudus

## **A. Pendahuluan**

Sistem pendidikan di Indonesia mulai dibenahi pada berbagai aspeknya, salah satunya adalah di bidang keguruan. Pendidikan guru di Indonesia semakin mendapatkan perhatian serius, seiring dengan tuntutan terhadap profesi guru yang harus memenuhi kriteria sebagai sarjana dan mempunyai kompetensi khusus di bidang keguruan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru adalah seorang yang mempunyai kualifikasi sarjana, atau setaranya. Guru adalah sarjana yang mempunyai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Ketentuan formal guru di Indonesia itu sangat jelas dan merupakan bagian dari strategi nasional untuk memastikan bahwa guru-guru di Indonesia itu mempunyai kriteria yang jelas sebagai guru bermutu, layak untuk mendidik dan mengajar, serta sepantasnya mendapat kesejahteraan yang memadai dari kompensasi kerja profesionalnya.

Visi Indonesia dalam mengarahkan pendidikan, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Rumusan pendidikan dan tujuan yang divisikan oleh bangsa Indonesia benar-benar mencerminkan dasar negara dan Pancasila, yaitu berketuhanan yang maha esa, sehingga kata beriman dan bertakwa menjadi kata kunci pertama.

Sebelumnya, para pakar agak ragu-ragu untuk mengatakan bahwa guru itu suatu profesi. Namun, sistem perundangan dan peraturan lainnya sudah jelas mengatur tentang kualifikasi pendidikan, kriteria, kompetensi, standar kinerja, dan standar pendapatan guru sehingga mereka tidak ada lagi kesulitan untuk menyebut guru sebagai suatu profesi. Selayaknya profesi pada umumnya, tidak semua orang bisa menjadi guru kecuali yang memenuhi syarat, dan bagi orang yang berprofesi itu mempunyai jaminan sosial misalnya gaji atau honor yang cukup layak untuk kehidupannya.

Berbagai upaya untuk pengembangan kurikulum di perguruan tinggi tersebut sangat menarik karena merupakan bidang penting dalam perkembangan pendidikan dewasa ini. Berbagai alasan dan latar belakang di atas, menjadikan penelitian ini terfokus pada tema kajian yang berjudul Kurikulum PPL Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus.

kajian ini adalah tentang kurikulum praktik pada pembelajaran agama Islam. Kajian tersebut secara rinci difokuskan pada hal-hal sebagai berikut: (1) Bagaimana desain dan isi kurikulum yang berorientasi pada pelaksanaan praktik profesi lapangan (PPL) di Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus, (2) Bagaimana pelaksanaan dan evaluasi praktik profesi lapangan (PPL) di Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus. Banyak masalah dalam hal berkaitan dengan kurikulum bermuatan praktik pada perguruan tinggi agama Islam, namun dalam penelitian ini dibatasi cakupan pembahasannya pada aspek: (1) kebijakan desain dan isi kurikulum yang berorientasi pada pelaksanaan praktik profesi lapangan (PPL) di Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus, (2) pelaksanaan dan evaluasi praktik profesi lapangan (PPL) di Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif adalah bukan dimaksudkan untuk menguji suatu teori, tetapi untuk mengungkapkan fenomena dan realitas melalui data-data secara deskriptif. Data-data spesifik dicari maknanya untuk membuat kesimpulan yang general dari makna-makna yang diperoleh dari data-data tersebut. Penelitian ini dirancang untuk menjelaskan tentang materi perkuliahan yang berorientasi pada praktik mengajar atau PPL pada Jurusan Tarbiyah di STAIN Kudus.

Sumber informasi utama dalam penelitian ini adalah dokumentasi di STAIN Kudus. Untuk memperoleh data yang absah, sumber informasi ditentukan secara purposif, yaitu para dokumen yang dianggap bisa memberikan data yang akurat, maka dituju sebagai sumber yang pokok. Peneliti mengklasifikasi sumber-sumber tersebut dalam pembagian bidang yang diteliti tentang kurikulum, isinya, dan evaluasi pelaksanaannya di STAIN Kudus. Agar diperoleh kesesuaian antara persoalan yang fokus dengan setting penelitiandilakukan penajakan dan penilaian lapangan, dalam hal ini adalah pada Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus. Penelitian dengan pendekatan kualitatif tidak ditentukan batas waktu secara jelas sampai peneliti memperoleh pemahaman yang benar-benar mendalam tentang obyek yang diteliti. Namun karena pertimbangan dan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, maka penelitian dapat diakhiri dan dibuat laporannya jika dianggap telah mencapai data dan analisis sesuai dengan rancangan.

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan informasi dari sumber yang berupa dokumen/arsip, foto, dan bahan statistik yang lain. Data diperoleh dari dokumentasi data-data, baik yang berupa tulisan/dokumen resmi maupun dokumen pribadi seperti makalah, artikel, catatan dan surat-surat, misalnya buku panduan, buku laporan, buku laporan dan sebagainya. Dalam hal ini, dokumentasi utamanya adalah administrasi perkuliahan dan praktik profesi lapangan di STAIN Kudus. Agar data yang diperoleh, yang berujung pada kesimpulan atau verifikasi, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, sebagaimana dikatakan Moleong (2001:77) meliputi: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif dan pengecekan. Namun, dalam penelitian ini, tidak semua teknik di atas digunakan,

hanya beberapa teknik yang tepat dan diperlukan saja yang digunakan. Untuk pengecekan keabsahan data menggunakan empat kriteria Moleong (2001:79), yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun untuk menambah pemahaman mengenai bahan-bahan penelitian untuk memungkinkan mendapat temuan sebagai hasil penelitian (Bogdan 1990:31). Untuk memberikan pemaknaan atas data atau fenomena yang ditemukan dan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka dilakukan analisis dengan pendekatan kualitatif dengan eksplanasi bersifat deskripsi. Langkah yang ditempuh dalam analisis deskriptif adalah mengorganisir data berupa gambar, foto, dokumen yang berupa laporan, biografi, artikel, buku-buku pedoman dan sebagainya (Moleong, 2001: 103). Peneliti melakukan penarikan simpulan atau verifikasi, setelah terlebih dahulu melihat hubungan satu dengan yang lain dalam kesatuan bahasan. Selanjutnya peneliti melakukan interpretasi dan memberi makna terhadap fenomena yang ditemukan. Proses verifikasi ini ditempuh dengan tujuan untuk lebih memperkaya dan mengabsahkan hasil interpretasi yang dilakukan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kurikulum dan Pengembangannya**

Pendidikan tinggi di Indonesia melaksanakan proses pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum nasional. Di samping itu, lembaga pendidikan juga menerapkan kurikulum muatan lokal yang ditentukan oleh masing-masing satuan lembaga pendidikan. Kedua macam kurikulum itu merupakan keharusan bagi setiap lembaga pendidikan untuk menerapkannya. Menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum pendidikan wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, dan ilmu-ilmu dasar dan ilmu-ilmu terapan yang mendukung tujuan pendidikan masing-masing fakultas, jurusan, dan program studi. Sedangkan menurut UU RI Nomor 12 Tahun 2012, kurikulum pendidikan tinggi wajib

memuat agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia.

Pengembangan kurikulum menurut Soetopo (1986: 41) adalah kegiatan menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan, pelaksanaan dan penyempurnaan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama kegiatan pengembangan tersebut. Sedang pengembangan kurikulum dalam rumusan Soetopo (1986: 45) didefinisikan sebagai *the proces of analyzing and refining goals, aims and objectives, together with the translation of these into the content of course by formal or informal methods*. Kegiatan pengembangan kurikulum meliputi penyusunan kurikulum, pelaksanaannya dalam proses belajar mengajar dan penyempurnaan terhadap komponen-komponen tertentu atas dasar hasil penilaian.

Menurut Nasution (1993: 1-2), pengembangan kurikulum didasarkan atas asas-asas tertentu, yaitu: (1) asas filosofis yang pada hakekatnya menentukan tujuan umum pendidikan, (2) asas sosiologis yang memberikan dasar untuk menentukan apa yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, budaya dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (3) asas organisatoris yang memberikan dasar-dasar dalam bentuk bagaimana bahan pelajaran disusun dan bagaimana luas dan urutannya, dan (4) asas psikologis yang memberikan prinsip-prinsip tentang perkembangan manusia dalam berbagai aspek serta cara belajar agar bahan yang disediakan dapat dicerna dan dikuasai peserta didik sesuai dengan taraf perkembangannya. Soetopo (1986: 46) menerangkan bahwa landasan pengembangan kurikulum dapat menjadi “titik tolak” sekaligus menjadi “titik sampai”. Titik tolak berarti pengembangan kurikulum dapat didorong oleh pembaharuan tertentu seperti penemuan teori belajar yang baru dan perubahan tuntutan masyarakat. Titik sampai berarti kurikulum harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat merealisasikan perkembangan tertentu, seperti dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan-tuntutan sejarah masa lalu, perbedaan latar belakang peserta didik, nilai-nilai filsafat suatu masyarakat dan tuntutan-tuntutan kultur tertentu.

Perencanaan menurut Vembriarto (1993: 28) dalam bukunya Pengantar Perencanaan Pendidikan adalah penggunaan analisis yang

bersifat rasional dan sistematis terhadap proses pengembangan pendidikan yang bertujuan untuk menjadikan pendidikan lebih efektif dan efisien dalam menanggapi kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat. Ada empat persoalan penting yang dibahas dalam perencanaan, yaitu (1) tujuan apa yang dicapai dengan perencanaan itu, (2) status sistem pendidikan yang ada dan bagaimana keadaannya sekarang, (3) kemungkinan-kemungkinan pilihan apa yang ditempuh untuk mencapai tujuan, dan (4) strategi yang terbaik untuk mencapai tujuan. Jadi perencanaan dalam pendidikan adalah sebagai fungsi manajemen pendidikan. Fungsi perencanaan tersebut adalah untuk menentukan keadaan yang sebaik-baiknya dari hubungan-hubungan sumber daya internal dan eksternal dalam suatu sistem pendidikan dengan keadaan yang dinamis serta cara yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Salah satu sumber daya yang harus direncanakan adalah “materi pendidikan” atau kurikulum. Sumber daya “kurikulum” ini membutuhkan perencanaan yang tepat dan strategis. Hasil perencanaan kurikulum yang baik menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Kurikulum dalam konteks perkembangan harus selalu dikembangkan. Fungsi perencanaan kurikulum dan pengembangannya itu dimaksudkan untuk pengelolaan pendidikan agar tidak mengalami ketertinggalan. Soetopo (1986: 40-41) mengemukakan tiga faktor umum yang mendorong pengembangan kurikulum, yaitu (1) perubahan yang diinginkan masyarakat sehingga mereka merencanakan adanya perubahan yang cukup penting dalam kurikulum dan sistem pendidikan, (2) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, dan (3) pertumbuhan penduduk dunia. Menurut Nasution (1993: 159) dalam bukunya Pengembangan Kurikulum, proses pengembangan kurikulum dijalankan karena (1) hasil penelitian dan pengembangan, (2) interaksi sosial, dan (3) metode pemecahan masalah. Menurut Soetopo (1986: 48), prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum meliputi: (1) prinsip relevansi, yang meliputi relevansi dengan lingkungan, perkembangan masa dan tuntutan dunia kerja, (2) prinsip efektifitas yang meliputi efektifitas mengajar pendidik dan efektifitas belajar peserta didik, (3) prinsip efisiensi dalam penggunaan sumber daya pendidikan. Prinsip-prinsip

pengembangan kurikulum menurut Subandijah (1993: 48) adalah: (1) prinsip relevansi, (2) prinsip efektifitas dan efisiensi, (3) prinsip kesinambungan, (4) prinsip fleksibilitas, (5) prinsip berorientasi pada tujuan, (6) prinsip pendidikan seumur hidup, dan (6) prinsip kesesuaian dengan model pengembangan kurikulum.

Pendekatan dalam pengembangan kurikulum diorientasikan pada (1) tujuan pendidikan dan (2) bahan pelajaran. Subandijah (1993: 55) mengemukakan tiga pendekatan dengan pola organisasi bahan sebagai berikut: (1) pendekatan dengan pola subject matter curriculum, yaitu pendekatan yang menekankan pada mata pelajaran/mata kuliah secara terpisah-pisah, (2) pendekatan dengan pola corelated curriculum, yaitu pendekatan dengan pola pengelompokan beberapa mata kuliah yang seiring (serumpun), dan (3) pendekatan dengan pola integrated curriculum, yaitu pendekatan dengan penyatuan keseluruhan mata kuliah sebagai bahan ajar yang sistematis-integralistik. Langkah-langkah utama dalam perencanaan kurikulum misalnya dengan model Tyler dalam Nasution (1993:140) meliputi (1) menentukan tujuan pendidikan, (2) menentukan proses belajar mengajar, (3) menentukan organisasi kurikulum, dan (4) menentukan cara penilaian hasil belajar. Adapun tahap-tahap dalam pengembangan kurikulum menurut Subandijah (1993: 215) adalah: (1) pengembangan kurikulum pada tingkat lembaga, (2) pengembangan kurikulum pada tingkat/setiap bidang studi, dan (3) pengembangan pengajaran di kelas. Tahap-tahap pengembangan kurikulum di perguruan tinggi dijalani secara terstruktur, sepanjang masa dari tahun ke tahun selama satu periode pemberlakuan kurikulum berkisar antara 4 hingga 5 tahun.

## **2. Kurikulum di Perguruan Tinggi**

Perguruan tinggi mempunyai strategi khusus dalam kurikulum terutama untuk mengatasi masalah relevansi dengan perkembangan dan kebutuhan. Relevansi dimaksud misalnya tentang praktik profesi lapangan (PPL) yang merupakan mata kuliah utama dengan pelaksanaan yang langsung di sekolah/madrasah. Kurikulum pada Jurusan Tarbiyah sebagai bagian dari rumpun ilmu keIslaman, mempunyai dua aspek teoritik dan praktik dalam keilmuannya. Ilmu pendidikan islam merupakan ilmu teoritik

sekaligus ilmu praktik. Karenanya, pembelajaran agama Islam harus mendapat perhatian khusus pada aspek teoritik maupun praktiknya. Kurikulum teoritik tentulah menjadi bahan wajib. Kurikulum praktik juga menjadi penting, misalnya praktik ibadah, praktik mengajar, dan semacamnya.

Kajian keislaman di Indonesia mempunyai keunikan-keunikan dalam membagi pembedangan ilmu. Ada keilmuan rumpun ushuluddin, keilmuan rumpun dakwah, keilmuan rumpun syari'ah, keilmuan rumpun tarbiyah, dan keilmuan rumpun adab, serta baru-baru ini ada keilmuan rumpun ekonomi dan bisnis Islam. Keilmuan rumpun tarbiyah di bagi menjadi beberapa bagian, yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PGRA), kependidikan Islam/manajemen pendidikan Islam (KI/MPI), dan tadrīs matematika dan ilmu pengetahuan alam (T-MIPA) meliputi matematika, fisika, biologi, kimia. Program studi di keilmuan rumpun tarbiyah dengan pembagian seperti itu tentu sangat berbeda dengan cara kampus-kampus di negara-negara lain yang mengembangkan keilmuan tarbiyah.

Keilmuan rumpun tarbiyah di Indonesia juga akan dikembangkan terus seiring dengan perkembangan keilmuan, kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Asal muasalnya, tarbiyah hanya membidangi Pendidikan Agama Islam (PAI). Pengembangan tarbiyah memunculkan bidang Pendidikan Bahasa Arab (PBA), kemudian disusul bidang-bidang lain hingga terdapat KI/MPI, PGRA, PGMI, tadrīs. Sekarang ini, bidang tadrīs masih terbatas pada MIPA, dan pada waktu-waktu yang akan datang akan terus dikembangkan banyak bidang yang pendidik calon-calon guru untuk semua jenis ilmu dan mata pelajaran. Artinya, pembedangan keilmuan itu menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

PPL sebagai bagian utama praktikum di Jurusan Tarbiyah juga mempunyai kepentingannya sendiri untuk dievaluasi dan dikembangkan agar desain, ancangan, pelaksanaan, serta hasilnya bisa disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan sosial masyarakat yang menggunakan jasa pendidik. PPL sebagai mata kuliah praktik lapangan di sekolah maupun madrasah juga membutuhkan penajaman

visi maupun materi agar sesuai dengan harapan. PPL menjadi sangat penting peranannya untuk mencetak calon guru yang bermutu.

Guru bermutu juga terkait dengan kurikulum, merupakan guru ideal yang memenuhi ketentuan kualifikasi maupun kompetensi-kompetensi yang menunjukkan kemampuan unjuk kerja sebagai pendidik sesuai bidangnya. Guru Matematika misalnya, adalah guru yang berpendidikan kesarjanaan di bidang Matematika, menguasai kemahiran dalam bidang matematika, menguasai dasar-dasar pengajaran dan terampil dalam praktik dan pengembangannya, bisa berkolaborasi dengan orang lain di sekitarnya serta mempunyai keribadian yang matang sebagai guru yang bertugas mendidik, membimbing, dan melatih peserta didiknya. Guru bermutu secara teoritik bisa dilihat dari dua aspek yaitu kemampuan berpikir abstrak dan komitmen. Kemampuan berpikir abstrak menunjuk pada tingkat kecerdasan guru, bahwa guru haruslah seorang yang cerdas dengan menguasai ilmu dan pengetahuan secara matang. Komitmen menunjuk pada tingkat kesetiaan dan kecintaan seorang guru dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik. Dua kriteria guru menurut Glickman itu mengkonsepkan empat macam guru dengan derajat mutu yang berbeda, yaitu guru berhasil, guru pengkritik, guru penganut, dan guru gagal.

Guru bermutu juga bisa dilihat dari penguasaan kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Pembagian kompetensi seperti itu untuk mengukur mutu guru secara nasional di Indonesia, sesuai dengan sistem perundangan yang berlaku. Adapun, secara teoritik, kompetensi guru itu banyak sekali, yaitu meliputi sepuluh kompetensi yang sudah sejak lama menjadi acuan untuk menilai kemampuan guru. Kesepuluh kompetensi itu meliputi : menguasai bahan ajar, mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media/sumber belajar, menguasai landasan-landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan di sekolah, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Kompetensi-kompetensi guru tersebut mempunyai indikator-indikator

operasional yang menunjukkan kemampuan nyata guru dalam unjuk kerjanya. Indikator itu bersifat teknis dan menjadi tolok ukur untuk menilai kemampuan guru yang bermutu atau sebaliknya.

Kompetensi profesional, senada dengan kompetensi penguasaan bahan ajar berarti guru harus menguasai sekurangnya tiga hal yaitu ilmu pengetahuan yang menjadi disiplin keilmuannya secara luas dan mendalam, menguasai materi pengajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku di sekolah, dan menguasai materi pengembangan dan perkembangan terbaru di bidang dan rumpunnya itu. Jadi, seorang guru agama di samping menguasai secara luas dan mendalam tentang berbagai ilmu agama, meliputi *qur'an*, *hadits*, *akidah*, *akhlak*, *fikih*, dan sejarah dan kebudayaan Islam. Guru agama itu juga harus memahami betul materi-materi keagamaan yang luas itu, mana yang khusus menjadi kurikulum di sekolah/madrasah sesuai tingkatannya, agar fokus dan tidak meluas ke pembahasan lainnya. Guru agama juga tidak boleh ketinggalan informasi dan perkembangan terbaru tentang ilmu-ilmu agama di era kontemporer saat ini, yang berarti dia harus berwawasan luas dan mengikuti perkembangan.

Kompetensi pedagogik, senada dengan kompetensi mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media/sumber belajar, menguasai landasan-landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran merupakan kompetensi di bidang ketetampilan mengajar. Guru harus menguasai cara menyusun rencana pengajaran, langkah-langkah dalam strategi mengajar, hingga mengevaluasi hasil belajar peserta didiknya. Guru juga harus terampil memilih dan menggunakan media atau alat peraga yang tepat untuk menjadikan suatu tindak pengajaran lebih menarik dan efektif. Guru juga harus memahami dengan baik latar belakang dan karakteristik peserta didiknya, sehingga dia akan bisa memilih metode dan pendekatan yang tepat dalam mengajar. Guru juga harus terampil dalam administrasi pengajaran maupun administrasi pada umumnya di sekolah/madrasah supaya dia bisa tertib dan efisien serta efektif dalam menjalankan profesinya. Guru juga harus berwawasan

luas dalam mengakses, memahami, dan menerapkan temuan-temuan inovatif atau model-model baru yang baik untuk diterapkan di sekolahnya.

Kompetensi kepribadian, senada dengan mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan di sekolah, yaitu bahwa guru harus benar-benar seorang yang matang secara personal, baik ucapan, sikap, dan perbuatan karena hal itu menjadi contoh nyata bagi peserta didik. Di samping itu, guru juga harus mempunyai ilmu dan strategi yang cukup untuk memberikan bimbingan kepada peserta didiknya sehingga mereka menjadi orang yang bermotivasi tinggi untuk belajar dan berhasil, serta menjadi orang yang mempunyai akhlak mulia.

Kompetensi sosial, berarti bahwa guru mampu berinteraksi dengan berbagai pihak, baik dengan peserta didik, dengan pimpinan dan teman sejawatnya, dengan pimpinan dan pejabat di lingkungan kerja lebih luas, misalnya kantor dinas pendidikan/atau kantor kementerian agama, dan juga berinteraksi dengan orang tua/wali siswa serta berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Interaksi dengan berbagai pihak itu dijalin dengan sebaik-baiknya karena akan berpengaruh kepada kinerja pribadinya sebagai guru, dan lebih-lebih akan berpengaruh pada lembaga pendidikan tempat kerjanya. Guru merupakan insan berprofesi yang jelas, baik pekerjaan maupun konsekwensinya dalam melaksanakan tugas profesinya. Banyak guru yang cerdas dan terampil dengan kehidupan yang layak dan berkecukupan. Guru tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga menjadi inspirator bagi bangsanya, dan selayaknya mereka berkehidupan yang pantas sebagai guru suatu bangsa. Guru yang melaksanakan tugas dengan baik itu, juga mempunyai karir keguruan yang menunjukkan keberhasilan dan prestasi.

Guru bisa berkarir di sekolah/madrasah menjadi pimpinan di sekolah/madrasah, misalnya menjadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan pembina keorganisasi siswa. Guru juga bisa berkarir di bidang pendidikan di luar lingkungan sekolah/madrasah, misalnya menjadi pengawasa sekolah, menjadi pejabat di dinas pendidikan yang mengurus tentang pendidikan, pejabat di kantor kementerian agama yang mengurus pendidikan, dan sebagainya. Tentu saja, karir-karir tersebut mensyaratkan kemampuannya yang cakap dalam melaksanakan tugas sebagai guru selama ini. Lebih luas lagi, guru

juga mempunyai karir sebagai pimpinan lebih tinggi lagi, misalnya sebagai pejabat di lingkungan kabupaten/atau provinsi, maupun pemerintahan pusat. Guru juga bisa menjadi pimpinan di yayasan/ atau badan hukum tertentu di lingkungan pendidikan ataupun lainnya, asalkan kemampuannya dipandang mumpuni untuk menduduki jabatan tersebut. Selain itu, guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, pembimbing, dan pelatih di sekolah juga bisa mempunyai karir pendamping lainnya, misalnya menjadi trainer atau pelatih bagi guru-guru lain, menjadi motivator, menjadi penulis buku, menjadi peneliti, dan sebagainya. Karir seperti itu tidak memerlukan peluang khusus untuk menduduki suatu jabatan, tetapi memerlukan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta ketekunan yang tinggi.

### **3. Deskripsi tentang Desain Kurikulum yang Berorientasi PPL**

Ada enam (6) mata kuliah praktikum yang berorientasi pada pelaksanaan praktik profesi lapangan, yaitu: praktikum bahasa Arab, praktikum bahasa Inggris, praktikum ibadah, praktikum teknologi informasi, micro teaching, dan praktik profesi lapangan. Keenam mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah khusus. Kekhususannya terletak pada desain isinya yang berorientasi membekali mahasiswa (calon sarjana pendidikan Islam) agar mempunyai kemampuan dasar dan kemampuan mahir dalam mengajar. Di samping itu, ada dua puluh satu mata kuliah yang bisa membekali mahasiswa untuk mahir praktik mengajar dalam praktik profesi lapangan (PPL) karena isi maupun cakupannya memerlukan praktik sebagai latihan bagi mahasiswa. Kedua puluh satu mata kuliah tersebut bermuatan penguasaan bahaan utama mengajar ataupun praktikum mata kuliah. Artinya, mata kuliah itu disusun tidak semata-mata untuk praktik, tetapi di dalam isi mata kuliah itu memuat unsur untuk kerja praktik bagi mahasiswa. Misalnya mata kuliah bahasa, metodologi dan strategi pembelajaran, serta ilmu-ilmu keagamaan membutuhkan praktik baik dalam bentuk simulasi, demosntrasi, atau lainnya.

### **4. Deskripsi tentang Pelaksanaan dan Evaluasi PPL**

Pelaksanaan praktik profesi lapangan terdiri dari dua kegiatan utama, dan satu kegiatan pelengkap. Kegiatan utama meliputi menyusun administrasi pembelajaran, dan praktik mengajar di

kelas. Kegiatan pelengkap berupa keikutsertaan dalam kegiatan kependidikan lainnya, misalnya kegiatan kesiswaan, pramuka, olahraga, seni, pelatihan, dan semacamnya. Evaluasi kelulusan PPL ditentukan secara akumulatif dari semua kegiatan tersebut, dengan mencapai nilai rata-rata minimal 70. Nilai tersebut ditentukan oleh unjuk kerja para mahasiswa praktikan yang dinilai oleh dosen pembimbing lapangan, kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kurikulum, dan para guru pamong sekurang-kurangnya untuk 10 kali praktik mengajar.

### **C. Simpulan**

Tulisan ini menyimpulkan bahwa rancangan dan isi kurikulum PPL untuk siswa di madrasah berisi administrasi mengajar dan administrasi sekolah. Implementasi dan evaluasi PPL di STAIN Kudus menggunakan standar yang tinggi agar mahasiswa PPL mampu dalam penguasaan siswa, mengajar semua materi agama Islam, pengajaran Islam serta administrasi pendidikan, dan juga kerjasama dalam program dan kegiatan sekolah.

## Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Matthew, Miles B, dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjetjep Rohendi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- McMillan, James H and Sally Schumacher. 2001. *Research In Education A Conceptual Introduction*. San Francisco: Longman.
- Moleong, Lexy, J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nasution, S., 1993. *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, S., 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Soetopo, Hendyat dan Soemanto, Wasty. 1986. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: PT. Bima Aksara.
- Subandijah. 1996. *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Akademik Civitas Akademika STAIN Kudus*. Kudus: STAIN Kudus.
- UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Vembriarto, St. 1993. *Pengantar Perencanaan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.

*halaman ini bukan sengaja dikosongkan*

---